

Cak Nur dianggap sebagai salah satu tokoh pembaruan pemikiran dan gerakan Islam di Indonesia. Cak Nur dikenal dengan konsep pluralismenya yang mengakomodasi keberagaman/ ke-bhinneka-an keyakinan di Indonesia. Menurut Cak Nur, keyakinan adalah hak primordial setiap manusia dan keyakinan meyakini keberadaan Tuhan adalah keyakinan yang mendasar.

Cak Nur mendukung konsep kebebasan dalam beragama, namun bebas dalam konsep Cak Nur tersebut dimaksudkan sebagai kebebasan dalam menjalankan agama tertentu yang disertai dengan tanggung jawab penuh atas apa yang dipilih. Cak Nur meyakini bahwa manusia sebagai individu yang paripurna, ketika menghadap Tuhan di kehidupan yang akan datang akan bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan, dan kebebasan dalam memilih adalah konsep yang logis.

Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibu kota, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada gerakan intelektual Islam di Indonesia. Buku ini adalah salah satu hasil kegiatan itu.



Karya Lengkap
Nurcholish Madjid

Keislaman,
Keindonesiaan,
dan Kemodernan



Karya Lengkap Nurcholish Madjid

Keislaman, Keindonesiaan,
dan Kemodernan



Penyunting:
Dr. Budhy Munawar-Rachman

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARYA LENGKAP
NURCHOLISH MADJID

Penyunting:
Dr. Budhy Munawar-Rachman



Nurcholish Madjid Society

Proyek **Karya Lengkap Nurcholish Madjid**
Editor: Budhy Munawar-Rachman (Ketua),
Elza Peldi Taher dan M. Wahyuni Nafis

KARYA LENGKAP NURCHOLISH MADJID

Penyunting Dr. Budhy Munawar-Rachman

Copyright @ Keluarga Nurcholish Madjid

All rights reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Cetakan Pertama Agustus 2020

Penerbit:

Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Grha STR Lt. 4, Ruang 411

Jl. Ampera Raya 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550



INDONESIA KITA



DAFTAR ISI

Indonesia Kita

- ♦ Mukadimah — 4817
- ♦ Nasionalisme Klasik di Bumi Nusantara — 4821
- ♦ Lahirnya Nasionalisme Modern Indonesia — 4833
- ♦ Tentang “Negara-Bangsa” (*“Nation-State”*) — 4843
- ♦ “Negara-Bangsa” dan Nasionalisme — 4859
- ♦ Indonesia Kita (I) — 4867
- ♦ Indonesia Kita (II) — 4875
- ♦ Indonesia menuju Masa Depan — 4881
- ♦ *Platform* Membangun Kembali Indonesia — 4887
- ♦ Penutup — 4925

*Dengan nama Allah Yang Mahakasih,
Mahasayang*

MUKADIMAH

Pertama-tama harus kita akui dengan penuh syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia, dalam hal pertumbuhan dan perkembangan keberadaannya sebagai suatu bangsa yang nyata, adalah bangsa yang sukses. Kini Indonesia adalah suatu realita kebangsaan dengan ciri-ciri budaya yang dapat dikenali sebagai khas Indonesia, dengan bahasa nasional yang juga khas Indonesia. Kenyataan-kenyataan utama itu merupakan modal bagi pengembangan dan pembangunan lebih lanjut, menuju cita-cita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Tetapi pada saat-saat ini semakin kuat dirasakan oleh semua warga negara bahwa cita-cita tersebut bertambah jauh dari kenyataan. Masyarakat berbicara tentang adanya krisis multidimensional, tanpa ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Mengingat sedemikian besarnya persoalan yang menghambat usaha mengatasinya, maka diperlukan kekuatan besar dan tangguh. Kekuatan itu akan terbentuk hanya dengan adanya peneguhan kembali ikatan batin atau komitmen semua warga negara kepada cita-cita nasionalnya, disertai pembaruan tekad bersama untuk melaksanakannya. Semua itu memerlukan semangat ungkapan Bung Karno (dengan sedikit revisi), “*semen bundeling van alle krachten van de natie*”, “pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa”.

Peneguhan kembali komitmen dan pembaruan tekad bersama itu memerlukan pengetahuan dasar secukupnya tentang sejarah pertumbuhan dasar secukupnya tentang sejarah pertumbuhan bangsa dan kesadaran akan hakikat proses-proses pertumbuhan itu yang penuh tantangan dan kesulitan. Sebagai bangsa baru yang masih terus dalam proses penjadian diri (*natio in making*), Indonesia masih memerlukan pengembangan pikiran-pikiran mendasar tentang kebangsaan dan kenegaraan, melanjutkan dan memperluas tradisi tukar-pikiran para tokoh pendirinya. Tidak ada masalah bangsa dan negara yang secara aman dapat dipandang sebagai masalah yang telah selesai dan tuntas. Karena hakikatnya sebagai kenyataan dinamis yang terus-menerus bergerak dan berputar menghasilkan energi, maka dengan sendirinya masalah kebangsaan dan kenegaraan tidak dibenarkan untuk dipandang sebagai benda mati yang statis, yang mandeg, tidak lagi mengalami perubahan dan pertumbuhan.

Kebaikan dalam segala kegiatan manusia adalah pancaran suara hati yang terang, yang *nûrânî*. Sebaliknya, kejahatan adalah pancaran suara hati yang gelap, yang *zhulmânî*. Maka dalam memandang dan menilai persoalan kehidupan kita bersama, kita harus menggunakan sensitivitas setajam-tajamnya, dengan berpedoman kepada suara hati nurani yang sebersih-bersihnya. Karena itu sungguh memprihatinkan adanya gejala-gejala matinya hati nurani di kalangan kita. Berbagai tindakan dan perilaku tidak benar dari masa lalu yang jelas-jelas telah menjerumuskan bangsa dan negara kepada kehancuran diulangi dengan sadar dan tanpa perasaan salah. Kebanyakan orang hanya memikirkan kepentingan diri dan golongannya belaka, dengan imbas antara lain munculnya nafsu memperkaya diri. Semakin sedikit orang yang dengan sungguh-sungguh berpikir dan bertindak untuk kepentingan seluruh bangsa. Mengingat kembali peringatan Bung Hatta dalam risalahnya “*Demokrasi Kita*” barangkali sekarang ini pun Indonesia adalah sebuah negara besar yang hanya menemukan orang-orang kerdil! Dan mengulangi sikap Bung Hatta saat itu, mungkin sekarang

pun kita terpaksa harus memberi “*fair chance*” kepada pihak-pihak yang tidak sadar, untuk membuktikan sendiri apakah sistem dan jalan pikiran mereka akan berhasil atau gagal. Namun jelas bahwa pikiran kecil tidak akan menghasilkan tindakan besar, dan sistem yang salah tidak mungkin melahirkan tatanan kehidupan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Jelas pula tidak mungkin kita membiarkan dan menunggu sampai saat kehancuran itu datang, sebab bisa jadi bahwa saat itu usaha penyelamatan sudah terlambat dan sia-sia. “Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna”. Ini seperti digambarkan dalam al-Qur’an, “*Dan apa yang mencegah manusia untuk beriman dan memohon ampun kepada Tuhan mereka, setelah datang kepada mereka petunjuk, sampai datang menimpakan mereka hukum sejarah yang berlaku atas orang-orang terdahulu atau datang azab langsung kepada mereka?*” (Q. 18:55).

Siapa pun yang memegang pimpinan bangsa dan negara, usaha mengatasi persoalan yang demikian besar sekarang ini tidak akan berhasil dengan mengabaikan berbagai persoalan tersebut. Mengawali semuanya itu, berikut ini adalah suatu usaha untuk memahami hakikat kebangsaan Indonesia dari sudut pandang yang cukup prinsipil namun kurang diperhatikan. Akan dicoba juga di sini untuk mencari hubungan logis antara krisis yang kita derita sekarang ini dengan dinamika kelahiran, pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Menirukan Ibn Khaldun saat menutup pembahasannya dalam buku *Muqaddimah*, apa yang dicoba lakukan dengan wacana ini adalah suatu rintisan, dengan harapan bahwa siapa pun yang memberikan keprihatinan yang sama, khususnya dari kalangan generasi penerus, akan mengembangkan dan memperbaikinya, dan melaksanakannya dengan memberi teladan sebaik-baiknya untuk warga masyarakat.

Mengingat kesenjangan yang begitu jauh antara cita-cita para pendiri negara dengan kenyataan yang kini kita saksikan, maka bangsa Indonesia memerlukan adanya suatu momen historis, dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan yang dengan sungguh-sungguh diwujudkan secara konsisten dengan

cita-cita para pendiri negara. Sebab, betatapun harus diakui dan dihargai, bahwa para pendiri negara kita telah meletakkan fondasi yang kukuh untuk dibangunnya pikiran-pikiran terbaik mengenai bangsa dan negara. Momen historis itu diharapkan dapat menjadi rujukan generasi berikutnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Saat memulainya adalah sekarang ini, saat setelah bangsa kita telah tumbuh dalam jangka waktu setengah abad lebih, suatu masa yang seharusnya sudah mulai membawa kita kepada tingkat kematangan dan kedewasaan yang lebih tinggi. ^[❖]

NASIONALISME KLASIK DI BUMI NUSANTARA

Kesuksesan Indonesia sebagai “bangsa”, dalam pengertian keberhasilannya muncul di antara bangsa-bangsa di dunia, tidak dapat dipandang sebagai hal biasa. Kesuksesan itu didahului dengan perjuangan panjang mendaki bukit terjal penuh ancaman bahaya sehingga banyak menuntut pengorbanan.

Pada mulanya terdapat berbagai suku bangsa mendiami kawasan Asia Tenggara, dalam lingkungan ribuan pulau, besar dan kecil. Hubungan antarpulau tidak selalu mudah, sehingga masing-masing pulau sedikit-banyak terisolasi satu dari yang lain, suatu kenyataan yang mendorong tumbuhnya ciri-ciri kesukuan, kebahasaan, dan kebudayaan yang terpisah-pisah. Bahkan dalam lingkungan pulau-pulau besar pun, pola kesukuan dan kebudayaan yang berbeda-beda terdorong muncul dengan sifat khas masing-masing menurut lingkungannya, dikarenakan keadaan geografis dan topografisnya yang menyebabkan terbentuknya wilayah-wilayah yang terpisah satu dari lainnya.

Keanekaragaman budaya itu dari satu sisi adalah kekayaan, tetapi dari sisi lain adalah kerawanan. Sebagai kekayaan, keanekaragaman budaya dapat dibandingkan dengan keanekaragaman nabati. Keanekaragaman itu dapat menjadi sumber pengembangan budaya hibrida yang kaya dan tangguh, melalui penyuburan silang budaya (*cultural cross fertilization*). Berbagai bentuk penyuburan silang budaya telah terjadi, tetapi umumnya merupakan hal-hal “kebetulan”, sebagai akibat sampingan interaksi perdagangan regional yang ditunjang oleh kekuasaan politik. Peranan kekuasaan-

kekuasaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh penting sekali dalam proses penyuburan silang budaya Asia Tenggara. Pengaruh penyuburan silang itu dapat dikenali pada adanya unsur-unsur kosmopolit dan universal dalam banyak segi budaya umum kawasan Asia Tenggara.

Sebagai kerawanan, keanekaragaman budaya melemahkan kohesi antarsuku dan pulau. Karena itu Asia Tenggara selamanya rentan terhadap penaklukan dan penjajahan dari luar. Usaha penguatan kohesi beberapa bagian atau seluruh Nusantara melalui penyatuan dalam kekuasaan politik tunggal pernah beberapa kali terjadi, seperti oleh kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan Aceh, misalnya. Tetapi usaha-usaha itu menghasilkan suatu penyatuan wilayah yang tidak persis sama dengan wilayah Indonesia modern sekarang ini. Di satu sisi hasil penyatuan itu lebih kecil daripada Indonesia sekarang, karena tidak mencakup seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Di sisi lain, hasil penyatuan itu lebih besar daripada wilayah Indonesia sekarang ini, karena mencakup pula wilayah-wilayah di luar lingkungan Sabang-Merauke, seperti di Semenanjung Melayu, Kalimantan Utara, Mindanao, bahkan sampai Formosa dan Madagaskar.

Penyatuan wilayah Asia Tenggara yang kini dikenal sebagai “Indonesia” adalah kelanjutan dari wilayah kekuasaan penjajahan Belanda. Wilayah itu dikenal sebagai “Hindia Belanda” atau “Hindia Timur Belanda” (*Dutch East Indies*). Tetapi “Indonesia” sebagai bangsa tidaklah dibentuk oleh Belanda atau pemerintah penjajah, melainkan justru oleh semangat perlawanan terhadap penjajahan itu. Inilah bagian dari hakikat kebangsaan kita yang agaknya perlu dipahami secara lebih baik, lebih jujur, dan lebih seimbang.

Ada beberapa hal amat penting yang harus ditelaah ulang mengenai proses penjajahan Asia Tenggara oleh bangsa-bangsa Eropa. Sudah sejak berabad-abad sebelumnya, kawasan Asia Tenggara menjadi sumber pengadaan komoditi dagang yang amat diperlukan masyarakat dunia. Rempah-rempah termasuk

yang paling dikenal sebagai produk amat penting saat itu, di samping bahan-bahan wewangian seperti cendana dan gaharu, juga getah “kapur” dari Aceh, khususnya dari Barus (“kapur Barus”). Disebabkan oleh daya tarik produk-produk eksotik itu, kawasan Asia Tenggara sudah dikenal sejak lama oleh para saudagar dari Anak-Benua India dan Timur Tengah. Dari kawasan Anak-Benua datang para saudagar yang membawa agama-agama India, yaitu Hindu dan Budha. Pengaruh kekuasaan politik yang mereka tanamkan mendorong berkembangnya budaya bercorak India, dengan peran utama bahasa Sanskerta. Ciri budaya keindiaan kawasan ini merupakan alasan untuk mengenalinya sebagai kawasan India, sehingga dalam khazanah antropologi disebut “Indonesia”, yakni “Kepulauan India”, sebanding dengan daratan tenggara Asia yang disebut “Indocina”, yakni “Cina India”.

Dengan perangkat budaya Sanskerta, untuk jangka waktu lama Asia Tenggara merupakan wilayah budaya besar yang berhubungan satu dengan lainnya, untuk kemudian bersambungan dengan budaya Anak-Benua. Pola budaya ini lebih memperkuat kecenderungan yang sudah ada, yaitu penyatuan sebagian besar wilayah Asia Tenggara ke dalam kawasan perdagangan regional yang berpusat di Anak-Benua (Subkontinen) India.

Budaya *Hemispheric* Islam

Pada saat puncak-puncak perkembangan peradaban Islam, kawasan Asia Tenggara menyatu dalam pola budaya umum yang meliputi hampir seluruh belahan bumi timur sejak dari wilayah-wilayah Afrika dan Eropa pada tepi Lautan Atlantik sampai ke wilayah Zaitun (sekarang Guangzhou) di daratan Cina pada tepi Lautan Teduh. Dengan begitu terbentuk pola dasar sebuah budaya umum berdimensi *hemispheric*, artinya, meliputi seluruh belahan bumi (yakni, belahan bumi “timur”, karena daratan Amerika sebagai belahan bumi “barat” belum “diketemukan”), suatu dimensi yang

saat itu setara dengan dimensi “global” sekarang ini. Pola budaya *hemispheric* itu menghasilkan terbentuknya lingkungan yang memberi kemudahan bagi penyebaran dan peneguhan agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Peranan penting para pedagang dari Anak Benua tetap berlanjut dan dominan, namun kali ini mereka kebanyakan tidak lagi beragama Budha atau Hindu, melainkan Islam. Mereka menganut pola budaya Perso-Arab, yang kemudian sedikit-banyak menggeser pola budaya Sanskerta. Dalam perkembangan lebih lanjut pola budaya Perso-Arab digantikan oleh pola budaya yang bercorak kearaban dengan dominasi bahasa Arab, tanpa banyak unsur bahasa Persi. Pinjaman kata-kata Arab dalam bahasa-bahasa Asia Tenggara tidak lagi lewat bahasa Persi, tetapi langsung dari bahasa Arab.

Pada saat-saat awal Asia Tenggara tergabung dalam pola budaya *hemispheric* itu, pusat-pusat kekuasaan masih terbagi antara yang Islam seperti kesultanan Aceh dan yang Hindu seperti Kerajaan Majapahit. Tetapi pada waktu bersamaan pusat-pusat kegiatan perdagangan di berbagai kota (Persi: *bandar*) di tepi pantai atau sungai besar boleh dikata semuanya berada di tangan para saudagar Muslim. Dari kalangan mereka, banyak saudagar besar yang sekaligus bertindak sebagai penguasa (“wali”) pemerintahan bandar-bandar itu. Suasana otonom pemerintahan kota pantai itu diperkuat dengan berdirinya gilda-gilda perdagangan berbentuk lingkungan bangunan dengan tempat-tempat penginapan para saudagar dari luar wilayah. (Tempat penginapan itu disebut “pondok”, dari perkataan Arab “*fundûq*” yang berasal dari perkataan Yunani “*pandokheyon*” atau “*pandokeyon*” yang berarti penginapan — dalam terminologi Arab modern, “*fundûq*” berarti hotel).

Para saudagar itu, dengan kearifan kosmopolitan mereka, juga berperan sebagai tempat meminta nasehat bagi masyarakat luas, gilda-gilda dagang mereka menjadi tujuan para penuntut kearifan, dan pondok-pondok mereka menjadi tempat menginap para penuntut yang datang dari jauh. Berangsur-angsur “pondok” yang semula merupakan penginapan para saudagar berkembang menjadi

“pondok” penginapan para penuntut ilmu dan kearifan, sama dengan gejala yang umum didapatkan di seluruh dunia Islam saat itu, dengan nama-nama yang berbeda seperti *zâwiyah*, *ribâth*, *khâniqah*, dan *tekke*. Semua itu sekaligus merupakan tempat pertemuan kaum sufi, yang dalam banyak hal mereka itu juga kaum pedagang. Konsep “pondok” kemudian terpadukan dengan konsep “padepokan”, dan terbentuklah “pondok” sebagai institusi pendidikan dan kajian yang khas Indonesia seperti kita saksikan sekarang.

Para pencari kearifan itu, sebagai kelaziman mereka yang menuntut ilmu, adalah orang-orang yang mengembangkan kecakapan tulis-baca, karena itu disebut kaum *shastrî*. Oleh karena kedudukan mereka sebagai murid seorang guru arif-bijaksana yang disebut *kiyahi*, mereka disebut juga kaum *cantrik*, orang yang berguru atau magang. Konon, salah satu dari dua pengertian itu menjadi asal sebutan “santri”, dan tempat mereka belajar atau berkumpul disebut secara lengkap “pondok pesantren”, yaitu penginapan dan tempat kaum santri berguru kepada seorang *kiyahi*.

Ketika kawasan Asia Tenggara mulai bersentuhan dengan peradaban Islam, daratan Cina sudah sejak berabad-abad sebelumnya dikenal kaum Muslimin Arab dan Persia. Sejarah peradaban Cina-Arab telah berlangsung sejak lebih dari 1.000 tahun sebelum Islam. Terdapat petunjuk bahwa daratan Cina telah pula diperkenalkan kepada Islam sejak masa hidup Nabi Muhammad *saw*. *Encyclopaedia of Islam* (Leiden, 1999) menyebutkan adanya kawasan hunian kaum Muslimin Arab dan Persi di kawasan timur daratan Cina, dengan jumlah mereka yang mencapai angka ratusan ribu orang. Mereka mendirikan dan hidup di kota Zaitun, kini Guangzhou. Dilaporkan oleh Ibn Batutah, seorang pengembara dunia dari Afrika Utara, bahwa Zaitun memiliki pelabuhan amat besar, tempat berlabuh ratusan kapal jung (*junk*) besar dan kapal jung kecil yang tidak terhitung banyaknya. Kaum Muslim hidup bebas dengan pranata-pranata keagamaan Islam seperti kantor *qâdli* (pengadilan), *Syaykh al-Islâm* (“Sesepuh Islam”, setingkat dengan Mufti). Daerah itu juga merupakan kawasan kaum Sufi dan para saudagar.

Islam di Cina memiliki sejarah yang sangat panjang, yaitu sepanjang sejarah Islam itu sendiri. Di kota Guangzhou terdapat makam Sa'ad ibn Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi yang datang dan wafat di kota Islam itu, dan yang mendirikan sebuah masjid, yaitu masjid Huai Sheng. Sa'ad ibn Abi Waqqas dimakamkan di bawah sebuah bangunan berkubah yang telah berumur lebih dari 1300 tahun.

Di Guangzhou juga ada sebuah masjid, didirikan pada tahun 1465, di zaman Dinasti Ming, yaitu masjid Hao Pan. Mengikuti tradisi dunia Islam pada zaman-zaman kejayaannya, di masjid Hao Pan pernah berdiri sebuah universitas. Revolusi budaya RRC telah mengubah masjid ini menjadi pabrik, dan setelah dikembalikan sebagai masjid dilengkapi dengan sebuah pusat pengajaran bahasa Arab.

Diduga dari kawasan Zaitun atau Guangzhou itulah bertolak secara bergelombang imigran Cina Muslim ke Jawa. Dari kota Nanjing (Nanking) pada sungai Yang Tse yang tidak jauh dari Guangzhou bertolak ekspedisi armada kelautan Cina pimpinan Ma San Pao, lebih dikenal dengan nama Cheng Ho, seorang admiral Muslim, yang karena jabatannya juga dikenal sebagai San Pao Kong. Ia meninggalkan sebuah bangunan masjid atas namanya, San Pao Kong, di Semarang (kini digunakan sebagai klenteng). Mereka datang sambil menyiarkan agama Islam di Jawa, dengan sisa-sisa bekas hunian mereka sepanjang sungai-sungai Brantas dan Solo. Dengan begitu mereka ikut memperkuat gilda-gilda perdagangan kaum Muslim yang telah ada di bandar-bandar, dan memiliki peran dalam mengembangkan pranata pondok pesantren.

Permulaan Imperialisme Eropa

Dalam suasana Asia Tenggara sebagai kawasan peradaban dan perdagangan *hemispheric* Islam itulah datang bangsa-bangsa Eropa. Mereka didahului oleh Spanyol dan Portugis dari semenanjung Iberia di Eropa Barat Daya. Semenanjung itu secara keseluruhan

oleh orang Arab disebut Andalusia. Selama lima sampai tujuh abad kaum Muslim memerintah Andalusia danembangunnya menjadi pusat peradaban dunia, khususnya untuk wilayah barat (*al-Maghrib*). Karena berbagai sebab, terutama percekocokan antara mereka sendiri, kaum Muslim akhirnya terkalahkan oleh gerakan *reconquista* (penaklukan kembali) orang-orang Iberia, dan berakhirilah zaman gemilang Andalusia. Bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis yang baru selesai dengan *reconquista* itu kemudian mengembara ke seluruh muka bumi. Tujuan mereka ialah menemukan jalan sendiri langsung ke India dan Timur Jauh (khususnya Cina dan Maluku), tanpa tergantung kepada para pedagang Muslim Arab, Persia, India, dan Cina. Dalam pengembaraan itu, seperti kita ketahui bersama, mereka “menemukan” Amerika dan menaklukkan banyak bangsa lain, termasuk beberapa bangsa di Asia Tenggara.

Dalam pandangan kaum Muslim (dan Yahudi) Iberia, istilah *reconquista* tidak tepat, sebab masuknya Islam pada tahun 711 ke semenanjung itu tidak bertujuan penaklukan (Arab: *qahr*) melainkan pembebasan (Arab: *fath*), yaitu pembebasan penduduk dari pemaksaan agama oleh penguasa, yang dimulai oleh Raja Recared pada abad sebelumnya. Tetapi dalam pandangan mereka yang sejiwa dengan Raja Recared, *reconquista* itu benar, karena memang bertujuan menaklukkan kembali penduduk Iberia dan memaksakan agama raja penguasa kepada mereka, dengan ancaman menerima atau mati dibunuh. Praktik inkuisisi (*inquisition*) atau pemeriksaan paham keagamaan pribadi, menurut hukum *inquisitio haereticae pravitatis* ciptaan Paus Gregorius IX yang terkenal menjadi sumber kekejaman mengerikan itu berkembang dengan semangat *reconquista* Spanyol. Semangat itu kemudian dibawa dan disebarkan oleh bangsa-bangsa Spanyol dan Portugis ke mana pun mereka mengembara. Kaum *reconquistadores* (penakluk) dari Iberia itu di mana pun juga memandang kaum Muslim yang mereka jumpai sebagai musuh yang harus diperlakukan dengan semangat *reconquista*. Rasa permusuhan sengit itu melatarbelakangi penggunaan sebutan “Moro” (*Moors*) yang tidak relevan untuk

kaum Muslim Mindanao, sebutan yang mereka gunakan untuk kaum Muslim Iberia yang dengan gemas mereka binasakan.

Untuk dapat benar-benar menangkap semangat perlawanan masyarakat Asia Tenggara terhadap orang-orang Barat yang mulai berdatangan itu, suasana sengit dan bermusuhan kaum *reconquistadores* Spanyol dan Portugis tersebut harus dimengerti. Keserakahan orang-orang Spanyol dan Portugis yang merampok harta kekayaan bangsa-bangsa asli (“Indian”) Amerika Selatan juga terjadi terhadap bangsa-bangsa Asia Tenggara. Mereka hanya terhambat oleh perlawanan sengit dari masyarakat yang sudah berpengalaman dalam pergaulan internasional kosmopolit dalam lingkungan peradaban *hemispheric* Islam yang sudah mapan.

Tetapi memang pada masa-masa itu peradaban Islam sudah mulai melemah, dan perlahan-lahan dunia Islam kembali menjadi sekumpulan bangsa-bangsa terkebelakang. Maka akhirnya Malaka, pusat perdagangan dan peradaban Islam Asia Tenggara, pada tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa itu terjadi 400 tahun setelah wafat Imam al-Ghazali, atau 800 tahun setelah Thariq ibn Ziyad membebaskan Iberia dan Muhammad ibn Qasim membebaskan lembah sungai Indus. Karena itu, kejatuhan Malaka merupakan peristiwa yang amat simbolik bagi perubahan drastis sejarah umat manusia. Yaitu, titik permulaan kekalahan seluruh dunia Islam dan kemenangan bangsa-bangsa Eropa, khususnya Eropa Barat (Eropa Timur, terutama Balkan, saat itu masih dikuasai oleh Kerajaan Islam Turki Usmani sampai sekitar 500 tahun kemudian, yaitu awal abad ke-20, setelah terjadi Balkanisasi atau pemecahbelahan Balkan menjadi negara-negara kecil yang saling bermusuhan).

Suatu ironi besar bagi dunia Islam, bahwa bangsa-bangsa Eropa Barat itu akhirnya mampu mengungguli bangsa-bangsa Muslim setelah mereka berusaha selama lima-enam abad, karena mereka mengadopsi ilmu pengetahuan Islam. Bahkan pandangan hidup Islam yang membuka alam semesta sebagai objek observasi dengan sikap yang bebas dari kecenderungan penyucian (sakralisasi) yang mitologisasi, juga mereka ambil dengan penuh minat (lihat

contoh penuturannya dalam novel sejarah, *The Name of the Rose* oleh Umberto Eco, misalnya). Demikian pula konsep-konsep Islam tentang manusia yang bersemangat egilitarianisme, partisipasi dan keterbukaan atas dasar kebebasan manusia untuk memilih sendiri apakah mau menjadi makhluk setinggi-tingginya atau serendah-rendahnya-seperti dijadikan dasar filsafat kemanusiaan *Renaissance* oleh Pico della Mirandola-juga mereka peluk seerat-eratnya. Semua itu terasa amat ironis bagi kaum Muslim karena pada saat-saat itu mereka justru mulai banyak menganut pandangan dunia penuh takhayul, banyak serba-menyucikan alam, dengan pandangan kemanusiaan feodalistik dalam pola pemerintahan despotik, otokratik, dan totaliter. Despotisme itu tercermin dalam sebutan para penguasa Islam sebagai *Khalīfat-u 'l-Lâh fi 'l-Ardl* (Khalifah Allah di Bumi)-padahal semestinya adalah tidak lebih daripada Khalifah Rasul (*Khalīfat-u 'l-Rasûl*) dalam urusan duniawi. Bahkan ada yang mulai menyebut diri mereka *Zhill-u 'l-Lâh fi 'l-Ardl* (Bayangan Tuhan di Bumi) serta gelar-gelar serupa yang bersemangat kekuasaan mutlak *heraldic*, bersifat penampilan pengagungan diri, dan *megalomaniac*, penuh fantasi kekuasaan. Memang benar bahwa Nabi *cum* Raja Dawud *as* adalah Khalifah Allah di bumi, tetapi perlu diingat bahwa yang mengangkatnya adalah Allah sendiri, dengan perintah agar Dawud *as* menjalankan pemerintahan antara manusia dengan adil. Demikian pula, terdapat isyarat dalam sebuah hadis bahwa sultan adalah bayangan Allah di bumi, tetapi dalam pengertian bahwa ia menjadi tempat kaum lemah mencari perlindungan, dan bahwa ia selamanya bersandar kepada Allah sebagai sumber cahaya, sebagai hamba Allah, makhluk yang senantiasa memerlukan pertolongan-Nya, dan tidak akan pernah sekejap mata pun mampu berbuat tanpa taufik dan hidayah Allah (*Divine providence*). Jadi kedudukan penguasa atau sultan sebagai “bayangan Tuhan di bumi” tidaklah sama, bahkan bertentangan dengan konsep “dewa-raja” (*devaraj*) yang merupakan salah satu sumber despotisme seperti kebanyakan terlihat dalam kenyataan. Pengertian sultan sebagai “bayangan Tuhan di bumi”

justru menegaskan tanggung jawab pribadi seorang penguasa kepada Tuhan untuk menjalankan pemerintahan yang benar, adil, terbuka, dan memandang semua orang sama dalam martabat, hak, dan kewajiban. Telah dikemukakan bahwa despotisme adalah penyimpangan fatal dari konsep *madīnah*. Contoh despotisme ialah pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlevi dari Iran yang telah tumbang, yang memandang dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad *saw* dan Raja Darius sekaligus, dan yang memahkotai dirinya di Persepolis, ibukota Persia kuna, dengan gelar *Shâhinshâh Aryamehr* (Raja-diraja, Cahaya Arya), suatu bentuk penyimpangan yang sempurna dari wawasan *madīnah*.

Perjuangan Melawan Kaum Imperialis

Dari gambaran sekilas tentang intrusi dan ekspansi kekuasaan bangsa-bangsa Eropa Barat di atas dapat dimengerti bahwa yang paling sengit melakukan perlawanan kepada orang-orang Eropa ialah para penguasa dunia perdagangan Nusantara yang berpangkal terutama di bandar-bandar atau kota-kota pantai. Dalam bidang sosial-politik mereka dipimpin para sultan, dan dalam bidang sosial-keagamaan mereka dipimpin para ulama. Karena itu, pada umumnya pahlawan nasional kita dari masa-masa tersebut adalah para sultan dan ulama, di samping adanya pahlawan-pahlawan dari latar belakang sosial-budaya dan keagamaan yang lain. Kesengitan terhadap kaum penjajah dari Eropa itu mendorong para pemimpin rakyat untuk melakukan politik boikot dan menerapkan kebijakan non-koperasi total di semua bidang kehidupan, khususnya di bidang sosial-budaya dan pendidikan. Sekalipun para penjajah itu terdiri dari bangsa-bangsa Eropa yang berlainan dan silih-berganti, namun semangat perlawanan masyarakat-masyarakat Asia Tenggara tetap teguh, khususnya dalam politik non-koperasi totalnya. Hal ini terutama benar berkenaan dengan para ulama, yang secara

genealogis atau ideologis merupakan pewaris langsung para penguasa bandar-bandar dengan masyarakat perdagangannya.

Kekerasan kebijakan perlawanan budaya itu membuahkan akibat bagaikan pisau bermata dua: di satu pihak berhasil memelihara tingkat tinggi kepahlawanan bangsa yang tidak kenal menyerah, di lain pihak meminggirkan mereka dari arus utama interaksi sosial-budaya dan pendidikan yang semakin diungguli oleh pola-pola interaksi modern. Mereka menjadi masyarakat yang teringkari dari kemungkinan memperoleh berbagai faedah besar dari partisipasi dan pelibatan diri dalam interaksi modern itu. Marginalisasi dan deprivasi ulama dan masyarakat pondok pesantren dalam bidang pendidikan merupakan salah satu sumber utama kesulitan sosial-politik kelompok pewaris semangat para wali bandar-bandar itu, justru setelah kemerdekaan bangsa yang mereka dambakan tercapai. Dalam perkembangan lebih lanjut, kesulitan mereka juga menjadi kesulitan seluruh bangsa dan negara. Karena itu, dengan sedikit membuat loncatan kepada kesimpulan, persoalan bangsa dan negara tidak akan selesai jika persoalan masyarakat lingkungan pondok pesantren tidak terselesaikan. Mengingkari mereka akan berarti mengingkari kenyataan amat asasi tentang masyarakat Indonesia. Mereka adalah “*the corner stone of the house neglected by the builders*”, “batu sudut rumah (negara) yang diabaikan oleh para pembangun rumah itu”. [❖]

LAHIRNYA NASIONALISME MODERN INDONESIA

Perlawanan berabad-abad terhadap bangsa-bangsa Eropa Barat atas dasar pertimbangan keagamaan dan dorongan kepentingan perdagangan itu terjadi secara sporadis, terbatas hanya dalam lingkungan wilayah-wilayah tertentu, belum meliputi seluruh wilayah “Indonesia”. Perlawanan yang didorong oleh keinginan menjadi bangsa yang merdeka dan meliputi seluruh wilayah “dari Sabang sampai Merauke” baru bersemi bibit-bibitnya setelah pemerintahan kolonial Belanda, atas desakan kaum sosialis, humanis dan reformis liberal di Eropa, memperkenalkan apa yang dinamakan “Politik Etis” (*Etische Politiek*) kepada penduduk jajahan. Dengan politik etis itu, rencana pendidikan modern (Belanda) mulai dirancang secara menyeluruh dan diterapkan di hampir semua wilayah. Untuk kelengkapan usaha memahami hakikat Indonesia kita, dirasa cukup penting mengetahui lebih jauh sistem pendidikan kolonial itu dan dampaknya bagi pertumbuhan bangsa. Berikut ini sebuah penjelasan singkat tentang sistem pendidikan kolonial itu dan beberapa implikasinya bagi rakyat Indonesia.

Pendidikan Kolonial Belanda

Struktur pendidikan itu sendiri dan sistemnya masih mengikuti konsep stratifikasi kolonial penduduk tanah jajahan. Stratifikasi itu mengenal jenjang tinggi-rendah pembagian warga masyarakat,

sejak dari yang paling atas yang terdiri dari penduduk Eropa, disusul “Timur Asing” (terutama Arab dan Cina), kemudian aristokrat pribumi (“priyayi”) dan akhirnya rakyat umum. Patut diperhatikan bahwa ke dalam kategori “rakyat umum” itulah para warga masyarakat kalangan pondok pesantren secara keseluruhan tercakup.

Pada tingkat pendidikan dasar, untuk golongan Eropa tersedia ELS (*Europese Lagere School*-Sekolah Dasar Eropa). Untuk golongan Timur Asing tersedia HAS (*Hollands-Arabische School*-Sekolah Belanda Arab) dan HCS (*Hollands-Chinesche School*-Sekolah Belanda Cina). Untuk golongan priyayi atau aristokrat pribumi tersedia HIS (*Hollands-Inlandse School*-Sekolah Belanda Pribumi). Terakhir, untuk rakyat umum tersedia *Volkschool*, Sekolah Rakyat, di tingkat desa dengan program belajar selama tiga tahun, dan *Vervolgschool*, Sekolah Rakyat Lanjutan, di tingkat kecamatan dengan program belajar selama lima tahun.

Sekolah-sekolah tingkat lanjutan pertama dan atas juga disediakan, tetapi terbuka hanya untuk yang terpilih dari kalangan lulusan jenis-jenis sekolah elite, yaitu ELS, HAS, HCS, dan HIS saja. Bagi lulusan jenis sekolah rakyat, semua pintu pendidikan lanjutan tertutup. Pemerintah kolonial menyediakan pendidikan dasar umum lanjutan, yaitu MULO (*Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs*). Sekolah lanjutan atas terbagi antara yang masih memberikan pendidikan umum, AMS (*Algemene Middelbare School*), dan yang memberikan pendidikan khusus dalam bidang keahlian tertentu. Paling utama di antara pendidikan keahlian itu ialah HBS (*Hogere Burgelijke School*) dan OSVIA (*Opleiding School voor Inlandse Ambtenaren*), yang menghasilkan pegawai pemerintahan dalam negeri (*Binnenlands Bestuur*). Juga ada sekolah menengah atas bidang pertanian, yaitu MLS (*Middelbare Landbouw School*) di Bogor, yang berkembang dan meningkat menjadi IPB. Selain itu ada sekolah-sekolah yang lebih khusus seperti *Schakel School*, sekolah peralihan dari lulusan sekolah rakyat untuk dapat meningkat ke sekolah yang ada di atasnya. Juga disediakan sekolah-sekolah

pendidikan guru seperti HIK (*Hollands-Inlandse Kweekschool*) dan suatu jenis sekolah yang disebut *Normaal School*.

Pada tingkat perguruan tinggi, pemerintahan kolonial memperkenalkan beberapa jenis pendidikan keahlian, seperti bidang teknologi (khususnya teknologi pengairan guna menunjang industri gula di Jawa), yaitu THS (*Technise Hoge School*-kini ITB) di Bandung; bidang kedokteran, yaitu GHS (*Geneeskundige Hoge School*-kini FK-UI) di Batavia (Jakarta); dan bidang hukum, ekonomi dan ilmu-ilmu sosial, yaitu RHS (*Rechts Hoge School*-Sekolah Tinggi Hukum, yang kini dipecah-pecah menjadi fakultas-fakultas hukum, ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan politik dalam lingkungan UI) di Weltevreden, Jakarta Pusat sekarang.

Beberapa jenis sekolah keahlian menengah-tinggi juga disediakan, yaitu pendidikan “dokter Jawa” pada STOVIA (*School tot Opleiding voor Indlandse Artsen*-Sekolah Persiapan Dokter Pribumi atau “dokter Jawa”) di Jakarta, dan NIAS (*Nederlands Indise Artsen School*-Sekolah Dokter Hindia Belanda, kini FK Unair) di Surabaya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu kenyataan amat penting ialah bahwa pendidikan menengah dan tinggi itu semua dapat dimasuki hanya oleh anak-anak Eropa, Timur Asing, dan Pribumi Priyayi. Sedangkan untuk rakyat hanya tersedia Sekolah Rakyat. Lebih dari itu, para anggota masyarakat lingkungan pondok pesantren pimpinan para ulama, bukan saja hak mereka diingkari, bahkan mereka sendiri, sebagaimana telah dikemukakan di atas, sengaja memilih untuk menentang dan memboikot pendidikan Belanda itu semua, yang mereka nyatakan sebagai barang haram. Telah pula disinggung di depan, sikap heroisme non-koperatif total dari pihak para ulama dan masyarakat pondok pesantren, selain memberi kekuatan besar sekali kepada daya tahan perjuangan melawan penjajahan, juga membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi para ulama dan masyarakatnya sendiri, justru di masa kemerdekaan. Perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial itu mendorong para ulama untuk mendirikan lebih

banyak pondok pesantren. Kompleks Jombang-Kediri di Jawa Timur merupakan tempat konsentrasi terbesar pondok pesantren di Indonesia. Pondok pesantren itu kebanyakan didirikan pada sekitar awal abad yang lalu, saat pemerintah penjajah mulai memperkenalkan sistem pendidikan kolonialnya.

Bibit Nasionalisme Modern Indonesia

Pengertian “nasionalisme” di sini memang harus diberi kualifikasi “modern”, bahkan untuk Indonesia diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab nasionalisme “kuna”, seperti banyak dikhawatirkan orang, adalah ekstensi paham kesukuan atau tribalisme yang sempit dan sewenang-wenang terhadap suku lain. Sebaliknya, nasionalisme modern adalah paham tentang hak bagi suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan, karena itu, anti-imperialisme, jadi konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nasionalisme modern akan melahirkan kestabilan dan akan berfungsi sebagai kekuatan yang menyatukan suku-suku dan kelompok-kelompok etnis yang terpisah-pisah. Karena itu nasionalisme merupakan unsur esensial bagi pembangunan bangsa (*nation building*) untuk Indonesia, sebuah bangsa dan negara yang fragmentasi etnis dan kesukuan ataupun unsur-unsur perbedaan sosial-kultural selalu merupakan ancaman bagi stabilitas dan pembangunan ekonomi.

Suatu “akibat tak disengaja” (*unintended consequence*) pendidikan muncul dan berkembang dengan dampak yang jauh lebih besar daripada tujuan semula pendidikan itu. Sekalipun didirikan dengan tujuan semula untuk mendidik tenaga medis murah dari kalangan penduduk pribumi (“dokter Jawa”)-antara lain sebagai pendamping dokter-dokter Belanda sendiri dalam mengatasi persoalan kesehatan di tanah jajahannya-tapi justru dari STOVIA dan NIAS muncul bibit-bibit nasionalisme modern di kalangan masyarakat Hindia Belanda, berkat kepeloporan Dokter Wahidin

Sudirohusodo dan Dokter Sutomo. Bibit-bibit dalam persemaian STOVIA dan NIAS itu kemudian bersemi dan tumbuh subur. Mula-mula sebagai dorongan lahirnya gerakan kultural priyayi Jawa Budi Utomo, kemudian tumbuh sebagai dorongan berkembangnya perkumpulan kepemudaan dalam batas kesukuan atau kepulauan dan kedaerahan seperti *Jong Java*, *Jong Sumatera*, *Jong Ambon*, *Jong Celebes*, saat kata pengenal “Indonesia” yang lebih menyeluruh belum digunakan.

Dalam gabungannya dengan kesadaran umum masyarakat akan kedudukan mereka sebagai golongan yang tertindas dan tergecet oleh kolonialisme Belanda, semangat nasionalisme modern itu membangkitkan gerakan Sarekat Dagang Indonesia (SDI) oleh Haji Samanhudi dengan cakupan pendukung yang tidak lagi terbatas oleh lingkungan kedaerahan atau kesukuan, tetapi meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam dunia kepemudaan pun tumbuh gerakan yang *platform* komitmennya lebih tinggi dan lebih luas daripada kesukuan atau kedaerahan, seperti JIB (*Jong Islamieten Bond*) dan anak organisasinya, SISC (*Studenten Islam Studies Club*), yang kelak melahirkan banyak kelompok intelektual Masyumi.

Sekitar saat-saat itulah menguat keinginan menggunakan suatu nama pengenal bagi agregat kebangsaan yang sedang tumbuh. Maka istilah “Indonesia” yang sudah cukup lama tersimpan dalam khazanah antropologi (James Richardson Logan dari Inggris, 1850; dan Adolf Bastian dari Jerman, 1886) mulai sering muncul dalam wacana kaum nasionalis. Dalam makna politisnya, para pelajar dan mahasiswa di Negeri Belanda yang berasal dari kawasan Nusantara pada tahun 1917 menggunakan nama “Indonesia” untuk organisasi mereka, *Indonesisch Verbond van Studerenden*. Ketika diasingkan ke Negeri Belanda, Ki Hajar Dewantara pada 1918 di Den Haag mendirikan *Indonesisch Persbureau* (Kantor Berita Indonesia). Nama “Indonesia” untuk bangsa muda yang sedang dibangun dengan penuh semangat itu digunakan Bung Hatta di Negeri Belanda dalam pleidooinya, “Indonesia Merdeka” (*Indonesie Vrij*), Maret 1928. Kemudian dikukuhkan dalam salah satu peristiwa amat

menentukan bagi sejarah bangsa kita, yaitu Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Dikobarkan lagi oleh Bung Karno dalam pidato “Indonesia Menggugat” (*Indonesie Klag Aan*), 1930.

Penyebutan nama “dagang” dalam gerakan Sarekat Dagang Islam rintisan saudagar Solo Haji Samanhudi menunjukkan adanya garis kelanjutan historis, kultural, dan ekonomis dengan keadaan umum Asia Tenggara sebagai bagian dari budaya *hemispheric* Islam sebelum masa jajahan Barat. Tetapi ketika SDI mengembangkan dirinya menjadi SI (Sarekat Islam) dan meninggalkan agenda perjuangan yang terbatas hanya kepada bidang perdagangan, gerakan Haji Samanhudi secara tidak terhindarkan bersentuhan dengan bibit-bibit gagasan nasionalisme modern rintisan kaum pribumi terdidik seperti Wahidin dan Sutomo. Maka ketika berkembang pesat dengan basis pergerakannya di Surabaya di bawah pimpinan Haji Omar Said Tjokroaminoto, SI benar-benar menjadi tempat persemaian gerakan nasionalis radikal yang menjadikan kemerdekaan bangsa sebagai tujuan perjuangan. Meskipun dinamika itu kelak berimbas negatif kepada keorganisasian formal SI yang membuatnya pecah menjadi “SI Putih” dan “SI Merah”, namun gelora nasionalisme radikal yang ditebarkan di seluruh medan pergerakan bangsa berkembang dinamis bergulung-gulung menjadi energi politik yang tidak terlawan. Sebuah bangsa baru kemudian benar-benar lahir ke dunia, menunggu pertumbuhannya mencapai kedewasaan penuh melalui kemerdekaan dari penjajahan. Sebuah bangsa yang tidak mendasarkan eksistensinya kepada rasialisme, etnisisme, sektarianisme dan lain-lain pertimbangan eksklusif, tetapi kepada cita-cita bersama menciptakan maslahat umum, kesejahteraan bagi semua.

Peranan Bahasa Melayu-Indonesia

Telah dikemukakan bahwa pada mulanya kelahiran dan pertumbuhan Indonesia sebagai bangsa yang utuh menghadapi tantangan

kenyataan banyaknya suku, bahasa, dan pola budaya yang sangat beraneka ragam yang terpecah di seluruh pelosok wilayah. Tantangan ini dijawab dengan mengangkat bahasa Melayu logat Riau Kepulauan (dengan Pulau Penyengat sebagai pusat bahasa dan budayanya) untuk menjadi bahasa persatuan. Bahasa Melayu adalah *lingua franca* Asia Tenggara, kelanjutan prototipenya di zaman Sriwijaya dengan dukungan kekuasaan bahari (maritim). Bahasa Melayu kemudian ditingkatkan lebih tinggi daripada sekadar *lingua franca* dan dikembangkan menjadi bahasa buku untuk agama, sastra, dan kebudayaan oleh para ulama dan cendekiawan Kesultanan Aceh dengan menggunakan huruf Arab (yang kemudian disebut “huruf Jawi”-sesuai dengan kebiasaan penduduk Tanah Suci yang memandang keseluruhan Asia Tenggara sebagai “Jawa” dan penduduknya orang “Jawi”). Rintisan Aceh menyebar ke seluruh Asia Tenggara, dan dalam perpaduannya dengan kegiatan perdagangan, bahasa Melayu menjadi bahasa dengan penutur yang memiliki mobilitas tinggi. Karena itu bahasa Melayu menjadi berwatak kosmopolit, dengan ciri-ciri perkembangan yang dinamis, bebas, terbukti dan egaliter.

Kemajemukan Budaya Nusantara

Kualitas-kualitas itu membuat bahasa Melayu sangat sejalan dengan wawasan negara-bangsa modern (*modern nation-state*). Dengan penggarapan lebih lanjut oleh para cendekiawan modern dari Sumatera, khususnya Sumatera Barat, bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa Indonesia modern sekarang ini. Dengan bahasa Melayu sebagai sahamnya, meminjam jargon dalam dunia komputer, Sumatera dan Luar Jawa pada umumnya telah menyediakan “perangkat lunak” (*software*) bagi hakikat Keindonesiaan. Sedangkan Pulau Jawa, yang selalu berperan sebagai pusat kekuasaan dalam ukuran besar dan luas, menyediakan “perangkat keras” (*hardware*) baginya. Pembagian itu sejalan dengan pola budaya Indonesia yang secara garis besar

mengenal adanya dua orientasi: yang lebih egaliter pada pola budaya pesisir (*coastal culture*) dan yang lebih hierarkis pada pola budaya pedalaman (*inland culture*). Secara umum dapat dikatakan bahwa kedua pola budaya besar Indonesia itu tergambarkan dalam falsafah dan kosmologi arsitektur dua momentum kuno Indonesia paling agung: Borobudur yang lebih melebar ke segala penjuru, sesuai dengan jiwa agama Budha yang meluas dan egaliter, di satu pihak, dan Roro Jonggrang (Prambanan) yang vertikal dan menjulang, sesuai dengan sifat agama Hindu yang mendalam dan bertingkat, di pihak lain. Budhisme adalah falsafah keagamaan kerajaan Luar Jawa Sriwijaya yang bersemangat bahari (kelautan, maritim), dan Hinduisme adalah falsafah keagamaan kerajaan Jawa Majapahit yang kekuatannya banyak bertumpu pada kesuburan tanah-tanah pertanian pedalaman Jawa yang sangat produktif.

Tetapi karena Majapahit berdiri dengan latar belakang kejayaan Budhisme (Borobudur) dan Hinduisme (Roro Jonggrang) sekaligus, di samping juga mengembangkan kekuatan dan kekuasaan bahari yang ekspansif, maka muncul ide oleh Empu Tantular, seorang filosof Majapahit, untuk mengusahakan rekonsiliasi antara berbagai aliran keagamaan yang ada, dalam semangat paham kemajemukan atau pluralisme atas dasar keyakinan tentang adanya kesatuan esensial di balik perbedaan formal. Semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu jua, sebab tidak ada jalan kebaktian atau kebaikan yang mendua tujuan (*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa*).

Walaupun begitu, perbedaan relatif tidak mungkin dihapuskan, dan kedua pola budaya pesisir dan pedalaman itu tetap mempengaruhi bangsa Indonesia secara keseluruhan, sekalipun sebagian besar warga masyarakat telah beralih ke agama Islam. Ketegangan dalam interaksi antara kedua pola budaya dengan perbedaan relatif itu telah menjadi salah satu sumber berbagai persoalan nasional Indonesia. Tetapi kedua-duanya saling melengkapi, dengan arah menuju konvergensi yang semakin kuat dan rapat. Hal itu terjadi lebih-lebih dengan peran Islam yang meliputi

seluruh “universum” Nusantara, dan kosmopolitanisme baru akibat penyatuan administratif pemerintahan kolonial yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Unsur-unsur budaya menyeluruh itu merupakan payung bersama untuk Jawa dan Luar Jawa, dan berperan sebagai pendorong terjadinya proses-proses konvergensi. Pada terjadinya konvergensi besar menuju ke arah titik-titik temu itulah terletak jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan ketangguhannya. [❖]

TENTANG “NEGARA-BANGSA” (“NATION-STATE”)

Para pendiri negara kita sejak dari semula menggagasi terbentuknya sebuah negara-bangsa atau *nation-state*. Meskipun dalam pandangan politik Eropa gagasan negara-bangsa itu merupakan hal baru sehingga secara lengkap sering disebut “negara-bangsa baru” atau “*modern nation-state*”, namun cikal bakal gagasannya, bahkan pelaksanaan penuhnya, telah ada dan pernah terjadi secara nyata dalam zaman-zaman sebelum zaman “modern” sekarang ini.

Kita semua seluruh warga bangsa Indonesia lebih-lebih kaum Muslim yang merupakan golongan terbesar, harus benar-benar memahami pengertian “negara-bangsa” atau *nation-state* itu secara benar. “Negara-bangsa” adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa. Pengertian “bangsa” atau “*nation*” itu dalam bahasa Arab sering diungkapkan dengan istilah *ummah* (*ummat-un*, umat), seperti “*United Nations*”, “Persatuan Bangsa-Bangsa”, yang terjemah Arabnya ialah “*al-Umam al-Muttahidah*”, “Umat-umat Bersatu”. Jadi “negara-bangsa” adalah negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Tujuan negara-bangsa ialah mewujudkan maslahat umum (dalam pandangan kenegaraan salaf disebut *al-mashlahah al-‘ammah* atau *al-mashlahah al-mursalah*, padanan pengertian *general welfare*), suatu konsep tentang kebaikan yang meliputi seluruh warga negara tanpa kecuali. Dari sudut pandang itu, negara-bangsa berbeda dengan negara kerajaan yang terbentuk tidak berdasarkan kontrak sosial

dan transaksi terbuka, tetapi karena kepeloporan seorang tokoh kuat yang dominan. Karena itu negara kerajaan berdiri demi kejayaan seorang raja dan dinastinya. Sedangkan negara-bangsa, berdasarkan kontrak sosial dalam pembentukannya, bukanlah negara dinastik. Dalam negara-bangsa, semua kebijakan pemerintah harus dibuat dengan sepenuhnya tunduk kepada maslahat umum.

Tentang Kontrak Sosial dan Konsep *Madīnah*

Pengertian “kontrak” itu tidaklah sama dengan “kontrak” kerja dalam sistem feodal dalam kerangka pembagian manusia secara hirarkis antara tuan dan hamba, seperti “seignorialisme” yang ditentang oleh Voltaire. Pengertian “hubungan kontraktual dan transaksional terbuka” dalam wawasan *madīnah* itu diteladankan dalam *Bay’ah Aqabah* yang terjadi antara Nabi Muhammad *saw* dan para utusan penduduk kota Yatsrib. Sebab makna dasar *bay’ah* atau *bay’at* itu berasal dari satu makna dengan perkataan *bay’*, yaitu “jual-beli”. Pengikatan hubungan yang bersifat transaksional-kontraktual lewat “perjanjian” (*‘ahd*) dan “jual-beli” (*bay’* atau *mubâya’ah*) itu merupakan sifat hubungan antara Allah dan manusia, dan diajarkan oleh semua agama dalam kitab-kitab suci, khususnya Taurat, Injil, dan Qur’an.

Dengan *bay’at* di Aqabah itu, Nabi memperoleh keamanan dan keselamatan diri beliau dan kaum beriman nanti di kota Yatsrib setelah hijrah, dan penduduk kota Yatsrib memperoleh jaminan kepemimpinan Nabi yang adil dan bijaksana untuk menyatukan seluruh penduduk Yatsrib, khususnya antara klan Aws dan klan Khazraj yang bermusuhan. Nabi menjanjikan untuk berperan sebagai pembina konsensus (*consensus builder*) di Yatsrib, selaku pemersatu dan juru damai antara pihak-pihak yang bermusuhan.

Setelah hijrah ke kota Yatsrib, Nabi mengubah nama kota itu menjadi Madinah. Salah satu penjelasan leksikal tentang perkataan Arab *madīnah* menyebutkan berasal dari kata kerja *dâna-yadînu*,

tunduk-patuh, menjadi *madyinah*, yaitu masyarakat yang tunduk-patuh kepada hukum Tuhan, dengan konsekuensi tunduk-patuh kepada hukum dan ajaran yang diajarkan Tuhan. Termasuk dalam ajaran Tuhan ialah kewajiban manusia untuk tunduk-patuh kepada kesepakatan dan perjanjian kontraktual yang sah antara sesamanya, yang tidak melanggar ajaran Tuhan. Dari akar kata yang sama terambil perkataan *dîn* yang berarti agama, sebab agama adalah ajaran kepatuhan, sama dengan makna dasar kata-kata Sanskerta *agama* dan kata-kata Latin *relégaré*, akar istilah-istilah *religion*, *religie*, dan seterusnya. Karena itu memeluk agama berarti menganut pandangan hidup taat kepada Tuhan, kepada ajaran Tuhan, dan kepada hukum dan aturan hasil perjanjian dan kesepakatan yang sah berdasarkan jiwa ajaran Tuhan.

Penjelasan leksikal lain menyebutkan bahwa perkataan Arab *madînah* berasal dari kata kerja *madana-yamdunu*, yang berarti mendirikan bangunan. Sebab sebuah kota atau *madînah* adalah suatu tempat hunian menetap (*settlement*) berupa kompleks bangunan menetap, bukan kemah yang merupakan perlengkapan hunian berpindah-pindah (*nomad*). Peradaban umat manusia sebagian besar tumbuh dari pola hidup menetap. Karena itu perkataan Arab *hadlârah*, pola hidup menetap, menjadi identik dengan peradaban, sedangkan perkataan Arab *badâwah*, pola hidup berpindah-pindah, mengandung makna kehidupan sederhana dan kasar, bahkan kurang sopan, seperti dengan jelas terkandung dalam kata-kata *badâwi* atau *badwî* (“baduwi” atau “badui”). Bangunan itu dalam bahasa Arab juga disebut *imârah*, yang di antara derivasinya ialah *umrân* (peradaban) dan *mâ'mûr* (berperadaban, kerta-raharja). Daratan di bumi yang berpenghuni, karena itu juga berperadaban, dalam bahasa Arab disebut *al-Dâ'irah al-Ma'mûrah* (“Daerah Makmur”, “Kawasan Kerta-Raharja”, yakni, berpenduduk dan ramai). Dalam bahasa Yunani disebut *Oikoumené*, asal-usul makna gerakan Ekumenisme Nasrani. Dalam lingkungan *Oikoumené* itu tumbuh berbagai *polis*, negara-kota, yang menjadi pusat peradaban itu. Salah satu dari banyak *polis* itu berkedudukan sebagai *metropolis*, ibukota.

Berkaitan dengan konsep itu, kota suci Makkah disebut *Umm-u 'l Qurà*, “ibu bagi kota-kota”, jadi sebuah *metropolis*, pusat peradaban, sesuai dengan pandangan geo-kultural penduduk Arabia. Dari perkataan Yunani “*polis*” itulah diambil dasar pengertian “politik” (“*politics*”-*the art of science of government or governing, especially the governing of a political entity, such as a nation, and the administration and control of its internal and external affairs*).

Jadi, kembali kepada pokok pembahasan di sini, *madīnah* mempunyai makna yang sama dengan *polis*, mula-mula berarti “negara-kota”, tetapi kemudian berkembang menjadi pengertian tentang penyusunan tata pergaulan bersama dalam suatu kesatuan kemasyarakatan tertentu untuk mengembangkan kehidupan yang beradab melalui ketaatan kepada hukum dan aturan. *Madīnah* yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan pengertian tentang negara-bangsa, *nation-state*, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara, demi maslahat bersama. Sebagaimana termuat dalam Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (*ummah wāḥidah*) tanpa membeda-bedakan antara kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Maka ditegaskan bahwa kaum Yahudi Bani Auf, misalnya, adalah satu *ummah* (satu bangsa) bersama kaum beriman, dalam hal ini ialah para pengikut Nabi, demikian pula kaum Yahudi dari kelompok-kelompok lain, yang satu persatu disebutkan dalam Piagam. Kaum Yahudi punya hak sepenuhnya atas agama mereka, dan kaum Muslim punya hak sepenuhnya atas agama mereka. Antara sesama warga terjalin hubungan saling mengingatkan dan memberi nasehat dengan baik, bebas dari kecurangan, sebuah *social contract* atas dasar kejujuran dan kebajikan. Semua warga Madinah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal biaya kemasyarakatan dan kenegaraan, terutama di bidang pertahanan.

Memang sangat disesalkan bahwa tiga kelompok utama Yahudi Madinah, yaitu klan-klan Qurayzhah, Qaynuqa, dan Nadlir melakukan pengkhianatan sangat fatal, sehingga terpaksa diusir keluar

Madinah. Tetapi dari kalangan kaum Yahudi itu terdapat juga golongan yang setia berpegang kepada amanat seperti digambarkan dalam Kitab Suci, sehingga masih ada yang tetap bertahan untuk tinggal di Madinah dengan aman, di zaman Nabi sendiri dan di zaman para khalifah sesudahnya. Mereka tetap berpartisipasi dalam kehidupan bersama sistem Madinah, seperti penuturan tentang adanya dialog antara Khalifah Umar dengan tokoh-tokoh mereka.

Kesatuan dalam Perbedaan

Jiwa Piagam Madinah sepenuhnya sejalan dengan penegasan Nabi Muhammad *saw* bahwa agama semua nabi pada prinsipnya adalah sama. Prinsip itu juga dijelaskan dalam al-Qur'an, bahwa Allah mensyariatkan agama yang sama untuk semua nabi, seperti Nabi-nabi Nuh dan Muhammad, sebagaimana disyariatkan kepada Nabi-nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Semua umat harus menegakkan syariat agama yang sama itu dan tidak dibenarkan berpecah-belah di dalamnya. Sebab umat para nabi itu adalah umat yang satu dan sama (*ummah wâhidah*), di bawah Tuhan Yang Mahaesa, dan semuanya menghambakan diri hanya kepada-Nya saja. Juga dijelaskan bahwa untuk setiap umat telah ditetapkan Allah *jalan* menuju kebenaran (*syir'ah, syari'ah*) dan cara menemukannya (*minhâj*). Dalam keadaan berbeda-beda itu, semuanya diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan, mewujudkan titik-kesamaan dari semua *syir'ah* atau *shari'ah* dan *minhâj* tersebut.

Jadi, perbedaan dalam hal-hal sekunder, bukan hal-hal primer seperti nilai kemanusiaan universal, tidak dibenarkan untuk mengganggu kerjasama dalam kebaikan. Maka, misalnya, Tuhan menetapkan untuk setiap umat arah atau kiblat yang berbeda-beda yang tidak perlu dipersoalkan, dan semuanya diperintahkan untuk berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan, sebab Allah jua yang membuat mereka menghadap ke arah itu. Sebab, “*Bukanlah*

kebajikan itu ialah, bahwa kamu mengarahkan wajahmu ke timur atau ke barat; tetapi kebajikan ialah jika orang beriman kepada Allah, Hari Kemudian, para Malaikat, kitab suci, dan para nabi; dan orang yang mendermakan harta itu untuk karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang terlantar dalam perjalanan, peminta-minta, dan orang-orang yang dalam belenggu perbudakan; dan orang yang menegakkan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka yang menepati janji apabila telah berjanji, dan mereka yang tabah dalam kesusahan, kesulitan dan pada saat terjadi bencana. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa,” (Q. 2:177).

Karena prinsip-prinsip pluralisme dan inklusivisme itu, antara para pemeluk agama dilarang bertikai — kecuali terhadap mereka yang zalim — dan masing-masing harus menyatakan bahwa mereka percaya kepada kitab suci mereka sendiri dan kitab suci golongan lain, karena Tuhan mereka semua itu adalah satu dan sama, dan mereka semua adalah kaum *muslim* kepada-Nya. Kaum *muslim* adalah kaum yang ber-*islâm*, yang tunduk-patuh, pasrah-sumarah, dengan kedamaian (*salâm*) kepada Tuhan, sebagaimana kaum *mu’min* adalah kaum yang ber-*îmân*, sepenuhnya percaya dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Semuanya itu diringkaskan dalam perintah Tuhan. “*Nyatakanlah olehmu semua: ‘Kami beriman kepada Allah dan kepada yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub, dan kepada al-asbâth (suku-suku Israel), dan yang dianugerahkan kepada Musa dan Isa, serta yang dianugerahkan kepada semua para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari mereka, dan kepada-Nya kami berserah diri, pasrah-sumarah, dengan penuh kedamaian (muslimûn),’*” (Q. 2:136). Sebab makna generik *al-islâm* itu, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ibn Taimiyah, kemudian oleh Rasyid Ridla, adalah tunduk patuh, menyerahkan diri dengan pasrah, kepada Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Dan pengertian generik itu meliputi semua ajaran Tuhan kepada semua nabi. Hal ini berbeda dengan pengertian “Islam” secara sosiologis-historis, yang

belum tentu sama dengan *al-islâm* generik, bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid Ridla, hanyalah hasil sebuah adat-kebiasaan, sebuah gejala komunalisme justru dapat bersimpang jalan dari hidayah dan kebenaran Ilahi.

Berkaitan dengan itu harus selalu diingat bahwa untuk setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul, bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagaimana tidak ada suatu umat pun melainkan telah tampil di kalangan mereka seorang pemberi peringatan, dan bahwa bagi setiap kaum atau golongan ada penunjuk jalan. Kesimpulan logis dari penegasan-penegasan itu ialah bahwa di semua tempat dan kalangan umat manusia terdapat pengajaran kearifan, dengan kitab atau lembaran (*shuhuf*) suci mereka masing-masing. Hanya sebagian saja dari para utusan Tuhan itu yang disebutkan dalam Kitab Suci, sedangkan sebagian (besar) yang lain tidak disebutkan. Semua kitab suci memancar dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Mahaesa. Karena itu umat manusia harus menerima dan beriman kepada semua kitab suci mana pun juga, sebagaimana juga mereka harus menerima dan beriman kepada semua nabi tanpa kecuali, dan tidak terbatas hanya kepada para nabi Semitik, lebih-lebih hanya kepada apa yang disebut “*Abrahamic Religions*”, “Agama-agama Ibrahim”, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Pandangan kenabian dan ajaran kebenaran itu meliputi seluruh kenyataan keagamaan di muka bumi, seperti Hinduisme, Budhisme, Taoisme, Konfusianisme, Shintoisme, dan lain-lain. Bahwa al-Qur’an tidak menyebutkan agama-agama itu, tetapi hanya menyebutkan agama-agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabi’in, dijelaskan oleh Rasyid Ridla dalam tafsir *al-Manâr*, karena bangsa Arab sebagai *address* langsung wahyu saat itu tidak mengenal agama-agama di tempat-tempat lain seperti India, Cina, Jepang, dan lain-lain, sehingga penyebutannya akan menimbulkan perasaan aneh dan bingung (*al-ighrâb*). Maka tanpa mengingkari peran agama-agama non-Semitik itu, al-Qur’an cukup menyebutkan agama-agama yang telah dikenal oleh bangsa Arab saat wahyu diturunkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah Muhammad *saw* menjelaskan bahwa jumlah seluruh nabi mencapai angka 124.000 (seratus dua puluh empat ribu), 315 (tiga ratus lima belas) di antara mereka bertindak sebagai utusan (rasul) Allah. Muhammad Rasulullah menyampaikan prinsip-prinsip itu, dan kaum beriman yang menyertainya, sebagaimana digambarkan dalam Taurat dan Injil, adalah orang-orang yang tegas menghadapi para penentang kebenaran (kaum kafir) namun kasih sayang kepada sesamanya. Mereka tidak dilarang untuk berbuat kebajikan dan keadilan kepada golongan lain mana pun, kecuali jika golongan itu menunjukkan sikap permusuhan dalam masalah agama, mengusir mereka dari negeri-negeri mereka, dan bersekongkol dalam usaha pengusiran itu.

Itulah sebagian dari dasar-dasar masyarakat Madinah yang dibangun Nabi dan diteruskan oleh para khalifah, yaitu masyarakat yang berkeadaban (*civility, madaniyah*) yang tinggi. Dari sudut pandang itu, Piagam Madinah adalah penegasan paham kemajemukan atau pluralisme. Paham kemajemukan itu tidak dibenarkan untuk dipersepsi hanya sebagai sesuatu yang bersifat prosedural semata, sehingga dilaksanakan hanya jika menguntungkan dan ditinggalkan jika merugikan. Paham kemajemukan itu merupakan akibat alamiah adanya kehendak Allah bahwa manusia memang berbeda-beda, dan harus diterima secara prinsipil dan konsekuen. Seperti halnya dengan keadilan yang juga harus dilaksanakan secara prinsipil dan konsekuen, meskipun sepiantas lalu dan dalam jangka pendek akan berakibat merugikan diri sendiri, kedua orangtua, dan karib-kerabat. Sebab dalam dimensi waktu yang lebih panjang dan dimensi ruang yang lebih luas, pelaksanaan suatu asas kebenaran akan membawa kebaikan untuk semua.

Atas dasar prinsip-prinsip itu dibangun suatu sistem kehidupan bersama berbentuk *polity* (*“an organized society, such as nation, having a specific form of government”*), dengan tujuan terwujudnya maslahat umum, berbentuk negara-bangsa. Karena itu bahasa Ibrani mengadaptasi perkataan Arab *“madīnah”* menjadi *“medinat”*,

dengan pengertian negara, yakni, negara hukum (*rechstaat*), yaitu, tunduk kepada Taurat (*taurat* memang berarti hukum) dan Hukum Talmud (syariat Yahudi). Kepada wilayah yang mereka kuasai di Palestina sekarang ini, kaum Yahudi memberi nama resmi dalam bahasa Ibrani “*Medinat Yisra’el*”.

Maka *madinah*, sebagaimana dikatakan Robert N. Bellah (lihat penjelasan lebih lanjut di bawah), adalah sebuah konsep nasionalisme modern, dasar terbentuknya sebuah negara-bangsa atau *nation-state*. Dengan tujuan terwujudnya maslahat umum, dalam negara-bangsa seluruh kekayaan negara adalah milik umum atau publik, yaitu seluruh warga negara, bukan milik para penguasa seperti dalam negara kerajaan absolut (di mana kekayaan negara adalah milik atau dikuasai raja).

Urusan Umum dan Urusan Pribadi

Karena itu dalam negara-bangsa dikenal adanya pembedaan dan pemisahan yang tegas antara kekayaan milik pribadi dan kekayaan milik umum. Untuk mendukung prinsip itu, negara-bangsa mensyaratkan kepatuhan warga negara kepada hukum, bukan kepada penguasa, baik penguasa pribadi zalim (otokrat) maupun penguasa sekelompok orang kaya (plutokrat). Negara-bangsa adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan seperti sistem Fir’aun. Ketaatan atas dasar hubungan kontraktual dan transaksional terbuka menuntut setiap warga negara taat kepada kekuasaan atau kepemimpinan atas dasar pertimbangan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan itu dijalankan dengan benar dan adil, dengan mengikuti hukum yang berlaku. Tidak ada kewajiban taat dalam kezaliman dan pelanggaran hukum. Ketaatan yang dikembangkan ialah ketaatan terbuka, rasional, kalkulatif, dan kontraktual-transaksional. Maka tidak dibenarkan adanya kesetiaan tertutup, tanpa pertimbangan yang kritis. Di dalam masyarakat harus selalu ada komunitas yang terus-menerus melakukan pengawasan sosial,

dengan menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan (amar makruf, nahi munkar).

Untuk itu semua diperlukan suasana kemasyarakatan yang bebas, yang memungkinkan para warganya untuk meningkatkan satu sama lain tentang kebenaran dan ketabahan dalam hidup, yaitu ketabahan perjuangan bersama mewujudkan kebenaran dan keadilan. Untuk memberi ruang bebas bagi adanya pengawasan sosial itu, negara-bangsa ditegakkan atas dasar keseimbangan kekuatan-kekuatan yang saling mengendalikan dan mengawasi, dan mencegah dominasi suatu kekuatan mana pun. Hukum keseimbangan antara manusia adalah anugerah Allah yang amat besar sehingga bumi terhindar dari kehancuran. *“Kalaulah Allah tidak menolak (mengimbangi) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, maka pastilah bumi hancur. Tetapi Allah memiliki kemurahan kepada seluruh alam”*. Jadi bumi kita bertahan karena berjalannya hukum keseimbangan, suatu kemurahan kepada seluruh alam dan penghuninya dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena itu mengusahakan terciptanya kekuatan-kekuatan yang seimbang antara masyarakat manusia, baik secara nasional ataupun global, adalah sejalan dengan berlakunya hukum alam dari Sang Maha Pencipta. Dengan adanya kekuatan-kekuatan yang seimbang itu, yang terwujud dalam mekanisme pengendalian dan pengimbangan (*checks and balances*), masyarakat dan negara akan terhindar dari kemungkinan meluncur menuju kehancuran, sebab penyelewengan tidak terbiarkan leluasa.

Pembebasan Manusia dan Ketaatan kepada Hukum

Dalam sejarah peradaban manusia, Hammurabi dicatat sebagai tokoh kenegaraan pertama yang memiliki kearifan untuk menuntut rakyat tunduk kepada hukum, tidak kepada dirinya sendiri sebagai pribadi penguasa. Kearifan Hammurabi itu sesungguhnya adalah jenis kearifan metafisis. Tuhan mengutus para rasul dengan tugas

menyeru manusia untuk menghambakan diri hanya kepada-Nya semata, dan pada saat yang sama melawan kekuasaan tiranik (*thâghût*). Kitab-kitab suci mengandung pedoman keadilan dan perimbangan, agar umat manusia hidup dengan menegakkan kejujuran. Dengan adanya pembebasan diri karena penghambaan hanya dilakukan semata kepada Tuhan itu, akan tercipta kehidupan yang bebas dari kelaparan, dan terjamin aman dari rasa takut.

Karena Tuhan telah membangkitkan seorang rasul atau pengajar kearifan di semua umat, maka semua orang harus menerima, mempercayai dan bersedia mengakui, kemudian mengambil sebagai milik sendiri, *hikmah*, kearifan atau *wisdom* di mana pun mereka temukan. Adanya kearifan lokal atau regional harus dipandang dan diterima sebagai kelanjutan ajaran penganjur kebenaran (*teacher of righteousness*), yang tokoh itu dalam bahasa Arab dan Ibrani disebut *nabî* (nabi), orang yang mendapatkan *naba'*, berita, yakni, berita Ilahi. Kearifan di mana saja merupakan kelanjutan nyata fitrah suci kemanusiaan universal. Karena itu manusia dianjurkan untuk mencari ilmu dan kearifan di mana saja, "*meskipun di negeri Cina*". Titik-titik pusat berbagai kearifan lokal terhubung oleh garis-garis kesamaan prinsipil yang disebut *kalimat-un sawâ'*, yaitu kalimat kesamaan ajaran dalam kitab-kitab suci. Tuhan memerintahkan untuk mengajak para penganut kitab suci menuju titik-temu itu. Menolak salah seorang atau lebih dari para utusan Tuhan, atau membeda-bedakan antara mereka, adalah perbuatan ingkar kepada hikmah Ilahiah dan kearifan kemanusiaan universal.

Dalam lingkungan apa yang sering disebut "Agama-agama Ibrahim" atau *Abrahamic Religions*, sebagai misal, pandangan-pandangan dasar tersebut diteladankan dalam kerasulan Nabi Musa *as* yang menegaskan adanya kewajiban manusia untuk tunduk kepada Hukum (Taurat), dengan inti Sepuluh Firman (*al-Kalimât al-Ashr, The Ten Commandments, Decalogue*) yang dianugerahkan kepadanya di atas Gunung Sinai (*Thûr Sînâ*). Sepuluh Firman itu merupakan wujud Perjanjian (*Mitsâq*) antara Allah dan kaum Israil (*Banî Isrâ'îl*, Anak-turun Israil, "hamba Allah", gelar Nabi

Ya'qub, cucu Nabi Ibrahim). Pelaksanaan Perjanjian itu menjadi kerangka jaminan kelangsungan kebebasan yang mereka peroleh setelah berhasil menumbangkan sistem ketaatan mutlak kepada pribadi penguasa, sistem Fir'aun, dan setelah mereka keluar dari kungkungan perbudakan di Mesir dengan melakukan perpindahan besar-besaran atau Eksodus menuju ke "Tanah Suci" yang dijanjikan (*al-Ardl al-Muqaddasah*), yaitu Kanaan. (Karena itu kaum Yahudi, sejak tahun 1843 di New York, mendirikan perkumpulan *B'nai B'rith* — "*Sons of the Covenant*", "Putera-putera Perjanjian" — suatu sebutan yang mengisyaratkan eksklusivisme.

Kerasulan Nabi Isa al-Masih *as* mengajarkan bahwa ketaatan kepada hukum ajaran Nabi Musa dalam Taurat itu harus tetap dipegang teguh, namun sedikit dikendorkan, dan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dengan unsur kesantunan dan kasih sayang (*ra'fah wa rahmah*, yaitu kasih Ilahi, *Agapé*), sehingga hukum memperoleh dimensi kelembutan kemanusiaan yang mendalam. Maka Nabi Isa *as* bertugas untuk membenarkan Taurat atau Hukum Musa sebagai wujud Perjanjian (*Mitsâq*) antara manusia dan Tuhan. Semangat Hukum sebagai Perjanjian itu kemudian dipertinggi dengan kabar gembira (*Injil*, arabisasi istilah Yunani — *euangelion* — Inggris: *evangel*, kabar gembira), yaitu ajaran kasih Ilahi antara sesama manusia. Pesan Allah melalui Nabi Isa itu disampaikan dalam khutbah dari atas Bukit Zaitun dekat *Haykal Sulaymân* (*Solomon Temple*) atau Masjid Aqsha di al-Quds (Yerusalem), Palestina. Para pengikut Isa al-Masih disebut kaum Nasrani, Pembela Jalan Allah (dari bahasa Arab: *Nashrânî*, berasal kata *nashr*, tindakan membela). Para sahabat Nabi Isa *as*, yaitu kaum Hawari (*al-Hawârîyûn*), adalah *Anshâr-u 'l-Lâh*, "Pembela Allah", yang menyatakan diri ber-*îmân* kepada Allah, dengan kesaksian bahwa mereka adalah *muslimûn*, orang-orang yang ber-*islâm*, yakni, berserah diri kepada Allah. Dalam bahasa Ibrani, para penganut Isa al-Masih disebut kaum "*Nazrié B'rith*", "Pembela Perjanjian", yakni perjanjian antara manusia dan Tuhan bahwa manusia tidak boleh menghambakan diri kepada siapa dan apa pun selain Allah, Tuhan Yang Mahaesa. Tunduk hanya

kepada Tuhan itu diwujudkan dengan tunduk kepada Hukum dan Aturan yang sah seperti, misalnya, Dekalog, tidak kepada sesama manusia seperti Fir'aun. Dari pengertian *Nashrâni* itu para pengikut Isa al-Masih, juga disebut kaum *Nazarene*. Mereka dijanjikan Allah akan diunggulkan atas kaum kafir sampai Hari Kiamat.

Kerasulan Nabi Muhammad *saw* menyatukan kedua unsur Hukum Nabi Musa dan unsur Kasih Nabi Isa al-Masih. Maka dalam ajaran yang pangkalnya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dari *al-Balad al-Amîn* (Negeri yang Aman, yaitu Makkah) terdapat unsur penegakan hukum yang tegas dan unsur pemaafan yang lapang dan lebih tinggi. Dalam Kitab Suci digambarkan bahwa kaum beriman ialah mereka yang membela diri atau melawan jika mendapat perlakuan tidak adil, namun tetap sedia memberi maaf dan melakukan *ishlâh* (pendamaian) karena ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu balasan kebaikan langsung dari Allah. Pelaksanaan prinsip ini, misalnya, dapat dilihat dalam hal hukum bunuh (*qishâsh*) untuk kejahatan pembunuhan. Pelaku kejahatan pembunuhan harus dihukum bunuh, kecuali jika pihak keluarga korban bersedia memaafkan, dan agama menganjurkan agar sedapat mungkin memaafkan, setelah proses hukum telah ditegakkan. Majalah *National Geographic* (Oktober 2003) melaporkan bagaimana pelaksanaan prinsip itu di Sabya, sebuah kota kecil daerah pertanian di bagian selatan Arab Saudi. Di lapangan terbuka kota itu, ketika algojo mengayunkan pedangnya untuk melaksanakan hukum pancung kepada seorang pembunuh, mendadak pelaksanaan itu dihentikan, karena terdengar teriakan memaafkan dari Muhammad Banaygh, kepala keluarga korban. Banaygh menjelaskan bahwa ia melakukan keputusan memaafkan itu adalah untuk memenuhi ajaran al-Qur'an tentang ketegasan menegakkan hukum dan kelembutan jiwa memaafkan yang lebih tinggi. Juga dikatakan oleh Banaygh bahwa ia mengikuti saran badan pengadilan bersangkutan, yang selama 17 bulan menganjurkan untuk memaafkan terhukum. Semua itu tak terbayangkan bagi pengamat luar seperti reporter majalah *National Geographic*.

Hak-hak Asasi Manusia

Prinsip ketegaran hukum dan kelembutan memaafkan itu sejalan dengan semangat pesan kemanusiaan universal yang terkandung dalam syariat asasi agama-agama. Yaitu, ajaran dasar kemanusiaan. “*Barangsiapa membunuh seseorang tanpa orang itu melakukan kejahatan pembunuhan atau perusakan di bumi, maka bagaikan ia membunuh seluruh umat manusia; dan barangsiapa menolongnya maka bagaikan ia menolong seluruh umat manusia,*” (Q. 5:32). Prinsip itu ditegaskan oleh Nabi pada kesempatan Pidato Perpisahan (*Khuthbat-u 'l-Wadâ'*). Dalam pidato itu beliau sampaikan pesan tentang kesucian jiwa, harta, dan kehormatan (*al-dimâ' wa al-amwâl wa al-a'râdl*). Padanan Inggris istilah-istilah Nabi itu ialah *lives, fortunes, sacred honor*, sama dengan bunyi paragraf terakhir Deklarasi Kemerdekaan Amerika, suatu dokumen politik hasil rancangan tokoh-tokoh Deisme, Unitarianisme, dan Universalisme seperti Thomas Jefferson. Manusia adalah puncak ciptaan dengan harkat dan martabat yang dimuliakan Sang Pencipta, namun dapat jatuh menjadi serendah-rendah makhluk, kecuali yang menempuh hidup mengikuti jalan kebenaran menuju Tuhan (ber-*îmân*) dan berbuat kebaikan kepada sesamanya. Patut direnungkan bahwa sore hari setelah Nabi selesai menyampaikan pidato itulah turun firman Allah yang menyatakan bahwa agama umat Muhammad telah sempurna, karunia Allah untuk mereka telah lengkap, dan Allah rela *al-Islâm* sebagai agama. Jadi khutbah yang menegaskan hak-hak asasi manusia itu merupakan puncak tugas kerasulan Nabi, dan para sahabat memandangnya sebagai isyarat bahwa Nabi akan segera dipanggil menghadap Tuhan. Nabi wafat 80 hari setelah khutbah itu, maka khutbah itu disebut *Khuthbat-u 'l-Wadâ'*, Khutbah Perpisahan. Umat Islam Indonesia yang merupakan golongan terbesar warga negara sepatutnya betul-betul memahami peristiwa besar tersebut, dan menghayati apa maknanya bagi *nation-state* atau negara-bangsa Republik Indonesia.

Pandangan dasar kemanusiaan yang berpangkal dari Madinah itu dipantulkan ke Eropa oleh Giovanni Pico della Mirandola, filosof kemanusiaan terkemuka zaman Kebangkitan (*Renaissance*) Eropa. Ia membuat “Orasi tentang Martabat Manusia” (*Oratio de hominis dignitate* atau *De hominis dignitate oratio*) pada tahun 1486, di depan para sarjana dari seluruh Eropa yang ia undang ke Roma. Pico mengatakan bahwa dari bacaannya terhadap karya-karya kaum Muslim ia menangkap ajaran tentang manusia sebagai makhluk yang paling tinggi. Namun manusia dapat jatuh menjadi makhluk yang paling rendah, sesuai dengan pilihannya sendiri menurut kebebasannya. (*“In this way man’s distinctive characteristic becomes his freedom; he is free to make himself in the image of God or in the image of beasts”; ... that man, unlike the animals, has no specific ability or place in the universe but by his own will can sink to brute level or rise to angelic heights*). Bersama dengan 900 tesisnya yang lain, pandangan asasi kemanusiaan itu menjadi landasan bagi Pico untuk melancarkan kampanye membela prinsip-prinsip humanisme, yang kemudian menyebar di antara bangsa-bangsa Eropa Barat. Dari kajiannya terhadap sumber-sumber Arab, Ibrani, Yunani dan lain-lain, Pico menemukan kesamaan dalam ajaran pokok semua pandangan hidup manusia, terutama agama, yaitu kearifan kemanusiaan universal. Falsafah kemanusiaan atau Humanisme Eropa masa Kebangkitan atau *Renaissance* berkembang dari pemikiran Pico itu. [❖]

“NEGARA-BANGSA” DAN NASIONALISME

Konsep “negara-bangsa” atau “*nation-state*” terkait erat dengan paham kebangsaan atau nasionalisme, tidak dalam arti sempit seperti terdapat dalam paham-paham kesukuan, kekabilahan, etno-nasionalisme, apalagi chauvinisme menurut contoh Naziisme Jerman Hitler, Fasisme Italia Mussolini dan militerianisme Jepang Samurai. Saat-saat gencar dikumandangkan pada tahap-tahap dini pertumbuhan bangsa kita, paham kebangsaan itu sempat menjadi bahan polemik, karena muncul kekhawatiran bahwa paham itu akan bergeser ke chauvinisme. Tetapi paham kebangsaan itu kemudian dapat diterima karena diletakkan dalam bingkai perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Chauvinisme sebagai paham kebangsaan sempit yang didasarkan kepada pertimbangan rasialisme atau etnosentrisme justru bertentangan dengan paham kebangsaan sejati, yang mencakup dan mengakui kesamaan hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi atau pembedaan atas dasar apa pun, kecuali yang menyangkut kadar kesetiaan kepada tanah air dan negara. Konsep “negara-bangsa” berkaitan erat dengan paham kebangsaan sejati dalam arti luas, tidak dengan paham kebangsaan sempit.

Sistem *Madînah* dan Nasionalisme Modern

Hal-hal tersebut harus jelas tanpa ragu bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum Muslim yang merupakan bagian

terbesar warga masyarakat. Nasionalisme sejati, dalam artian suatu paham yang memperhatikan kepentingan seluruh warga negara tanpa kecuali, adalah bagian integral konsep Madinah yang dibangun Nabi. Berkenaan dengan Madinah Nabi itu, Robert N. Bellah, seorang sosiolog paling terkemuka untuk saat ini, menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern ialah sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah yang menggantikannya. Dalam sebuah tulisan, Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu, yang kemudian diteruskan para khalifah, adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Penilaian kepada seseorang bukan berdasarkan pertimbangan kenisbatan atau *ascriptive* seperti perkawanan, kedaerahan, kesukuan, keturunan, kekerabatan, dan sebagainya, yaitu ciri-ciri pribadi yang merupakan “takdir” Tuhan, bukan hasil pilihan bebas orang bersangkutan. Faktor-faktor kenisbatan atau *ascriptive* tidak dapat dijadikan tolak-ukur tinggi-rendah martabat seseorang. Penilaian kepada seseorang harus hanya berdasarkan apa yang ia telah perbuat dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu (*achievement orientation*), berdasarkan penegasan bahwa “Manusia tidak memiliki apa-apa kecuali yang ia usahakan”.

Menurut Bellah, pencopotan nilai kesucian atau kesakralan dalam memandang kepada suku atau kabilah, sehingga dengan pencopotan itu tidak dibenarkan untuk menjadikan suku atau kabilah sebagai tujuan pengkudusan dan pengabdian, adalah tindakan devaluasi radikal atau secara sah dapat disebut sebagai sekularisasi. Itu semua adalah konsekuensi dari adanya kewajiban memusatkan pengkudusan dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Mahatinggi (*Allâh Ta’âlâ, El Iliyun*). Menurut Robert Bellah, devaluasi radikal, sekularisasi atau desakralisasi berdasarkan paham Ketuhanan Yang

Mahaesa atau Tauhid (*Tawhīd*) itu merupakan unsur ketiga mengapa prinsip organisasi sosial Madinah disebut modern. (“... *Third was the radical devaluation, one might legitimately say secularization, of all existing social structures in face of this central God-man relationship. This means above all the removal of kinship, which had been the chief locus of the sacred in pre-Islamic Arabic, from its central significance*”).

Dengan paham dan semangat Tauhid, Ketuhanan Yang Mahaesa, manusia memperoleh kemerdekaannya yang hakiki, karena terbebaskan dari segala bentuk penghambaan oleh sesama makhluk, khususnya sesama manusia sendiri. Atas dasar paham dan semangat Tauhid itu pula manusia harus menentang setiap kekuasaan tiranik, kekuasaan yang merampas kebebasan, seperti Nabi Musa *as* menentang Raja Fir'aun, seorang tiran (*thâghûr*) dari Mesir Kuna.

Lebih lanjut, Bellah juga menyebutkan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*equalitarian participant nationalism*). Hal itu berbeda sekali dengan sistem republik negara kota (*city state*) Yunani kuno yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang merupakan hanya lima persen penduduk. Sementara kaum perempuan dan semua budak, yang keseluruhannya merupakan sembilan puluh lima persen penduduk, tidak memiliki hak apa-apa dari ataupun terhadap negara. Seperti diketahui, republik *city state* Yunani kuno adalah model bagi konsep republik dan demokrasi di Barat, dimulai dengan penerapannya di Amerika, dengan gedung gaya arsitektur kapitol sebagai lambangnya. Konsep republik *city state* Yunani kuno itu masih harus dikembangkan sedemikian rupa, sehingga tumbuh sejalan dengan paham kerepublikan (*republicanism*) dan demokrasi modern dalam wadah negara-bangsa seperti kita saksikan sekarang ini. Namun konsep Madinah, menurut Bellah sebagaimana dikutip di atas, sesungguhnya adalah “suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat dibayangkan”.

Mengingat bahwa dalam komunitas nasionalisme terbuka dan egaliter partisipatif model Madinah itu kekayaan nasional adalah milik umum (publik) guna sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat,

maka diperlukan pemisahan yang tegas antara harta pribadi dan harta umum. Kekacauan antara keduanya akan merobohkan sistem hukum dan keadilan. Masyarakat, melalui setiap pribadi warganya, diwajibkan tunduk-patuh kepada hukum, yang dasar-dasar metafisisnya diletakkan dalam ajaran agama seperti, misalnya, Sepuluh Firman dalam Taurat dan batasan-batasan (*hudûd*) halal-haram dalam al-Qur'an. Lebih banyak lagi adalah hukum-hukum hasil-hasil kesepakatan kontraktual (*al-'aqd, al-'uqûd*) dan perjanjian (*al-'ahd, al-mu'âhadâh*) yang pembuatan hukum-hukum serupa itu menjadi tugas pokok badan legislatif modern, kurang-lebih padanan konsep klasik "*Ahl al-Hall wa al-Aqd*", yaitu suatu kelompok para ahli yang memiliki wewenang untuk "mengurai" (*hall*) dan "mengikat" (*'aqd*), yakni wewenang membatalkan dan mengukuhkan hukum atau aturan, berdasarkan pertimbangan kebenaran dan keadilan serta maslahat umum. Kekacauan dalam penguasaan dan pengelolaan harta milik pribadi dengan harta milik umum akan mengakibatkan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan pembagian kekayaan nasional di luar hukum dan melanggar rasa keadilan. Lebih-lebih lagi jika semuanya itu disertai praktik-praktik korupsi dan penyelewengan dengan transaksi haram seperti suap-menyuap, maka tujuan negara-bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial akan menjadi perkara mustahil. Karena itu negara-bangsa mutlak memerlukan *good governance*, pengelolaan yang baik, yang bertumpu kepada kemutlakan adanya transparansi, partisipasi terbuka, dan pertanggungjawaban atau *accountability* dalam semua kegiatan kenegaraan di setiap jenjang pengelolaan negara, sehingga terbentuk pemerintah yang bersih (*clean government*).

Masalah Dinasti Genealogis

Kembali ke model Madinah, sangat disayangkan, seperti diamati Robert Bellah, bahwa prinsip organisasi sosial yang terbuka dan

egaliter partisipatif itu berlangsung tidak terlalu lama. Setelah berjalan selama sekitar 40 tahun, sistem Madinah digantikan oleh sistem kekuatan dinastik klan Umayyah di Damaskus. Menurut Ibn Khaldun, sistem Umayyah bukanlah sistem kekhalifahan — sekalipun resminya kekhalifan — melainkan sistem kerajaan (*mulk*) absolut. Dalam menjalankan pemerintahan dan menggunakan kekuasaan, rezim Umayyah mengikuti model kekaisaran model otokratik Byzantium. Hal ini mencocoki sabda Nabi bahwa Islam dimulai dengan kenabian dan rahmat, disusul dengan kekhalifahan dan rahmat, kemudian kerajaan dan despotisme.

Lebih dari itu, rezim Umayyah kembali ke dalam prinsip-prinsip tatanan masyarakat pra-Islam (“*relapse into pre-Islamic principles of social organization*” — Bellah). Gerak kembali ke tatanan Arab pra-Islam kaum Umayyah itu terjadi karena mereka terdiri dari anggota-anggota klan yang memusuhi Nabi sampai saat-saat terakhir. Mereka bergabung dengan komunitas Madinah, dengan secara resmi menerima agama Islam, hanya setelah pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan pemberian amnesti umum kepada bekas musuh-musuh itu. Maka mereka disebut *al-thulaqâ'*, yakni, orang-orang yang terbebaskan karena adanya amnesti. Mereka sebenarnya tidak memiliki penghayatan tentang *al-Islâm* dalam makna generiknya — bukan fenomena sosiologi-historisnya — begitu pula tentang prinsip-prinsip komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif yang menjadi konsekuensinya.

Kekuasaan yang demikian besar di Damaskus membuat mereka tidak berdaya terhadap godaan kembali kepada sistem sosial Arab pra-Islam yang telah mereka kenal dan jalankan sebelumnya. Maka ketika datang saatnya kekuasaan harus diganti, mereka tidak berpikir atau berusaha untuk meneruskan tradisi atau *sunnah* pengangkatan terbuka berdasarkan kemampuan calon pemimpin seperti pada masa-masa empat khalifah pertama. Sebaliknya, mereka menunjuk kalangan keluarga sendiri dengan pertalian darah sebagai dasar legitimasi, suatu dinasti genealogis yang ditentang oleh masyarakat Madinah. Dipelopori oleh A'isyah, janda Nabi, dan saudaranya,

Abdul Rahman ibn Abu Bakar, masyarakat Madinah menilai kekuasaan berdasarkan pertalian darah itu sebagai penerapan sistem Persia dan Yunani, merupakan tradisi Kisra dan Kaisar (*sunnat-u Kisrâ wa Qayshar*), yang bertentangan dengan tradisi Rasul (*sunnat-u 'l-Rasûl*) bukan pula tradisi para khalifah (*sunnat-u 'l-Khulafâ*). Bahkan masyarakat Madinah menentanginya sebagai *Hirqaliyah*, yakni, Herakliusisme, mengacu kepada sistem Heraklius, Kaisar Byzantium saat itu.

Tetapi rezim Umayyah tetap melanjutkan kehendak mereka yang menyimpang, dan asas komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif pun sangat melemah, kemudian akhirnya berganti menjadi asas komunitas kekuasaan raja di mana seluruh negara dan kekayaannya adalah pada dasarnya milik dan untuk kepentingan para penguasa dan anggota kelompoknya semata, bukan untuk maslahat umum. Sejak masa-masa itu dunia Islam hanya mengenal prinsip organisasi kemasyarakatan dan kenegaraan atas dasar legitimisasi genealogis atau hubungan darah, dan berstruktur kekuasaan religio-feodalistik. Kekuasaan negara menjadi identik dengan kesukuan atau kekeluargaan, seperti Abbasiyah, Fathimiyah, Usmaniyah (Ottoman), Ayyubiyah, dan seterusnya. Sebagian dari sistem kekuasaan dinastik-genealogis itu masih bertahan sampai hari ini, suatu penyimpangan dari prinsip *madînah* yang menyesatkan.

Dalam bahasa keagamaan, prinsip serupa itu disebut *'ashabiyah*, dan tingkah laku berdasarkan *'ashabiyah* disebut *ta'ashshub*, tingkah laku kefanatikan buta. *'Ashabiyah* adalah perilaku Jahiliah, sehingga Rasulullah *saw* menegaskan bahwa barangsiapa mati dalam *'ashabiyah* maka ia mati dalam paham Jahiliah. Prinsip organisasi sosial berdasarkan legitimasi genealogis itu baru mulai pudar setelah sebagian kaum Muslim berkenalan dengan paham republik (*republicanism*) dan demokrasi modern. Mereka menemukan bahwa republikanisme dan demokrasi lebih absah daripada paham kerajaan dinastik-genealogis, karena lebih mirip dengan sistem kekhalifahan klasik yang menerapkan sistem penetapan pemimpin melalui

pemilihan terbuka berdasarkan kemampuan, suatu sistem yang dapat dipandang sebagai model bagi republikanisme modern.

Maraknya Despotisme di Dunia Islam

Penyelewengan oleh rezim Umayyah kelak sangat berpengaruh kepada pemahaman umat Islam tentang agama dan pemerintahan. Meminjam ungkapan Muhammad Abduh, “Islam tertutup oleh kaum Muslim sendiri”, dan dalam ungkapan Karen Armstrong, “Islam telah dibajak oleh para pengikutnya sendiri” atau, lebih tepatnya, oleh mereka yang mengaku sebagai para pengikutnya, sehingga menyimpang jauh dari prinsip-prinsip Madinah.

Sebagaimana telah diisyaratkan, pengaruh buruk penyimpangan itu tampak jelas dalam sistem-sistem kekuasaan yang ada di lingkungan yang dikenal sebagai “dunia Islam” sekarang ini. Sistem-sistem yang kini ada di dunia Islam, baik yang berbentuk kerajaan maupun yang secara formal berbentuk republik, sebagian besar mencocoki kategori kezaliman kekuasaan yang dinamakan “despotisme timur” (*oriental despotism*), bukan komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Terdapat urgensi yang sangat tinggi pada umat Islam untuk memahami kembali prinsip-prinsip tatanan masyarakat Madinah yang oleh Robert Bellah disebut sebagai contoh nasionalisme modern itu. Keberhasilan dalam memahami kembali prinsip-prinsip itu akan memudahkan memahami prinsip-prinsip *modern nation-state* dari tinjauan ajaran dan sejarah Islam, untuk kemudian berpartisipasi positif dan ikut memberi arah kepadanya, meneladani sistem *madinah* dari Nabi.

Kaitan masalah ini dengan Indonesia ialah bahwa dalam masyarakat kita masih marak unsur-unsur feodalistik yang amat menghambat terwujudnya negara-bangsa atau *nation-state* modern menurut cita-cita para pendiri. Mungkin tanpa kita sendiri sadar, penampilan kita masih sangat pekat oleh nilai-nilai feodalistik, seperti tekanan berlebihan kepada unsur prestise dan

gengsi, untuk kemudian menempuh hidup tidak sesuai dengan prestasi dan kemampuan kerja. Karena itu “pejabatisme” sangat menggejala dalam masyarakat itu, yaitu cara pandang penuh gengsi para pemegang tugas kenegaraan yang tidak lagi bertindak sebagai “pelayan publik” (*public servants*), tetapi justru sebaliknya, bertingkah laku seperti “juragan publik” yang minta dilayani dan dihormati. Banyak dari kita yang mengidap penyakit “gila pangkat”. Pemerintah kolonial memanfaatkan itu semua sebagai perangkat pemerintahan tak langsung (*indirect government*), menghasilkan mentalitas “amtenarisme” dan “priyayiisme”. [❖]

INDONESIA KITA (I)

Sekalipun Islam merupakan agama bagi golongan terbesar penduduk Indonesia, namun para tokoh pendiri bangsa tidak merujuk kepada sumber-sumber ajaran dan sejarah Islam untuk wawasan mereka tentang “negara-bangsa”. Beberapa tokoh pelopor pertama nasionalisme modern seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, dengan bekal perlengkapan metodologi yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah Belanda, menunjukkan kemampuan cukup besar untuk memahami esensi komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Tetapi selain mengalami kesulitan dalam usaha menyatakan pokok-pokok pikiran Madinah itu dalam kerangka cara pandang modern dengan idiom-idiom dan jargon-jargonnya sendiri yang relevan, Tjokro dan Salim juga menghadapi kenyataan bahwa tidak ada satu pun negara dalam lingkungan “dunia Islam” yang merupakan wujud kontemporer komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif. Yang ada ialah justru model-model kekuasaan totaliter, despotik dan zalim, baik yang kerajaan maupun yang secara formal merupakan negara republik. Maka dalam hal “*modern national community building*”, para tokoh Indonesia tidak melihat contohnya dari yang ada di lingkungan “dunia Islam”, tetapi justru dari yang ada di lingkungan “dunia Barat”. Pendidikan modern telah membantu mereka memahami konsep-konsep nasionalisme modern, yang berlawanan dengan konsep-konsep kekuasaan para raja feodal yang selama ini mereka kenal.

Tentang Sistem Presidensial

Para tokoh pendiri negara itu merupakan komunitas intelektual modern Indonesia angkatan pertama, dan akses mereka kepada dunia pemikiran modern telah dengan kuat sekali mewarnai gagasan-gagasan mereka tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan, serta tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan. Kutipan-kutipan dari karya-karya para pemikir Barat bertaburan dalam tulisan-tulisan para tokoh itu. Pikiran-pikiran politik John Locke, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Montesquieu, Rousseau, Rénan, dan lain-lain, juga ideologi-ideologi Karl Marx, Friesdrich Engels, Lenin, Sun Yat Sen, sangat mempengaruhi pikiran-pikiran para pendiri bangsa. Mereka itu tidak berasal hanya dari kalangan yang secara salah kaprah disebut “nasionalisme sekular” seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Syahrir, tetapi juga dari kalangan yang disebut “nasionalis Islam” seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Muhammad Natsir. Titik-temu mereka semua ialah aspirasi demokrasi modern. Mereka menguasai bahasa-bahasa Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman — selain bahasa Belanda — sehingga wawasan mereka menjadi lebih kaya dan luas dengan bahan-bahan dari berbagai sumber.

Disebabkan oleh beberapa segi perkembangannya, Amerika Serikat dengan Presiden Franklin Delano Roosevelt selaku tokoh utamanya saat itu, harus diakui telah menjadi rujukan utama dibanding dengan negara-negara lain. Roosevelt, yang oleh majalah-majalah internasional edisi millenium yang lalu dipandang sebagai pribadi paling berpengaruh selama abad yang lalu (disusul oleh Mahatma Gandhi dan lain-lain), adalah seorang anti imprealisme dan kolonialisme. Ia mempunyai cita-cita membangun kembali dunia yang bebas dari penjajahan, setelah Perang Dunia II. Roosevelt adalah tokoh terpenting di balik konferensi di Bretton Woods, New Hampshire, 1994. Dalam konferensi Bretton Woods itu diputuskan untuk mendirikan badan

“Dana Moneter Internasional” (IMF) dan Bank Internasional untuk Pembangunan Kembali dan Pengembangan (IBRD, *International Bank for Reconstruction and Development*, yang lebih dikenal sebagai “Bank Dunia”). Lepas dari kinerja nyata kedua badan keuangan internasional itu yang akhir-akhir ini menjadi sasaran kecaman pedas berbagai kalangan, Roosevelt harus diingat sebagai tokoh yang bermaksud menggunakannya untuk tujuan-tujuan politik global yang lebih mulia, yaitu membangun kembali dunia yang bebas dari kolonialisme dan imperialisme, setelah Perang Dunia II. Seandainya sempat dilaksanakan, pembangunan kembali dunia itu akan sama dengan model *Marshall Plan*, 1947, untuk Eropa, “*A highly successful program of U.S. economic and technical assistance to 16 European countries, to permit them to restore their productive capacity after the disruption of World War II.*” Tetapi Roosevelt tidak sempat melaksanakan niatnya, karena ia meninggal mendadak pada awal jabatan kepresidenannya yang keempat (12 April 1945), dan digantikan oleh wakilnya, Harry S. Truman.

Sedikit cuplikan sejarah mutakhir Amerika itu cukup penting dikemukakan, karena berpengaruh besar sekali kepada pertumbuhan awal negara Indonesia. Presiden Truman adalah penguasa Amerika yang memutuskan untuk membuat bom atom dengan proyek penelitian super rahasia, “*Manhattan Project*” di Universitas Chicago dipimpin oleh Enrico Fermi. Setelah berhasil dibuat, bom itu ia perintahkan untuk dijatuhkan di atas dua kota industri Jepang padat penduduk, Hiroshima dan Nagasaki. Tindakan itu dicatat dalam sejarah kemanusiaan sebagai tragedi yang sampai sekarang belum ada tolak bandingannya, suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang tiada taranya. Banyak orang bespekulasi, kekejaman itu tidak akan pernah terjadi. Tetapi apa pun penilaian orang, kenyataan ironis telah terjadi, yaitu bahwa peristiwa jatuhnya bom atom atas dua kota di Jepang itu telah membuka peluang untuk diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, puncak perjuangan bangsa yang telah lama dinanti-nanti.

Truman juga meninggalkan masalah yang ikut menyulitkan Indonesia. Menurut banyak kalangan, ia dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya eskalasi perang dingin antara “Barat” dan “Timur” sesudah Perang Dunia II. Dalam hal ini pun banyak orang berpendapat, seandainya saat itu Roosevelt masih hidup, mungkin perang dingin tidak akan separah akibat kebijakan Truman. Walaupun begitu, sisa-sisa kebijakan Roosevelt banyak yang bertahan. Amerika, bersama dengan Australia (pemerintahan Partai Buruh), tergolong negara-negara Barat yang banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Ketika pada 10 November 1945 kota Surabaya dibombardir oleh tentara Inggris dan Belanda, Amerika dan Australia adalah dua negara Barat yang aktif menghalangi atau meleraikan.

Karena penampilan dan komitmen Roosevelt yang mengesankan, beberapa tokoh pendiri negara Indonesia cukup banyak mendapat ilham dari pengalaman Amerika saat itu dalam hal negara dan seni kenegaraan (*state and statecraft*). Selain memilih bentuk republik, para tokoh Indonesia juga menyadari perlunya dirumuskan dengan jelas nilai-nilai asasi kenegaraan dalam dokumen utama negara. Nilai-nilai asasi itu mereka rumuskan menjadi dasar-dasar negara yang kemudian disebut Pancasila, yang tertuangkan dalam dokumen primer Republik Indonesia, suatu dokumen yang dirancang sebagai naskah Deklarasi Kemerdekaan. Meskipun akhirnya, karena beberapa sebab, tidak digunakan sesuai rencana semula — dan Deklarasi Kemerdekaan diganti dengan Proklamasi Kemerdekaan yang naskahnya ditulis Bung Karno secara tergesa-gesa — namun semangat dokumen primer itu dipertahankan dan kini menjadi Mukadimah Undang-Undang Dasar. Dengan mencontoh Amerika, para pendiri negara juga merancang pelaksanaan demokrasi dengan pemerintahan presidensial periodik. Mereka juga menganut prinsip pluralisme, dan berpegang kepada asas kebebasan-kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Keseluruhan wawasan itu juga telah menjadi semangat umum setiap UUD yang pernah dimiliki Republik sepanjang sejarahnya sampai sekarang,

seperti UUD RIS dan UUDS, selain UUD 1945 sendiri, yang sekarang ini berlaku.

Tentang Sistem Parlementer

Dengan adanya Proklamasi, suatu deretan eksperimen melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan para *founding fathers* itu dimulai. Tetapi segera ternyata bahwa mereka membentur tembok logika diplomasi internasional pasca Perang Dingin II. Indonesia adalah “milik” pihak yang kalah, yaitu Jepang, karena itu harus diserahkan kembali kepada pihak pemenang, yaitu Sekutu, sebagai “harta rampasan perang”. Percobaan melaksanakan pikiran-pikiran kenegaraan “revolusioner” itu berlangsung hanya tiga bulan, untuk kemudian diganti, secara terpaksa, dengan sistem lain yang oleh Bung Karno sangat tidak disukai, yaitu demokrasi parlementer model Eropa Barat, dengan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden simbolik, tanpa kekuasaan, dan Sutan Syahrir sebagai perdana menteri, pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Dalam salah satu tulisannya sebelum kemerdekaan, Bung Karno mengecam habis sistem parlementer sebagai sistem yang menguntungkan golongan berduit dari kalangan kaum borjuis dan menindas rakyat.

Tujuan penggantian sistem presidensial menjadi sistem parlementer itu memang telah menghasilkan suatu terobosan diplomatik. Didahului oleh perundingan Roem-Royen yang menghasilkan Konferensi Meja Bundar untuk penyerahan/pengakuan resmi kedaulatan Republik Indonesia dari Kerajaan Belanda, akhirnya, pada 27 Desember 1949, kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan resmi internasional. Namun begitu, penerapan sistem parlementer telah menimbulkan berbagai masalah nasional, yang bersumber dari ketidakstabilan negara dan pemerintahan yang silih berganti dalam jangka waktu pendek. Sebegitu jauh, penampilan terbaik “demokrasi liberal” parlementer itu adalah pada saat

pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, seorang tokoh Masyumi pengikut Mohammad Natsir, yang pada tahun 1955 berhasil melaksanakan pemilihan umum pertama dalam sejarah Republik Indonesia, suatu pemilihan umum yang sangat sukses. Di luar itu, sistem parlementer lebih banyak menyulitkan bangsa dan negara.

Tentang Demokrasi Terpimpin

Keadaan serba tidak menentu itu mendorong Bung Karno, Presiden (konstitusional) saat itu, untuk mengumumkan dekrit kembali ke UUD '45, pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu disusul dengan Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1959 berjudul “Menemukan Kembali Revolusi Kita”, populer dengan terjemah Inggrisnya, “*Rediscovery of Our Revolution*”. Bagi Bung Karno, yang dimaksudkan “menemukan kembali revolusi kita” dapat diringkaskan berupa pemerintahan yang kembali ke sistem presidensial dari sistem parlementer. Sejak itu Presiden, dalam hal ini Bung Karno, bukan lagi sekadar lambang negara, melainkan kepala pemerintahan. Sistem presidensial diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat, stabil dan berwibawa. Dengan begitu pembangunan nasional dapat dijalankan dengan mantap, seperti halnya Amerika yang berhasil menjadi negara industri modern pertama di dunia, berkat kestabilan sistem presidensial.

Tetapi Bung Karno agaknya menyalahpahami dan mencampurkan pengertian “pemerintahan yang kuat” dengan “kepemimpinan yang kuat”. “Pemerintahan” lebih mengacu kepada sistem, sedangkan “kepemimpinan” mengacu kepada perorangan. Karena pandangannya itu, Bung Karno mengubah sistem presidensial periodik lima tahunan menjadi sistem kepresidenan seumur hidup. Kemudian Bung Karno tidak lagi memandang dirinya cukup sebagai kepala pemerintahan atau ketua badan eksekutif negara, melainkan sebagai “pemimpin besar revolusi”. Pemerintahan

presidensial periodik yang seharusnya dilaksanakan dengan mencontoh dan mengembangkan sistem serupa yang sudah mapan di dunia, ia ubah menjadi “demokrasi terpimpin”. Beberapa partai politik yang dipersatukan oleh *platform* demokrasi modern, yaitu Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Parkindo dan Partai Katolik, didukung beberapa pribadi tokoh kalangan NU dan PNI, dan dengan restu Bung Hatta, membentuk gerakan “Liga Demokrasi” guna menggalang kekuatan politik untuk mencegah dan menghalangi Bung Karno meluncur ke lembah kediktatoran. Sebab rakyat mulai merasa kehilangan kebebasan sipilnya dan ekonomi merosot sampai hampir membangkrutkan Negara. Politik *grandiose* Bung Karno dengan, misalnya, ambisinya hendak mengganti PBB, Olimpiade, dan lain-lain, ikut memperburuk keadaan ekonomi bangsa hingga terasa tidak tertahankan lagi oleh rakyat. Dalam keadaan seperti itulah Bung Karno pada tahun 1965 jatuh *in disgrace* — lepas dari persoalan siapa sebenarnya yang berperan dalam proses penjatuhan itu, adil ataupun tidak adil. Sistemnya yang kemudian disebut “Orde Lama” harus memberi jalan kepada sistem lain yang disebut “Orde Baru”.

Jatuhnya Bung Karno *in disgrace* banyak diratapi tidak saja oleh bangsa Indonesia sendiri, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, khususnya “Dunia Ketiga”. Sebab Bung Karno adalah bapak sebenarnya Republik Indonesia merdeka, dan pejuang besar untuk membebaskan bangsa-bangsa terjajah. Namun tanpa sedikit pun mengurangi penghargaan kepada putra terbesar bangsa Indonesia itu, kita harus menarik pelajaran dari kelemahan manusiawi Bung Karno untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kepada Allah *swt* kita panjatkan sebaik-baik harapan dan doa untuk Bung Karno, bapak kita semua. [❖]

INDONESIA KITA (II)

Presiden Suharto (Jenderal Purnawirawan TNI) pengganti Presiden Sukarno, adalah seorang pribadi yang secara unik merupakan gabungan antara penampilan lahiriah yang lembut, hampir malu-malu, dengan sikap batin dan kemauan yang keras, hampir-hampir tidak kenal kompromi. Pak Harto menghela bangsa Indonesia keluar dari kepengapan sistem “Orde Lama” yang menyesak napas, menuju sistem “Orde Baru” yang menjanjikan perbaikan. Namun sayang, ternyata Pak Harto adalah campuran aneh antara segi-segi amat positif dan segi-segi amat negatif. Ia cukup rendah hati untuk menyadari dan mengakui bahwa ia tidak akan mengetahui segala-galanya berkenaan dengan kehidupan kenegaraan, khususnya perpolitikan dan perekonomian. Maka ia mengelilingi dirinya dengan sekelompok tenaga ahli yang merupakan golongan terdidik terbaik pada masa itu. Ia juga tampak sebagai orang yang suka belajar dan kecerdasan alamiahnya menjadikannya seorang yang cepat mengerti dan menguasai persoalan.

Kecerdasan alamiah Pak Harto itu juga membuatnya menjadi seorang ahli taktik dan strategi yang sangat piawai. Hal itu dibuktikan oleh kemampuannya bertahan dalam kekuasaan selama lebih dari 30 tahun, tanpa gejolak gawat seperti yang dialami Presiden Sukarno selama enam tahun setelah Dekrit 5 Juli 1959. Tetapi, berbarengan dengan itu, sisi-sisi mencemaskan dari Pak Harto juga menyembul ke permukaan. Jiwa dan gaya kemiliterannya tetap bertahan dalam suasana tanggung jawab pemerintahan sipil — jiwa kemiliteran yang pernah membuatnya sukses besar dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebelumnya.

Lemahnya Wawasan tentang “*Nation-State*”

Pak Harto agaknya kurang menghayati berbagai keharusan sebuah *modern nation-state* sebagaimana didambakan para *founding fathers*. Yaitu, keharusan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk menghasilkan *clean government* (sehingga praktik-praktik KKN yang sangat terkutuk itu dapat tercegah), juga prinsip-prinsip melindungi kebebasan-kebebasan sipil, membela hak-hak asasi manusia, menegakkan kedaulatan hukum, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendidikan untuk seluruh warga negara di semua pelosok wilayah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Suatu ironi besar pada Pak Harto, bahwa ia sedemikian kuat menyatakan diri dan sistemnya terikat dengan nilai-nilai Pancasila, namun ekspresi komitmennya kepada nilai-nilai itu hanya menghasilkan gejala verbalisme — yaitu gejala perasaan telah berbuat karena telah sering mengucapkan dan membicarakannya. Sementara itu, kehidupan sehari-hari marak dengan contoh-contoh tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan salah satu atau mungkin malah semua dari prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Demikian pula berkenaan dengan paham kemajemukan atau pluralisme. Sadar atau tidak, Pak Harto, sama dengan Bung Karno, menunjukkan ketidaksetiaan asas atau inkonsistensi yang mencemaskan. Selain tentang Pancasila, Pak Harto juga sangat rajin mengingatkan kita semua tentang prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Tetapi dalam banyak tindakan nyata, Pak Harto menunjukkan keinginan kuat untuk menyeragamkan kehidupan nasional, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Sistem-sistem pemerintahan daerah berangsur-angsur digiring untuk menerapkan sistem yang seragam, mengikuti model pemerintahan di Jawa.

Tentang Paham Kemajemukan

Di atas semuanya itu, sikap Pak Harto dan sistemnya yang menunjukkan kurangnya konsistensi berkenaan dengan paham kemajemukan, ialah penolakannya yang keras dan kategorikal terhadap ide tentang perlunya oposisi resmi terhadap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bagi yang sempat berusaha memahami lebih mendalam, ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* gubahan Empu Tantular itu dimaksudkan sebagai pengakuan positif kepada keanekaragaman orientasi keagamaan dalam masyarakat, karena hakikat dan tujuan semuanya itu satu dan sama, yaitu berbakti kepada Tuhan Yang Mahaesa dan berbuat baik kepada sesama makhluk: *Tan Hana Dharma Mangroa*, tidak ada jalan kebaikan yang mendua dalam tujuan.

Transformasi pandangan dasar itu ke bidang politik mengharuskan masyarakat untuk menerima secara positif adanya perbedaan orientasi politik, yang juga berarti harus tersedia ruang bagi kegiatan oposisi. Demokrasi menuntut adanya pandangan ini pada setiap pribadi, lebih-lebih pada setiap pribadi para pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah, dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-sikap mau benar sendiri lainnya. Demokrasi mengharuskan adanya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara sesama warga masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya sikap *all or nothing* (semua, atau tidak), *take it or leave it* (ambil, atau tinggalkan), yaitu sikap-sikap serba kemutlak-mutlakan. Sebaliknya, seperti dalam kaedah fiqih Islam (ushul fikih), yang berlaku ialah “yang tidak semua bisa didapat tidak semua harus ditinggalkan”. Maka demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima

oleh semua orang dan dilaksanakan, melainkan hanya sebagian saja. Sebab salah satu segi asasi demokrasi ialah “*partial functioning of ideas*”, “berlakunya hanya sebagian dari ide-ide”, karena selebihnya datang dari orang lain sesama peserta demokrasi.

Karena itu demokrasi juga menuntut adanya kesediaan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk kemungkinan terjadinya kompromi atas dasar pertimbangan prinsipil, bukan karena oportunisme. Semuanya itu merupakan inti dan semangat sebenarnya ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* dan *Tan Hana Dharma Mangroa*. Maka budaya-budaya daerah harus ditempatkan dengan penuh penghargaan begitu rupa sehingga tetap memperoleh pengakuan yang sah sebagai bentuk-bentuk kearifan lokal yang memperkaya budaya dan kearifan nasional. Dengan demikian, prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* mendorong berlangsungnya *cultural cross fertilization*, penyuburan silang budaya, guna menghasilkan budaya nasional hibrida yang lebih unggul dan lebih tangguh. Usaha penyeragaman, seperti biasanya dicoba dilakukan oleh penguasa totaliter, bertentangan diametral dengan prinsip amat mendasar dalam kehidupan bernegara kita yang adil, terbuka, dan demokratis.

Tentang Pembangunan Fisik Ekonomi

Kembali kepada soal Pak Harto, dengan bantuan penuh kaum teknokrat, khususnya para ahli ekonomi anggota “*Berkeley Mafia*”, telah berhasil menaikkan taraf hidup rata-rata bangsa Indonesia ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada masa “Orde Lama”, suatu hasil kerja yang sama sekali tidak mungkin dapat diabaikan atau diingkari. Tetapi, sebagaimana disiratkan dalam salah satu bait lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pak Harto dan Orde Baru baru menyentuh bagian “bangunlah badannya”, belum menyentuh bagian “bangunlah jiwanya”. Dengan meningkatkan taraf hidup rata-rata, Pak Harto telah membangun sisi badan lahir atau *wadang* bangsa. Tetapi dengan tidak memberi perhatian memadai kepada

keharusan-keharusan sebuah *modern nation-state* atau nasionalisme yang terbuka dan egaliter partisipatif, sengaja atau tidak Pak Harto telah menelantarkan pembangunan sisi jiwa batin bangsa. Padahal, menurut kearifan dalam lagu kebangsaan, sisi batin adalah primer, sedangkan sisi lahir adalah sekunder. Membangun sisi jiwa akan berimbas positif kepada pembangunan sisi badan, suatu imbas yang lebih besar dan lebih positif daripada imbas pembangunan sisi badan kepada sisi jiwa. Ketimpangan antara yang lahir dan yang batin dan tiadanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat menyalahi prinsip-prinsip tatanan hidup manusia yang benar, dan akan membawa kesulitan besar kepada suatu bangsa. Itulah, dengan meminjam ungkapan Bung Karno, hukum besi sejarah umat manusia. Bung Karno telah tertimpa hukum besi itu, dan selang sekitar 30 tahun sesudahnya, hukum yang sama menimpa Pak Harto. Kita harus menarik pelajaran dari semua itu.

Mengacu kepada drama kosmis dalam Kitab Suci, sesungguhnya tidak ada apa yang dinamakan “pohon khuldi” (*syajarat al-khuld*), yaitu pohon kehidupan abadi di dunia; juga tidak ada pohon kekuasaan yang tidak bakal runtuh (*mulk-un lâ yablâ*). Pohon serupa itu hanya ada dalam keterangan palsu setan tentang pohon terlarang di Surga. Dengan keterangannya itu setan berhasil menggoda Adam dan Hawa, sehingga keduanya melanggar pesan Tuhan untuk tidak mendekati pohon terlarang, dan memakan buah pohon itu. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir Tuhan turun dari Surga. Nafsu untuk hidup abadi yang kemudian mendorong orang untuk menumpuk kekayaan “tujuh turunan” dan ambisi untuk memperoleh kekuasaan dan berkuasa selama-lamanya demi kekuasaan itu sendiri adalah perbuatan “memakan buah pohon hidup abadi dan kekuasaan selama-lamanya” seperti dibisikkan setan, dan melanggar pesan Tuhan jangan mendekati pohon terlarang. Pelanggaran itu pasti akan berakhir dengan kenistaan. Sejarah umat manusia banyak menyaksikan pelanggaran serupa itu, dengan akibat runtuhnya rezim-rezim, dinasti-dinasti, dan bangsa-bangsa. Sebab semuanya itu akan menjerumuskan masyarakat

kepada kemerosotan moral. Kemerosotan moral dengan gejala gaya mewah berlebihan itulah penyebab utama hancurnya negara. Sejarawan Edward Gibbon (1734-1794) juga menggunakan pandangan itu untuk menerangkan sebab-sebab runtuhnya Kekaisaran Romawi, dalam karya klasiknya, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*.^[❖]

INDONESIA MENUJU MASA DEPAN

Lengsernya Pak Harto beserta Orde Barunya telah meninggalkan warisan yang memudahkan dan sekaligus menyulitkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah kita bicarakan keberhasilan Pak Harto dan Orde Barunya dalam bidang pembangunan fisik. Dalam hal fasilitas yang dihasilkannya, bangsa Indonesia memperoleh kemudahan relatif dalam kehidupannya. Tetapi, di sisi lain, kemudahan relatif itu juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang merusak, seperti tersedianya dana untuk dikorupsi dan digunakan secara tidak benar. Di masa Bung Karno dan Orde Lamanya korupsi juga terjadi, namun dengan efek perusakan langsung yang relatif kecil, karena volume absolut korupsi itu juga kecil. Di masa Pak Harto efek merusak dari korupsi itu menjadi berlipat ganda, sebanding dengan volume absolut dan relatif yang sangat besar berlipat ganda pula.

Hambatan Membangun Kembali Negara

Ibarat sebuah bangunan yang telah runtuh menjadi rata dengan tanah, berakhirnya sistem Pak Harto memudahkan bangsa Indonesia untuk membangun kembali negaranya dengan lebih bebas. Tetapi puing-puing yang menggantung itu ternyata tidak gampang menyingkirkannya dari lahan tempat bangunan baru yang akan didirikan, apalagi banyak pihak yang masih memanfaatkannya dan bermaksud untuk memanfaatkannya terus karena tidak mampu

melihat kemungkinan mendirikan bangunan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan fondasi yang dahulu telah dirancang oleh para pendiri negara. Maka, secara metaforik, membersihkan unsur-unsur sisa sistem Orde Baru menjadi amat sulit, karena harus menanganai tumpukan puing yang menggantung dan menghadapi penghuni-penghuni liar baru yang masih bertahan hendak memanfaatkannya. Karena itu, sebagaimana telah dikemukakan di depan, mutlak diperlukan adanya peneguhan kembali komitmen dan pembaruan tekad bersama, dalam semangat persatuan dari Bung Karno, “*samen bundeling van alle krachten van de natie*”, “pengikatan bersama seluruh kekuatan bangsa”.

Berbagai pikiran terbaik tentang bangsa dan negara telah diletakkan oleh para bapak pendiri. Tetapi sampai sekarang pikiran-pikiran itu belum seluruhnya terwujudkan dalam kenyataan. Sebagian kecil yang telah terwujudkan, seperti persatuan seluruh tanah air, terancam untuk mengalami pembatalan karena ulah kita sendiri yang tidak memberi perhatian memadai kepada pikiran-pikiran selain masalah persatuan, seperti pikiran tentang kerakyatan dan keadilan sosial. Mengabaikan aspirasi rakyat dengan kekuasaan otoriter telah mendorong mereka kepada sikap-sikap tidak mau ikut bertanggung jawab atas keadaan bangsa dan negara. Mereka kehilangan rasa ikut punya dan ikut serta, menjadi apatis, tidak peduli. Pemerintahan otoriter selama berpuluh-puluh tahun, yang menghalangi warga negara untuk dengan bebas menyatakan pikiran, berkumpul dan berserikat, telah mematikan sisa-sisa kemampuan mengambil inisiatif dari bawah. Karena pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah bangsa dan negara yang selalu berpola dari atas ke bawah (*top-down*), rakyat menjadi pasif, hanya bersikap menunggu apa yang bakal terjadi dari atas. Korelasi pendekatan serba dari atas ke bawah ialah kuatnya sentralisme, yang mendorong terjadinya ketimpangan antara pusat dan daerah. Disertai sikap-sikap tidak adil yang cukup mencolok berkenaan dengan pembagian kembali kekayaan nasional, efek negatif sentralisme menjadi salah satu sebab munculnya berbagai gejolak daerah.

Dalam hal pembagian kembali kekayaan nasional itu dan pemerataannya antara seluruh warga negara, konon kita termasuk beberapa negara yang paling tidak adil di muka bumi. Lepas dari benar atau tidaknya penilaian itu, namun jelas bahwa negara kita telah berkembang menjadi negara yang sangat timpang, secara diametral berlawanan dengan cita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bangsa yang melawan prinsipnya sendiri tidak akan lama bertahan! Keadilan dan keseimbangan (*al-mîzân*) adalah hukum jagad raya, dan manusia dipesan jangan sampai melanggar keadilan dan keseimbangan, biar pun dalam bidang kehidupan yang sekecil-kecilnya. Sebab, melanggar keadilan dan keseimbangan adalah tindakan melawan hukum kosmos, sehingga bencana yang diakibatkan pun akan berdimensi kosmis, bersifat menyeluruh. Hukum keadilan dan keseimbangan adalah hukum alam dari Tuhan yang beroperasi tanpa tergantung kepada keinginan manusia (*objective*) dan tidak bisa diubah (*immutable*). Maka negeri yang adil dan berkeadilan akan tegak berdiri, dan negeri yang tidak adil dan tidak berkeadilan akan runtuh, lepas dari soal siapa dan apa agama penduduknya.

Masalah Korupsi dan Ketuhanan

Berkenaan dengan hal ini, maka sebagai bangsa yang bagian terbesar dari penduduknya adalah kaum Muslim, kita tidak dibenarkan bersandar hanya kepada kenyataan statistik jumlah penganut Islam. Justru, sejalan dengan hukum "*corruptio optimi pessima*" ("kejahatan oleh orang baik adalah kejahatan yang terburuk", "*corruption by the best is the worst*"), maka pelanggaran prinsip keadilan dan keseimbangan oleh kaum Muslim akan mendatangkan malapetaka berlipat ganda. Hukum yang sama berlaku atas para penganut setiap agama, sebab setiap agama juga mengajarkan prinsip yang sama. Karena itu para penganut setiap agama dituntut untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya ajaran Tuhan dalam masing-

masing agama itu. Tidak melaksanakan ajaran Allah dalam masing-masing agama itu adalah kekafiran, kezaliman, dan kefasikan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, inti pokok tugas suci para nabi ialah pembebasan manusia dari perbudakan oleh sesamanya dengan memusatkan penghambaan diri dan pengabdian mutlak hanya kepada Tuhan Yang Mahaesa, diikuti dengan perlawanan kepada tirani, dan dengan menegakkan keadilan dan keseimbangan (*balance*). Perlawanan terhadap tirani dan keimanan kepada Tuhan adalah pegangan hidup yang kukuh, suatu kebenaran yang jelas berbeda dari kepalsuan, dan manusia dipersilakan dengan bebas untuk memilih sendiri, sehingga tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sebab tindakan memaksa itu sendiri adalah tindakan tiranik. Sistem demokratis adalah antitesa dari sistem tiranik, dengan dimensi metafisis pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Untuk Indonesia, jalan pikiran di atas dianut oleh Bung Hatta, salah seorang tokoh pendiri bangsa yang berpandangan paling baik mengenai kenegaraan. Menurut Bung Hatta, semua kegiatan kenegaraan harus berlangsung di bawah sinar Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana sila pertama itu menyinari empat sila yang lain dalam Pancasila. Dengan begitu kegiatan kenegaraan kita memiliki dasar metafisis, sehingga menghasilkan komitmen yang total, yang tumbuh dari kesadaran bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah bermakna, dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan banyak bidang kehidupan lain, pandangan itu sebenarnya telah disadari juga oleh sebagian kalangan pemerintah. Pak Harto, misalnya, menetapkan semacam ketentuan bahwa para pejabat negara harus bertakwa kepada Tuhan. Kecuali bahwa takwa seseorang adalah rahasia Allah yang tidak dapat diukur dengan angka dan tidak dapat diuji sesama manusia, penetapan ketentuan itu dapat dibenarkan jika diartikan bahwa para pejabat negara harus melaksanakan tugas kewajibannya dalam semangat kesadaran Ketuhanan sebagai sikap kejiwaan pribadinya yang tersimpan dalam rahasia lubuk hatinya.

Sesuai dengan petunjuk agama bahwa asas hidup yang benar, termasuk hidup kenegaraan, ialah takwa dan rida Allah, ketentuan petugas negara harus bertakwa berarti bahwa semua tindakan melaksanakan kewajiban kenegaraan harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan hadir dalam setiap kegiatan. Tuhan mengetahui, mengawasi, dan akan meminta pertanggungjawaban setiap tindakan dan perilakunya serta dampak-dampaknya. Dengan kesadaran itu, seseorang akan terbimbing ke arah budi pekerti luhur atau akhlak mulia, prasyarat bagi kebahagiaan lahir dan batin. Budi pekerti luhur adalah salah satu wujud kedirian manusia yang paling tinggi. Di hadapan budi pekerti luhur semua kekuatan, baik fisik maupun mental, juga kekuasaan, tidak akan berdaya: “*Suro-diro jayaningrat lebur dening pangastuti*”, “kekuatan jiwa-raga dan kekuasaan lebur oleh budi pekerti luhur”.

Dalam hal itu kita melihat banyak orang dari berbagai kalangan di antara kita yang menunjukkan kesenjangan antara yang diucapkan dan yang dikerjakan. Tidak saja kita secara formal menganut suatu agama yang mengajarkan takwa, bahkan banyak dari kita yang merasa, atau mengaku, telah bertakwa kepada Tuhan, namun bertingkah laku seolah-olah tidak ada Tuhan, suatu bentuk kekafiran yang nyata! Karena itu kemudian kita menampilkan diri sebagai orang yang fasik (*fâsiq*), bertingkah laku tanpa peduli kepada ukuran-ukuran moral, *al-akhlâq al-karîmah* atau budi pekerti luhur. Sekali lagi, itu semua merupakan contoh “*corruption optimi pessima*”.

Dari sudut pandang itulah muncul salah satu alasan penilaian bahwa kita sedang mengalami kemerosotan moral di antara kita. Seperti dengan jelas dikemukakan Gibbon berkenaan dengan runtuhnya kekaisaran Romawi, kemerosotan moral adalah penyebab hancurnya bangsa-bangsa di dunia. Karena itu bangsa kita, dalam perjalanannya menuju masa depan, sangat memerlukan tindakan penyelamatan penuh kesungguhan, khususnya dalam usaha menegakkan standar moral yang setinggi-tingginya.

Indonesia sebagai “Soft State”

Sudah lama Karl Gunnar Myrdal (1898-1987) menilai negara kita sebagai “*soft state*”, “negara lunak”, yaitu negara yang pemerintahan dan warganya tidak memiliki ketegaran moral yang jelas, khususnya moral sosial-politik. Kita umumnya mengidap kelembekan (*leniency*), sikap serba memudahkan (*easy going*), sehingga tidak memiliki kepekaan cukup terhadap masalah penyelewengan dan kejahatan seperti korupsi, lebih-lebih korupsi dalam bentuk *conflict of interest*. Maka usaha menegakkan standar moral merupakan salah satu urgensi bagi bangsa kita. Sekali lagi lemahnya standar moral inilah yang menyebabkan kita sekarang mengalami krisis multidimensional, tidak semata-mata krisis finansial-moneter seperti kebanyakan negara tetangga kita. Akibatnya, krisis terus berlanjut, sementara negara-negara tetangga telah berhasil mengatasinya. Louis Kraar, seorang pengamat negara-negara industri baru di Asia Timur, pada tahun 1988 sudah meramalkan bahwa Indonesia dalam jangka waktu 20 tahun akan menjadi halaman belakang (*back yard*) Asia Timur, ditinggalkan oleh negara-negara tetangga yang berkembang menjadi negara-negara maju. Sebabnya ialah etos kerja yang lembek dan korupsi yang gawat (*lousy work ethics and serious corruption*).

Kiranya tidak terlalu salah jika dikatakan bahwa saat-saat ini gejala negara kita sebagai “halaman belakang” Asia Timur itu sudah mulai tampak. Indonesia semakin jauh tertinggal oleh tetangga-tetangganya di *Pacific Rims*. Maka ungkapan “krisis multidimensional” memang merupakan gambaran tentang kerusakan bangsa dan negara yang menyeluruh. Kerusakan yang dimulai dengan krisis finansial moneter itu, seperti pada banyak negara yang juga mengalaminya, seharusnya dapat dibatasi hanya sebagai krisis pada suatu bagian tertentu dari ekonomi nasional. Tetapi ternyata sumbernya tidak hanya ada dalam bidang finansial-moneter semata, melainkan dalam pengelolaan yang lemah (*weak governance*) dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, sehingga krisis tersebut merambah dan meliputi semua segi kehidupan bangsa. [❖]

PLATFORM MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA

Dari semua uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih dalam pertumbuhan “penjadian diri” (*in making*). Dinamika perkembangan Indonesia sebagai bangsa dan negara, dengan *up-and-down* dan *trial-and-error*-nya, mengakibatkan banyak kejadian yang tidak terduga sebelumnya, dan kita cenderung memandangnya sebagai sesuatu yang “spesial”. Padahal boleh jadi bahwa kejadian-kejadian tak terduga itu merupakan sesuatu yang tak terhindarkan, mungkin sebuah kewajaran bagi bangsa dan negara muda yang sedang tumbuh dengan cepat.

Tetapi dari logika deretan kejadian-kejadian itu kita juga dapat melihat kaitan logis antara krisis yang sekarang menimpa kita dengan kejadian-kejadian tersebut. Sekalipun cara pandang seperti itu bisa terperosok kepada semacam apologia untuk kejadian-kejadian itu, namun rasanya diperlukan untuk mendasari sikap yang lebih obyektif. Terhadap kejadian-kejadian masa lalu yang sudah menjadi “takdir” Ilahi dan kini tertutup itu kita bisa menyikapi dengan semangat “*let bygones be bygones*”. Tetapi terhadap perjalanan perkembangan bangsa dan negara yang berlangsung di masa sekarang dan bersambung dengan masa mendatang, kita harus menyikapinya sebagai persoalan yang terbuka, yang dapat dicampurtangani dan diarahkan. Justru tantangannya ialah bagaimana mencampurtangani perjalanan perkembangan bangsa dan negara itu dan mengarahkan dengan sebaik-baiknya.

Para tokoh pendiri negara telah merintis usaha penggalian ide-ide terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, ide-ide itu belum semuanya terlaksana dengan baik. Bagian-bagian yang telah terlaksana, khususnya wujud negara Republik Indonesia itu sendiri, merupakan modal utama bagi kita, sebagai peninggalan baik para patriot nasionalis pendiri negara itu. Tetapi bagian-bagian yang belum terlaksana, seperti pembangunan nasional demi maslahat umum dengan keadilan dan kejujuran, merupakan sumber berbagai krisis yang melanda kita sekarang ini. Disebabkan oleh faktor kemudahan yang juga berarti kekurangmatangan kita semua sebagai bangsa baru, ide-ide terbaik para pendiri negara itu, dalam pelaksanaannya sering berhadapan dengan apa yang dikatakan Bung Hatta sebagai jiwa-jiwa kerdil sebagian pemimpin kita. Maka menjadi kewajiban kita semua untuk mendewasakan diri, sehingga mampu mengakhiri krisis-krisis yang terjadi dan memulai kembali pembangunan negara dengan menggunakan aset-aset yang telah tersedia. Dengan latar belakang keadaan yang kita alami saat ini, untuk memulai pembangunan kembali bangsa dan negara diperlukan beberapa agenda dasar atau *platform* yang sifatnya mendesak.

1. Mewujudkan “*good governance*” pada semua lapisan pengelolaan negara

Telah dibahas pada bagian terdahulu, bahwa yang pertama-tama diperlukan untuk mengakhiri krisis besar sekarang ini ialah bagaimana mengelola negara secara baik dan benar, berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan (*running government and exercising power*). Tumpukan krisis banyak segi yang menggunung sekarang ini dapat diibaratkan sebuah gunung es raksasa sedemikian besar, sehingga sulit dihancurkan dari kaki dasarnya. Karena gunung es adalah benda mengambang, maka setiap kali puncaknya dipotong atau dihancurkan, setiap kali pula akan menyembul puncak baru ke permukaan. Tetapi gunung es

akan hancur meleleh bila ia bisa diseret dari tempat tumbuhnya di zona dingin sekitar daerah kutub menuju panasnya air laut di zona tropis. Metafora gunung es kiranya dapat sedikit memberi gambaran tentang betapa mustahilnya mengatasi persoalan krisis banyak segi itu jika dilakukan hanya secara parsial, tidak menyeluruh.

Pengelolaan yang benar dan baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dapat diibaratkan sebagai laut zona tropis yang panas, yang akan meluluhkan gunung es budaya KKN. Dalam hal ini diperlukan kekuatan yang besar untuk dapat menyeret gunung es itu ke sekitar khatulistiwa. Kekuatan besar itu ialah tekad bersama seluruh komponen bangsa, untuk secara bahu-membahu menanggung beban tanggung jawab penyelesaian masalah nasional, dan penyatuan seluruh kekuatan nasional dalam semangat “*samen bundeling van alle krachten van de natie*”.

Energi yang dihasilkan oleh tekad yang diperbarui dengan dukungan seluruh komponen bangsa itu akan menjadi efisien dan efektif serta terfokus kepada sasaran jika terbentuk jajaran pimpinan nasional yang sanggup memberi teladan, berdiri di barisan paling depan, memulai dengan diri sendiri. Karena itu kepemimpinan tersebut harus benar-benar otentik, menunjukkan ketulusan kesatuan antara ucapan dan tindakan, antara seruan dan pelaksanaan, antara tekad dan perbuatan. Bangsa kita memerlukan suatu jenis kepemimpinan yang memiliki visi tentang masa depan bangsa, seseorang dengan intuisi kepemimpinan, *savvy* atau *savoir-faire* (kearifan batin, *bashîrah*). Ia juga harus aktif-agresif dalam usaha melaksanakan visinya itu, meskipun ia harus bertindak cukup pragmatis berdasarkan realita dalam masyarakat dengan segala kemungkinan dan hambatannya. Pimpinan itu juga harus tetap setia memelihara amanat dan kepercayaan umum, dan berperan sebagai pembina kesepakatan (*concensus builder*) antara berbagai komponen bangsa.

Kepemimpinan yang berwibawa akan tampil menjadi lambang harapan bersama, sumber kesadaran arah (*sense of direction*) dan

kesadaran tujuan (*sense of purpose*) dalam hidup bernegara, dan menjadi dorongan rakyat untuk dengan penuh kerelaan mendukung dan mengambil bagian dalam perjuangan nasional. Dukungan yang menyeluruh diperlukan untuk mewujudkan keharusan-keharusan *good governance*, yaitu terbukanya partisipasi umum dalam proses-proses pelaksanaan pemerintahan serta penggunaan kekuasaan; transparansi dalam semua proses itu sehingga tidak terjadi kegiatan kenegaraan yang berlangsung secara tersembunyi, khususnya yang bersangkutan dengan penanganan kekayaan umum milik bangsa dan negara; akuntabilitas (*accountability*), yaitu kesanggupan mempertanggungjawabkan semua proses dan tindakan itu kepada rakyat secara terbuka.

Mewujudkan *good governance* menjadi perkara mustahil tanpa keikutsertaan seluruh rakyat atas dasar komitmen bersama, menjunjung tinggi asas negara-bangsa (*nation-state*) dengan pembedaan yang tegas antara urusan privat dan urusan publik, antara harta milik *pribadi* dan harta milik umum. Tidak ada toleransi terhadap penyalahgunaan kekayaan negara, biar pun ibaratnya hanya bernilai sepeser, dan tanpa memandang siapa pun yang melakukannya. Berkenaan dengan masalah tersebut, misalnya, sebagai contoh, kita secara keseluruhan masih lemah sekali dalam soal kesadaran tentang penyelewengan transaksi berbentuk *conflict of interest*, akibat adanya unsur patrimonialisme dan feodalisme yang masih kuat dalam struktur sosial-kultural bangsa kita. Maka pengawasan kepada kemungkinan penyalahgunaan kekayaan negara harus dilakukan secara ekstra ketat dan keras, disertai penyadaran bahwa transaksi yang mengandung *conflict of interest* adalah sesungguhnya jenis kejahatan korupsi.

Perjalanan pertumbuhan bangsa kita yang penuh kesulitan antara lain disebabkan oleh adanya hambatan feodalisme. Susunan masyarakat feodalistik bangsa-bangsa Asia Tenggara terbukti oleh adanya identifikasi diri dengan kata ganti nama pertama tunggal yang mengandung nama budak, seperti “saya” (sahaya), “*ambo*” (hamba), “*budak*” dan “*abdi*”, “*kula*” atau “*kawula*”. Sebab memang

ciri utama feodalisme (*feodalism*) ialah “pengkawulan” rakyat kepada “gusti”, dengan hirarki tinggi-rendah yang sedemikian menguasai hidup orang banyak. Feodalisme juga bercirikan penguasaan tanah (*fiefdom*) oleh seorang pemilik yang melaksanakan pembagian hasil yang sangat timpang antara pemilik itu dan penggarap. Dari struktur sosial-ekonomi serupa itu, yang muncul ialah tradisi upeti, baik secara paksa oleh “gusti” kepada “kawula” maupun sukarela oleh “kawula” kepada “gusti”. Diyakini banyak orang bahwa merajalelanya kejahatan korupsi di negeri kita adalah kelanjutan tradisi upeti masyarakat feodal itu, ditambah dengan budaya suap-menyuap dan perjudian oleh kalangan yang tak peduli dengan standar moral karena mengejar keuntungan kebendaan semata. Ditambah dengan mengendornya dimensi keruhanian dalam pola hidup “modern” yang materialistik, orientasi hidup kebendaan, dikaitkan dengan feodalisme, menjadi tolok ukur tinggi-rendahnya “gengsi” dan “harga diri” banyak orang. Dan jika ada “pelarian” dari materialisme yang gawat itu, maka terdapat indikasi bahwa yang menarik hati bukanlah agama yang bersemangat kebenaran yang lapang (*hanîfyah sambah*), tetapi justru kultus-kultus berbahaya.

Karena itu pembangunan demokrasi, dan beserta dengan itu pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, mensyaratkan dihancurkannya feodalisme. Sekalipun belum tentu merupakan contoh yang dapat ditiru di negeri kita, tetapi revolusi kebudayaan di Republik Rakyat Cina merupakan suatu usaha revolusioner untuk menghancurkan unsur-unsur tidak sehat dalam masyarakat, khususnya feodalisme. Sekali lagi, pemberantasan KKN akan sangat banyak tergantung kepada seberapa jauh kita mampu memberantas feodalisme dan budaya suap-menyuap.

2. Menegakkan supremasi hukum dengan konsisten dan konsekuen

Pelaksanaan *good governance* diharapkan akan mendorong pelaksanaan asas hukum dan keadilan secara tegar, tegas, dan teguh.

Sebaliknya, tanpa tegaknya asas hukum dan keadilan, pelaksanaan *good governance* adalah mustahil. Melemahnya kesadaran arah dan tujuan hidup bernegara yang menggejala saat ini berdampak sangat negatif kepada usaha penegakan hukum dan keadilan. Karena beroperasinya praktik suap-menyuap yang terkutuk itu, masyarakat semakin banyak kehilangan kepercayaan kepada proses-proses penegakan hukum dan keadilan oleh aparat-aparat yang bersangkutan. Lepas dari benar-tidaknya banyak sinyalemen dalam masyarakat tentang dunia peradilan kita yang telah terjerat oleh jaringan penyimpangan dan manipulasi hukum yang terorganisasi (semacam *organized crime*), segi penegakan hukum memang merupakan titik paling rawan dalam kehidupan kenegaraan kita. Dalam masyarakat terdapat banyak indikasi bahwa tindakan kejahatan berlangsung dengan lindungan helat hukum (*legal device*) sehingga mendapatkan legitimasi legal palsu.

Sebagaimana telah dicoba jelaskan tentang makna konsep *madīnah* atau *medinat* di bagian depan, ketaatan kepada hukum dan aturan adalah pangkal keadaban, *madanīyah* atau *civility*. Sebaliknya, "*lawless society*" atau "masyarakat hukum rimba", adalah ciri masyarakat tak berkeadaban, yang menuju kepada kehancuran. Seperti dalam rimba, dalam keadaan kacau dan lemah hukum, yang berfungsi dalam masyarakat ialah kekuatan dan kekuasaan sewenang-wenang, dan negara hukum (*rechtsstaat*) yang dicita-citakan para pendiri negara berubah menjadi negara kekuasaan (*machtsstaat*). Yang lemah tidak mampu bertahan hidup menghadapi yang kuat, suatu bentuk Darwinisme dalam kehidupan sosial-politik, dengan hukum "*survival of the fittest*" melalui proses "*natural selection*" yang brutal. Berbeda dengan Darwinisme, terwujudnya kebaikan dalam kehidupan sosial manusia senantiasa memerlukan campur tangan kepemimpinan yang benar dan sadar tugas kemanusiaan. Kearifan Abu Bakar patut dijadikan rujukan di sini, ketika Khalifah itu dalam pidato baiatnya mengatakan, "*Yang kuat di antara kalian bagiku adalah lemah, sampai aku ambil dari*

mereka hak-hak kaum miskin; dan yang lemah di antara kalian bagiku adalah kuat, sampai aku berikan kepada mereka hak-hak mereka”.

3. Melaksanakan Rekonsiliasi Nasional:

a. Menarik pelajaran pahit dari masa lalu dengan tekad tidak mengulanginya

Pengikatan bersama seluruh kegiatan bangsa dengan sendirinya mensyaratkan adanya rekonsiliasi nasional, atas dasar sikap-sikap yang diperbarui, antara sesama anggota masyarakat, yaitu sikap-sikap saling hormat dan saling percaya. Nilai-nilai sosial itu, yang kebenarannya seharusnya dapat disikapi sebagai kewajiban, saat-saat sekarang menjadi bertambah sulit diwujudkan, disebabkan oleh gejolak perkembangan bangsa dan negara dalam sejarah kemerdekaan yang diwarnai kekerasan, perlawanan kepada hukum dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Harus diakui bahwa usaha rekonsiliasi akan berhadapan dengan tembok memori kolektif yang penuh dengan stigma dan trauma. Memori kolektif serupa itu biasanya disertai dengan perasaan dendam kolektif, yang menghalangi tumbuhnya sikap saling mengerti antara berbagai komponen sosial. Pengalaman-pengalaman pahit di masa yang telah lalu adalah sangat berharga bagi kita sebagai bahan pelajaran untuk tidak diulangi lagi di masa mendatang. Mungkin pengalaman-pengalaman itu tidak boleh dilupakan — sebab melupakannya akan membuka pintu pengulangan — tapi demi masa depan yang lebih baik, kita semua dari kalangan yang berbeda-beda harus mulai merintis usaha yang menumbuhkan sikap-sikap saling mengerti posisi masing-masing, kemudian diteruskan menjadi sikap-sikap saling percaya dan saling menghargai. Kita harus belajar menanamkan dalam diri kita masing-masing pandangan bahwa manusia itu pada dasarnya baik, sebelum terbukti jelas bahwa ia berperangai jahat.

b. Menatap masa depan dengan pendamaian dan penyatuan seluruh kekuatan bangsa.

Kesemuanya itu dilakukan tanpa memelihara memori kolektif penuh stigma dan trauma. Maka dari itu tarik-menarik antara kedua sikap dilematis antara “tidak melupakan” dan “memaafkan” itu hendaknya diarahkan kepada tumbuhnya secara berangsur-angsur sikap saling mengerti posisi masing-masing dan saling memahami persoalan, menuju kepada sikap saling hormat dan saling percaya. Alternatif atau pilihan lain untuk itu semua ialah dibiarkannya rentetan *vendetta* sebagai akibat dari rentetan dendam dan balas dendam, suatu hal yang akan menghabiskan energi nasional dan menyeret rakyat kepada kesengsaraan tanpa berkeputusan. Maka guna menyiapkan masa depan itu, tidak ada jalan lain kecuali harus diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dan menyatukan kembali semua pihak yang terlibat dalam konflik-konflik masa lalu. Pendamaian dan penyatuan antara manusia (*ishlâh-un bayn-a 'l-nâs*), dan antara seluruh kekuatan bangsa adalah langkah pilihan yang tidak mungkin dihindari. Tetapi langkah pilihan itu sungguh memerlukan kebesaran jiwa dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan sendiri. Tindakan besar memerlukan tekad yang besar, antara lain tekad untuk berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara.

c. Menegaskan garis pemisah antara masa lalu dan masa mendatang.

Jadi, barangkali memang tidak dapat, dan jangan sampai, kita melupakan kejadian-kejadian masa lalu yang jelas-jelas membawa bangsa dan negara kepada kesulitan besar. Melupakan sama sekali suatu peristiwa negatif masa lalu akan menghasilkan sikap lalai dan gagal menarik pelajaran dari sejarah. Kelalaian dan kegagalan itu sendiri dapat membahayakan masa depan. Tetapi memaafkan harus tetap terbuka sebagai suatu pilihan

atau opsi yang suatu saat mungkin harus diambil, dan kita harus bertekad memulai kehidupan nasional yang baru, yang sejauh mungkin terlepas dari trauma-trauma masa lalu. Karena itu diperlukan rekonsiliasi antara berbagai kelompok yang pernah bertikai, atas dasar saling pengertian dan kepehaman tentang posisi masing-masing — “*let bygones be bygones*”. Tetapi terhadap pelanggaran di masa mendatang harus dikenakan tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara tegas, tegas, dan tidak kenal kompromi. Suatu garis demarkasi yang harus ditarik dengan tegas untuk memisahkan antara masa lalu dan masa kini serta masa datang, suatu garis yang sama sekali tidak boleh dilangkahi. Bangsa-bangsa yang berhasil memberantas korupsi selalu ditandai oleh adanya ketegasan dan ketegaran penegakan hukum, khususnya untuk suatu pelanggaran yang terjadi sesudah “garis demarkasi”. Dalam hal ini, Indonesia pun tidak akan terkecuali.

4. Merintis Reformasi Ekonomi dengan mengutamakan pengembangan kegiatan produktif dari bawah.

Semua usaha itu tidak akan berjalan seiring dengan adanya kemelaratan rakyat. Kemelaratan adalah salah satu penyebab utama kejahatan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang mampu, kejahatan yang dilakukan oleh rakyat tak mampu dapat terjadi karena dorongan kemelaratan. Sekalipun tetap harus dipandang sebagai kejahatan, pelanggaran hukum oleh rakyat yang kelaparan harus dipandang sebagai persoalan tanggung jawab bersama, bukan semata tanggung jawab pelaku kejahatan itu sendiri saja. Contohnya ialah kebijakan Khalifah Umar untuk menolak menghukum seorang pencuri di masa paceklik. Dengan tindakannya itu, Umar menunjukkan keinsyafannya bahwa kemelaratan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya, paling tidak dengan tidak menghukum orang yang terpaksa melakukan kejahatan, karena benar-benar akibat dorongan kebutuhan yang sangat

mendesak. Sebab pemerintah bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan umum sehingga tercegah kejahatan atas dorongan kemelaratan.

Para tokoh pendiri negara telah menetapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan negara Republik Indonesia. Karena itu pemerintah wajib berusaha melaksanakan tugas pembagian kekayaan nasional (*redistribution of nation's wealth*) secara adil dan merata. Usaha itu, dalam konteks perkembangan bangsa dan negara yang sedang dalam keadaan kritis saat ini, dilakukan dengan memerangi tindakan penyelewengan kekayaan nasional, khususnya kejahatan korupsi. Serentak dengan itu, kita harus mengembangkan aktivitas ekonomi dengan tekanan pada usaha mendorong tumbuhnya inisiatif produktif dari bawah. Tantangan terhadap usaha ini ialah melemahnya kemampuan warga negara pada umumnya untuk mengambil inisiatif dari bawah, di bidang apa pun, akibat empat dasawarsa kehidupan sosial-politik pemerintahan otoriter dan totaliter yang merampas kebebasan sipil, sejak awal masa Bung Karno sampai akhir masa Pak Harto. Menarik pelajaran dari pengalaman berbagai negara, baik yang telah mapan perkembangannya maupun yang sedang tumbuh kuat menjadi negara maju, krisis multidimensional yang kita derita saat ini tidak akan berakhir tanpa inisiatif dari bawah. Sekalipun kita tidak menganut paham *laissez faire laissez passer*, namun suatu bentuk keswastaan dan keswadayaan dalam kegiatan ekonomi, dengan distribusi beban tanggung jawab kepada seluruh warga negara, diperlukan tidak hanya untuk sehatnya bangunan ekonomi itu sendiri, tetapi juga untuk kemantapan demokrasi dan keadilan. Pengalaman bangsa kita yang baru lalu, dengan sistem ekonomi berat dari atas, telah membuktikan bahwa pola pendekatan *top-down* telah menciptakan lahan subur untuk berbagai bentuk penyelewengan, khususnya kejahatan korupsi, kolusi antara “penguasa dan pengusaha”, dan praktik-praktik yang mengandung pertentangan kepentingan

(*conflict of interest*) seperti paham kefamilian atau nepotisme dan perkoncoan atau kroniisme. Pemberian kesempatan dalam pembagian kekuasaan atau fasilitas kepada anggota keluarga atau kawan sendiri disebut nepotisme dan kroniisme jika dilakukan tidak karena pertimbangan kemampuan yang teruji, tetapi hanya karena pertimbangan hubungan kekeluargaan atau perkawanan itu semata.

Dalam masyarakat kita terdapat kelompok-kelompok ekonomi nasional patriotik dengan semangat keswastaan dan keswadayaan yang tinggi. Sejauh ini, pemerintah umumnya sangat sedikit memberi perhatian wajar kepada kelompok-kelompok swasta-swadaya itu. Bahkan, disebabkan pertimbangan politik atau lainnya, yang sering terjadi ialah adanya sikap-sikap beberapa kalangan penguasa untuk mengabaikan dan menghambat perkembangan kelompok ekonomi swasta-swadaya. Dalam suasana korupsi yang menggejala hebat sekarang ini, dunia ekonomi papan bawah tentu tidak menarik bagi pihak-pihak tertentu, karena tidak dapat dijadikan ladang pemerasan dan manipulasi bagi mereka yang bermental korup. Seharusnya sentra-sentra kegiatan keswastaan dan keswadayaan produktif papan bawah dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah, dalam semangat *affirmative action*, yaitu sederetan langkah-langkah, prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan, dan program-program yang dirancang untuk mengatasi sisa-sisa pengaruh yang ada dari diskriminasi dan pengingkaran hak (deprivasi) masa lampau kepada kelompok-kelompok masyarakat. Itu semua dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan semua pihak yang telah diuntungkan oleh tatanan mapan (*establishment*), khususnya papan atas dan menengah kelompok-kelompok ekonomi nasionalis-patriotik yang juga bersemangat keswastaan dan keswadayaan produktif.

Dengan *affirmative action* tersebut, segi paling buruk dari ekonomi terbuka tercegah dari kemungkinan bergeser ke eko-

nomi *laissez faire laissez passer*, suatu keadaan yang memberi peluang bagi terjadinya penindasan oleh manusia atas manusia (“*exploitation de l’homme par l’homme*”). Tetapi, pada waktu yang sama, *affirmative action* harus dicegah jangan sampai berubah menjadi tindakan diskriminatif.

5. **Mengembangkan dan memperkuat pranata-pranata demokrasi: kebebasan sipil (khususnya kebebasan pers dan akademik), pembagian tugas dan wewenang yang jelas antara pemerintahan, perwakilan, dan pengadilan.**

“*Dalam masyarakat bebas, tidak akan terjadi bahaya kelaparan*”, begitu bunyi sebuah ungkapan optimis tentang efek positif kebebasan. Ungkapan itu sepintas lalu tampak seperti mengandung urutan logika yang terputus: apa hubungan kebebasan dan jaminan tidak akan terjadi bahaya kelaparan?! Tetapi sesungguhnya ungkapan itu benar, paling tidak pada dua tingkatan pengertian. Tingkat pengertian pertama ialah, bahwa dengan kebebasan maka akan tumbuh mekanisme pengawasan sosial terhadap setiap segi kehidupan dalam negara. Gejala bahaya kelaparan di suatu tempat akan merupakan kejadian yang patut diberitakan. Pemberitaan itu berdampak pengawasan, dan dengan begitu juga berdampak gugatan kepada pihak berwenang untuk menunjukkan tanggung jawab mereka, di samping dampak gugatan kepada nurani warga masyarakat untuk memberi bantuan kepada pihak yang menderita. Dengan begitu suatu bahaya kelaparan teratasi, dan dalam suasana sikap kejiwaan umum yang terbentuk, tumbuhlah keprihatinan bersama untuk mencegah jangan sampai hal serupa terulang lagi di masa mendatang.

Tetapi barangkali pengertian tingkat kedua lebih bermakna. Suasana bebas adalah pendukung utama bagi terciptanya iklim kreativitas dan produktivitas warga masyarakat di segala bidang kegiatan. Bersama dengan tegaknya keadilan, kebebasan adalah sumber energi yang dinamis bagi warga masyarakat untuk

mendorong tumbuhnya inisiatif-inisiatif produktif. Dinamika ekonomi swasta-swadaya yang berfungsi sebagai fondasi cakar ayam bangunan negara-negara akan tumbuh hanya dalam suasana kebebasan. Sebaliknya, tidak adanya kebebasan, yang salah satu wujudnya ialah sentralisme yang berlebihan, akan menumbuhkan sikap kejiwaan umum yang serba menunggu secara pasif-statis, akibat pola pendekatan masalah yang berat *top-down*, seperti yang menjadi ciri negara totaliter-otoriter. Karena itu, totalitarianisme dan otoritarianisme, sebagaimana telah disinggung di depan, akan mematikan kemampuan warga masyarakat untuk mengambil inisiatif produktif dari bawah.

Berkaitan dengan semua itu, di antara berbagai hasil gerakan reformasi 1998, kebebasan adalah yang paling berharga dan paling bermakna. Kebebasan itu, yang pelembagaan konkretnya melahirkan noktah-noktah kebebasan warga negara (*civil liberties*) berupa kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, harus dikonsolidasi begitu rupa sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh perubahan-perubahan sosial-politik yang tak terduga di masa mendatang. Khususnya kebebasan pers dan kebebasan akademik, “ruang suci” (*sacred space*) masyarakat demokratis, harus benar-benar dilindungi dan dikembangkan dengan tingkat kesungguhan yang setinggi-tingginya.

Memang harus diakui dengan pahit bahwa kebebasan itu masih disertai dengan ketidakmatangan (*immaturity*) dalam pelaksanaannya, sehingga timbul berbagai ekses. Tetapi, seperti halnya dengan masalah-masalah lain, kita tetap harus mampu membedakan antara esensi yang prinsipil dan primer dengan ekses yang aksidental dan sekunder. Kita tidak boleh mencampuradukkan antara keduanya, dengan kemungkinan bahaya kita menangkan ekses yang aksidental-sekunder atas esensi yang prinsipil-primer, sehingga muncul pikiran untuk menarik kembali kebebasan hanya karena efek negatif ekses-ekses itu. Perlu senantiasa kita ingat bahwa tidak adanya kematangan adalah akibat tidak adanya pengalaman, dan bahwa pengalaman

itu sendiri akan kita peroleh hanya kalau kita pernah mengalami! Karena itu suatu kategori dinamis yang terkena kemungkinan untuk berkembang atau menyusut seperti kebebasan hanya terwujud melalui adanya eksperimental, “pengalaman” (harus dialami langsung), berbeda dengan kategori statis seperti bangunan fisik yang sekali dibangun langsung berdiri.

Maka kebebasan, sama halnya dengan keseluruhan ide tentang demokrasi, harus dilaksanakan melalui deretan “coba dan salah” (*trial-and-error*), yang bagaimanapun memang tidak mungkin dihindari. Yang tersisa dalam proses “pengalaman” atau eksperimentasi itu ialah usaha mencegah jangan sampai suatu kesalahan pelaksanaan tumbuh membesar tidak terkontrol begitu rupa sehingga menghancurkan perolehan yang sudah ada. Sebab, bagaimanapun harus disadari bahwa kebebasan, sekali lagi, adalah suasana kehidupan sosial-politik yang paling kuat mendorong kreativitas dan kemampuan ambil inisiatif dalam masyarakat pada umumnya, sehingga juga merupakan prasarana tumbuhnya produktivitas yang tinggi di segala bidang.

Kebebasan yang menjadi prasyarat bagi terciptanya mekanisme pengawasan sosial diwujudkan antara lain, dan yang paling penting, dalam pelembagaan politik yang masing-masing komponennya mengenal pembagian kerja yang jelas dan berhubungan satu sama lain dalam rangka *checks and balances* atau pengendalian dan pengimbangan. Kerangka pemikiran *trias politica* barangkali tidak mungkin terlaksana secara murni. Tetapi pengalaman politik modern menunjukkan bahwa kejumuhan atau *overlapping* dalam bidang kerja dan wewenang antara lembaga-lembaga administrasi pemerintahan, legislasi dan yudikasi akan menciptakan peluang bagi berbagai bentuk manipulasi politik. Diperlukannya mekanisme pengendalian dan pengimbangan (*checks and balances*) justru terkait dengan masalah dinamika hubungan kerja dan wewenang antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem

sosial-politik demokratis yang mensyaratkan adanya pembagian kerja yang jelas dan tegas antara ketiga lembaga itu.

Banyak orang memandang bahwa kekacauan itu dalam pembagian kerja antara ketiga lembaga itu di negara kita sekarang ini merupakan salah satu sumber korupsi dan bentuk-bentuk penyelewengan politik, akibat tidak tahu dan tidak dewasa. Menata kembali dengan baik pembagian kerja itu melibatkan persoalan tingkat mutu kesadaran tugas para pelakunya. Selanjutnya, kesadaran tugas berbakti kepada bangsa dan negara memerlukan kredensial, legitimasi, dan kemandirian diri para pelaku itu dalam menerima wewenang kenegaraan.

Menitik segi-segi kelemahan proses rekrutmen dan promosi seseorang menjadi anggota pembuat hukum di parlemen, pelaksanaan hukum di pemerintahan, dan pengawasan pelaksanaannya di lembaga keadilan, membuat kebanyakan para pelaku itu kekurangan kredensial, legitimasi, dan kemandirian diri. Seorang wakil rakyat haruslah datang dari kalangan rakyat yang diwakilinya, bukan seseorang yang muncul semata-mata sebagai hasil keputusan orang lain atau badan di luar rakyat bersangkutan itu sendiri, seperti pimpinan partai politik. Penggunaan cara “drop-drop” dalam penentuan seorang “wakil rakyat” adalah suatu kepalsuan, sebuah manipulasi politik yang menjadi sumber berbagai kecurangan dalam kehidupan kenegaraan kita. Kita melihat tanda-tanda bahwa “drop-drop” itu sedang diusahakan dengan keras untuk dipertahankan, mengingat bahwa hanya dengan cara itu orang-orang yang tidak punya kredensial dapat memperoleh kedudukan, dengan akibat langsung kemungkinan beroperasinya “politik uang” (*money politics*). Mengingat rakyat yang semakin cerdas dengan jumlah dan mutu kaum terpelajar yang semakin tinggi, dan dalam suasana kebebasan pers, maka kiranya tidak aneh jika cara “drop-drop” dalam pengangkatan dan penentuan wakil rakyat itu akan menjadi sasaran kritik umum, karena sifatnya

yang *scandalous*. Karena itu cara “drop-dropan” dapat menjadi sumber keonaran dan kekacauan sosial-politik.

Oleh karena itu, suatu reformasi berkenaan dengan kepartaian dan pemilihan umum mutlak diperlukan. Partai politik hendaknya dipimpin oleh mereka yang piawai dalam masalah politik dan manajemen politik, tetapi mereka sendiri bukan politisi. Manajemen partai itu secara profesional berusaha menangkap berbagai kecenderungan dalam masyarakat, yang kemudian diolah secara ilmiah. Dengan suatu warna ideologi tertentu partai atau arah pemihakannya — seperti, misalnya, pemihakan kepada golongan menengah ke bawah atau kepada golongan menengah ke atas, yang berturut-turut merupakan pola pemihakan Partai Demokrat dan Partai Republik Amerika — hasil analisa terhadap kecenderungan itu dijadikan dasar *platform* politik partai. Politisi calon peserta pemilu yang hendak menerima amanat pelaksanaan *platform* partai itu direkrut dan dipilih melalui proses terbuka, adil, dan meritokratik dari mekanisme konvensi yang dilaksanakan berjenjang dari bawah ke atas, sampai ke tingkat nasional. Dengan demikian seseorang terpilih menjadi peserta pemilu sebagai calon anggota badan legislatif atau presiden dan wakil presiden tidak sama sekali tergantung kepada restu pimpinan partai, melainkan atas pilihan para anggota partai secara demokratis. Sebab lembaga restu sebenarnya adalah kelanjutan paternalisme dan feodalisme, dan bertentangan dengan asas-asas keterbukaan, egalitarianisme, dan demokrasi partisipatif sebuah negara-bangsa.

Penerapan prinsip-prinsip kepartaian tersebut kemudian dilanjutkan secara konsisten dalam penerapan suatu sistem pemilihan umum, baik nasional maupun daerah, yang menjamin terlaksananya asas-asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jaminan bagi terlaksananya asas-asas itu akan semakin kuat jika melalui pelaksanaan pemilihan langsung (*direct election*), dengan kejelasan tentang siapa dan di mana

masyarakat pemilih (*constituent*) yang kepentingannya hendak diperjuangkan oleh politisi bersangkutan. Secara berkala, politisi wakil rakyat itu harus datang ke daerah masyarakat pemilihnya dan mempertanggungjawabkan kegiatannya di Dewan, dengan meminta saran-saran lebih lanjut dari mereka.

Sudah tentu seorang politisi akan tetap berhubungan dengan partainya yang berfungsi sebagai induk *platform* yang hendak ia laksanakan. Tetapi, sampai batas-batas tertentu, kesetiaan kepada negeri harus lebih diutamakan daripada kesetiaan kepada partai. Sebuah adagium banyak dirujuk Bung Karno berbunyi, “*My loyalty to party ends when my loyalty to my country begins*” — “*ketaatanku kepada partaiku berakhir pada saat ketaatanku kepada negeriku bermula*”, yang Bung Karno sendiri menerapkannya dengan konsekuen.

6. Meningkatkan ketahanan dan keamanan nasional dengan membangun harkat dan martabat personil dan pranata TNI dan Polri dalam bingkai demokrasi

Rendahnya tingkat kemampuan pertahanan kita dengan akibat rendahnya tingkat keamanan umum, mengundang keprihatinan yang mendalam pada semua warga yang mencintai bangsanya. Sebagian besar gejala kelemahan itu adalah akibat dinamika perkembangan bangsa kita yang kurang menguntungkan. Jatuhnya kekuasaan Orde Baru telah membawa serta merosotnya semangat aparaturnya negara dan menurunnya kesadaran tugas mereka, bersamaan dengan melemah atau runtuhnya legitimasi mereka, baik sebagai pribadi maupun sebagai institusi, dalam bidang-bidang kegiatan yang selama Orde Baru mereka perankan secara sentral.

Di antara sebab-sebabnya ialah, bahwa mereka secara personal maupun institusional telah menjadi bagian langsung dari sistem Orde Baru yang runtuh itu sendiri. Secara personal, sejumlah kecil anggota mencoba bersikap kritis kepada tatanan yang ada, tetapi kebanyakan dari keseluruhan anggota itu

tidak mampu menjaga jarak dengan tatanan tersebut. Krisis multidimensional, khususnya di bidang finansial-moneter, telah mengurangi secara drastis kemampuan melakukan penyegaran dan penggantian peralatan fisik pertahanan dan keamanan. Selain itu, tertunda-tunda pula pelaksanaan peningkatan kesejahteraan personil mereka secara wajar dan setara dengan beratnya tanggung jawab yang mereka pikul. Sorotan tajam terhadap mereka di bidang sosial-politik, khususnya di bidang-bidang tertentu yang bersangkutan dengan tindakan kekerasan — yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan — telah melahirkan perasaan-perasaan tersisih tertentu pada mereka, yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan.

Oleh karena itu, sangat mendesak adanya kebijakan yang jelas untuk mengembalikan harkat dan martabat pranata dan personil badan pertanggungjawaban khusus masalah ketahanan dan keamanan itu, yaitu TNI dan Polri, dengan memberi kepada mereka kelengkapan-kelengkapan yang wajar. Dengan sendirinya semua itu harus terjadi dalam bingkai sistem demokrasi dan proses demokratisasi, dalam kesadaran politik untuk melakukan pengawasan dan pengimbangan. Kita perlukan hal itu semua, karena pada kesimpulan terakhir demokrasi dan demokratisasi tidak akan terwujud tanpa ketahanan nasional, stabilitas negara, dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

7. Memelihara keutuhan wilayah negara melalui pendekatan budaya, peneguhan kebhinekaan dan keikaan, serta pembangunan otonomisasi

Di bagian terdahulu telah dicoba kemukakan cukup panjang bahwa salah satu persoalan kenegaraan kita ialah tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan prinsip kebhinekaan dan keikaan sesuai dengan semangat *motto* kenegaraan kita. Kecenderungan kuat untuk melakukan penyeragaman — dengan implikasi pemaksaan dari atas — telah ikut mendorong tumbuhnya

perasaan tidak puas daerah kepada pusat, yang pada urutannya ikut memicu pergolakan daerah. Ditambah dengan tipisnya kadar keinsafan keadilan dalam pembagian kembali kekayaan nasional, khususnya kekayaan yang datang dari daerah bersangkutan, pergolakan daerah mudah sekali berkembang menjadi perlawanan untuk memisahkan diri (separatisme). Dan kita pun sekarang berhadapan dengan ancaman terganggunya kesatuan negara kita yang semakin gawat.

Berkenaan dengan hal di atas, tindakan kita terbaik ialah kembali kepada konsistensi semangat *motto* negara kita, *Bhinneka Tunggal Ika*. Karena itu kita harus menghargai pola-pola budaya daerah dan mengakui hak masing-masing untuk mengembangkan budaya mereka. Kita harus menerima kebhinekaan sebagai kekayaan, dan serentak dengan itu kita memelihara keikaan berdasarkan kepentingan bersama secara nasional. Kita harus memandang budaya daerah yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai perwujudan kearifan lokal yang harus dijaga keutuhan dan kelestariannya. Keanekaragaman budaya itu harus dijadikan pijakan untuk “berlomba-lomba menuju kepada berbagai kebaikan”. Sebagaimana telah dikemukakan di depan, “perlombaan” itu akan menciptakan suasana penyuburan silang budaya yang akan memperkaya dan menguatkan budaya nasional sebagai budaya hibrida yang unggul dan tangguh. Dalam hal ini, tidak satu pun budaya daerah yang terkecualikan.

Berhubungan dengan itu semua ialah masalah otonomisasi. Pikiran memberi hak kepada daerah untuk mengatur sendiri “urusan rumah tangga” masing-masing terkait erat dengan masalah keadilan, khususnya keadilan antara pusat dan daerah bersangkutan, dan bertujuan mengakhiri ekstremitas sentralisme yang telah terbukti merupakan salah satu sumber besar masalah nasional. Bersama dengan banyak contoh yang lain dalam penanganan masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, sentralisme yang berat adalah bertentangan

dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan kita ber-negara. Pada tahap-tahap awal pelaksanaan otonomisasi itu banyak terjadi kasus tindakan eksekutif bergaya *euphoria* oleh sebagian penanggung jawab pemerintahan daerah. Di sini kita berhadapan dengan persoalan mana primer dan mana sekunder: otonomisasi adalah primer, dan eksekutif pelaksanaannya adalah sekunder. Kita tidak dibenarkan mengorbankan yang primer prinsipil karena muncul hal-hal sekunder aksidental, sehingga eksekutif membatalkan esensi.

8. Meratakan dan meningkatkan mutu pendidikan di seluruh Nusantara

Di antara berbagai macam *investment*, investasi atau penanaman modal untuk suatu bangsa, tidak ada yang lebih penting, lebih produktif dan lebih bermakna daripada investasi atau penanaman modal manusia melalui prasarana pendidikan yang baik, dengan mutu yang tinggi dan jumlah yang merata. Dengan bercermin pada pengalaman bangsa-bangsa lain di sekitar kita, secara sederhana dapat kita katakan bahwa seluruh krisis yang menimpa kita sekarang ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan warga negara kita dan tidak meratanya pendidikan itu dari daerah ke daerah. Dalam kesempatan tertentu pembicaraan mengenai bangsa kita, tidak jarang terdengar penilaian orang luar bahwa kita adalah bangsa yang berpikiran sederhana (*simple minded*), tidak ada sofistikasi, dan sangat kurang minat untuk membaca serta untuk belajar secara mendalam dan meluas. Kita bisa menukas penilaian yang kurang menyenangkan itu dengan merujuk kepada berbagai contoh pemikiran mendalam dan kontemplatif di kalangan kelompok-kelompok tertentu masyarakat kita. Tetapi kita akan susah membela diri jika kita ditantang untuk menjelaskan berbagai contoh gejala berpikir sederhana atau *simple mindedness* itu seperti, misalnya, yang biasa dipandang umum sebagai “premanisme”. Dan suatu ironi besar bahwa

gejala “premanisme” itu tidak hanya kita temukan di kalangan orang “pinggir jalan”, tetapi juga di antara mereka yang secara formal menduduki tempat-tempat terhormat.

Investasi Modal Manusia

Tujuan primer dan tertinggi usaha pendidikan ialah peningkatan (*tarbiyah*) nilai kesucian manusia dalam fitrahnya yang dianugerahkan Tuhan. Guna menopang tujuan primer itu, pendidikan mempunyai tujuan sekunder, sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*), dengan dua macam dampak positif. Pertama ialah dampak peningkatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme, yang bersangkutan dengan tujuan pokok pendidikan itu sendiri menurut bidang-bidang yang dikembangkannya, seperti teknologi, kesehatan, manajemen, pertanian, keguruan, dan sebagainya. Tinggi-rendah kualitas dampak primer merupakan batu penguji sukses-gagalnya investasi sumber daya manusia itu. Dari sudut pandang tinggi-rendah dampak itu, kita harus mengakui bahwa sistem dan struktur pendidikan kita sebagai investasi sumber daya manusia termasuk yang paling rendah di dunia. Dalam lingkungan negeri-negeri Asia Tenggara, negeri kita sekarang sudah cukup jauh tertinggal oleh yang lain-lain.

Dampak lain dari pendidikan ialah meningkatnya kemampuan untuk berpikir dan bertindak rasional, untuk menyerap informasi dalam jumlah yang besar, dan untuk menyusun informasi itu secara sistematis, agar dapat digunakan secara efektif, kemudian mampu mengartikulusikannya dalam bahasa yang fasih dan kuat. Dengan kata lain, pendidikan akan memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan di segala bidang kehidupan, termasuk bidang sosial-politik. Sebagaimana dimaksudkan oleh ungkapan *knowledge is power*, pendidikan yang berhasil akan menjadi sumber energi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan memiliki informasi dan pengetahuan yang luas, seorang individu ataupun

suatu kelompok akan lebih mampu mengenali berbagai alternatif tindakan yang tersedia, sehingga senantiasa dapat menemukan jalan untuk memecahkan masalah, dan dengan begitu juga tidak mudah putus asa. Karena itu ilmu adalah syarat kesuksesan hidup, setelah iman yang memberi dasar kepada kehidupan yang benar. Tuhan akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu ke tingkat yang sangat tinggi, setelah orang itu, karena adanya wawasan yang luas, menunjukkan dan menerapkan sikap-sikap lapang dada, toleran, dan penuh pengertian kepada orang lain. Dia akan *“berlapang-lapang jika ia diminta memberi tempat kepada orang lain dalam pertemuan, dan akan berdiri mengalah jika ia diminta berdiri,”* (lihat Q. 58:11).

Dampak tersebut dapat dikatakan merupakan dampak tak sengaja atau *unintended consequence* dari pendidikan. Dampak itu sangat besar dan luas jangkauan pengaruhnya kepada masyarakat untuk mendorong perubahan sosial yang besar. Justru *unintended consequence* pendidikan ini seringkali jauh lebih penting daripada tujuan keilmuan akademiknya. Contoh paling baik dampak ini ialah, sebagaimana telah dikemukakan di bagian terdahulu, dampak pendidikan kedokteran “Jawa” oleh STOVIA dan NIAS yang telah membangkitkan ide dan gerakan tahap-tahap awal nasionalisme modern di tanah air, yang mengantarkan kita kepada kemerdekaan negara. Maka dari sudut pandang kedua dampak tersebut itu, pendidikan adalah benar-benar bentuk investasi yang paling strategis dan paling produktif. Karena itu sudah sangat sewajarnya jika pendidikan diletakkan pada salah satu tingkat paling tinggi dalam skala prioritas pembangunan bangsa dan negara. Jelas sekali bahwa untuk melaksanakan ini semua diperlukan kemauan politik yang teguh dari pimpinan negara. Lebih-lebih lagi kemauan politik yang teguh itu diperlukan, karena pendidikan adalah jenis investasi jangka panjang, yang baru terlihat hasilnya setelah suatu jangka waktu tertentu, umumnya satu generasi, yaitu 20 tahun. Karena itu diperlukan ketabahan untuk menunda berbagai harapan kesenangan, dan untuk secara bersama-sama memikul beban penundaan itu, hampir-hampir dalam semangat *“lebih baik*

sekarang mandi keringat saat pendidikan daripada kelak mandi darah saat perjuangan". Secara potensial, setiap masyarakat dan bangsa memiliki dan mengajarkan kearifan menunda kesenangan sementara demi kebahagiaan masa depan yang lebih besar dan hakiki. Tetapi hanya sedikit yang benar-benar berpegang kepada kearifan itu.

Peningkatan mutu pendidikan mengharuskan penyediaan prasarana yang memadai dan pembukaan akses kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan memerlukan biaya yang besar, dan pendidikan untuk umum, yakni warga negara secara keseluruhan, tidak mungkin tanpa keterlibatan langsung pemerintah. Karena itu pemerintah harus menyediakan pendidikan bermutu dengan biaya rendah, bahkan mungkin bebas, untuk warga negara pada umumnya.

Peningkatan mutu pendidikan itu juga mengharuskan adanya akses yang mudah kepada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Karena perekaman ilmu pengetahuan itu ada dalam bahasa-bahasa asing, maka diperlukan penguasaan kepada bahasa-bahasa asing itu. Selain untuk mempertinggi akses kepada perkembangan dunia ilmu pengetahuan, penguasaan bahasa asing juga akan mempertinggi profesionalisme dan penampilan diri secara global dan dalam kancah-kancah internasional.

Peningkatan mutu pendidikan, dalam hubungannya dengan keharusan adanya kemudahan akses kepada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, juga memerlukan kegiatan penerjemahan karya-karya ilmiah dari bahasa-bahasa asing ke bahasa Indonesia. Sebab, sekalipun terdapat sejumlah orang yang menguasai bahasa-bahasa asing, namun akses secara massal kepada suatu informasi tetap harus dalam bahasa Indonesia, mengingat pasti sebagian besar warga negara akan tetap tidak menguasai bahasa asing. Di samping itu, pengindonesiaan komunikasi ilmiah, serta komunikasi-komunikasi lainnya, kecuali mempermudah partisipasi yang luas, juga berdampak pendemokrasian ilmu pengetahuan, sehingga tidak menjadi monopoli kalangan-kalangan kecil masyarakat. Karena informasi dan pengetahuan adalah tenaga dan kekuatan,

maka monopoli informasi dan pengetahuan akan mengakibatkan pemusatan tenaga dan kekuatan pada kelompok kecil masyarakat. Hal ini dapat mengancam demokrasi, sebab, seperti sering terdengar dalam masyarakat, “orang bodoh makan orang pandai”.

Pemerataan mutu maupun jumlah pendidikan merupakan sebuah urgensi besar bagi bangsa kita. Sebab, sementara di kota-kota besar telah banyak warga yang memasuki era globalisasi peradaban manusia dengan fasilitas-fasilitas komunikasi dan transportasi, bersamaan dengan itu masih banyak kantong-kantong warga bangsa kita yang masih mengikuti cara hidup yang jauh tertinggal, sebagian bahkan masih dalam zaman batu. Kepincangan dalam pendidikan, pengetahuan, dan informasi itu sangat berbahaya, dan bertentangan dengan tujuan negara “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Pendidikan adalah sarana paling penting untuk meratakan dan menyamakan tingkat mutu sumber daya manusia bangsa kita, mencakup dan meliputi seluruh tanah air. Karena itu diperlukan kebijakan dan kemauan politik yang teguh pada pihak pemerintah untuk dengan sadar dan terarah memberi perhatian yang lebih besar kepada daerah-daerah terpencil dan terisolasi dalam usaha pemerataan pendidikan nasional itu. Sejalan dengan otonomisasi, daerah-daerah harus didorong untuk memberi perhatian khusus yang lebih besar kepada bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Daya serap suatu daerah otonom terhadap dana-dana yang tersedia, dan kemampuannya untuk menggunakan dana-dana itu secara produktif dan adil, akan banyak sekali ditentukan oleh tinggi-rendahnya tingkat pendidikan warga daerah itu. Otonomisasi akan sukses hanya jika ada daya serap yang tinggi terhadap dana-dana dan kemampuan untuk menggunakan dengan baik.

Masalah Penelitian

Pendidikan dalam arti peningkatan ilmu pengetahuan dan perluasan serta pendalaman informasi mencakup kegiatan-kegiatan

penelitian ilmiah. Dalam hal riset dan pengembangan (*research and development, R & D*) ini pun kita bangsa Indonesia termasuk yang paling rendah di dunia. Sebabnya tidak lain ialah rendahnya kesadaran kita semua tentang pentingnya penelitian ilmiah. Lagi-lagi, sebagai jenis investasi, penelitian juga tidak akan menyajikan hasil yang dalam jangka pendek dapat dinikmati. Tetapi, dalam jangka panjang, keberhasilan penelitian ilmiah tidak saja akan membuat suatu bangsa lebih produktif, melainkan juga lebih mandiri dan lebih berdaulat, seperti terbukti pada negara-negara maju. Karena itu, semua fasilitas penelitian yang ada seperti, misalnya, lembaga-lembaga penelitian dalam bidang-bidang pertanian (kita memiliki kebun botani tropis terbesar di dunia!), kelautan, kedirgantaraan, tenaga atom, sumber-sumber energi, dan seterusnya, harus dimanfaatkan secara optimal dengan perhatian yang lebih serius atas dasar kesadaran dan kemauan politik yang tinggi. Atas dasar itu pula fasilitas-fasilitas baru harus didirikan dan disediakan sebanyak mungkin, sesuai dengan tingkat kemampuan nasional dalam hal pembiayaan dan pengelolaan. Bersamaan dengan itu harus digalang kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, antara lain demi meningkatkan mutu kemampuan para peneliti nasional. Dibanding dengan negara-negara tetangga terdekat, kita merasakan adanya ironi besar, karena kita tertinggal tidak hanya dalam penelitian dan pengembangan bidang teknologi tinggi, tetapi juga dalam bidang pertanian dan kelautan yang justru merupakan keistimewaan negeri kita sebagai negeri tropis terbesar di dunia yang membentang sepanjang Khatulistiwa dengan garis pantai amat panjang dan wilayah bahari yang amat luas.

Masalah Pendidikan Agama

Dalam sosiologi sistematik, agama berada pada puncak hubungan sibernetik yang meliputi — dalam urutan berjenjang — budaya, komunitas kemasyarakatan (*societal community*), perpolitikan

(*polity*), ekonomi, dan teknologi. Secara sibermetik, susunan atas mengendalikan (*control*) susunan di bawahnya, dan susunan bawah mengondisikan (*condition*) susunan di atasnya. John Gardner, seorang cendekiawan Amerika yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan (*Health, Education and Welfare* — HEW) dalam pemerintahan Presiden John F. Kennedy, mengatakan, “*no nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civiltation*” (tidak ada bangsa yang mampu mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu percaya kepada sesuatu, dan kecuali jika sesuatu itu memiliki dimensi moral untuk menopang suatu peradaban yang besar). Agama adalah sistem kepercayaan, dan agama besar memiliki dimensi moral yang besar untuk menopang peradaban yang besar.

Dari sudut pandang itu kita dapat memahami bahwa peradaban-peradaban besar umat manusia, sebagaimana dilambangkan dalam berbagai bangunan monumental peninggalan masa silam, selalu berdasarkan, atau setidaknya berkaitan, dengan suatu agama. Agama menentukan corak budaya, yang pada urutannya akan menentukan corak komunitas kemasyarakatan, kemudian perpolitikan, ekonomi, dan akhirnya, teknologi. Sebaliknya, suatu perkembangan kreatif tertentu yang besar di bidang teknologi — seperti ditemukannya teknologi bercocok-tanam oleh bangsa-bangsa Mesopotamia kuno, teknologi mesin uap di Inggris, dan, saat ini, teknologi elektronik untuk komunikasi dan pengembangan informasi — akan mengoordinasikan tumbuhnya suatu pola ekonomi tertentu, yang seterusnya secara berurutan akan mengoordinasikan pola perpolitikan, komunitas kemasyarakatan, kebudayaan, dan bahkan, pemahaman serta penafsiran bagian-bagian tertentu ajaran agama.

Semua bentuk-bentuk hubungan sibermetik pengawasan atas-bawah itu harus disadari dan diperhitungkan dalam mengembangkan pendidikan agama. Sebagai sistem simbolik, agama banyak menggunakan metafora atau masal (*matsal*) dalam menyampaikan pesan sucinya. Sebab, masalah kesucian selamanya berada pada

dataran hakikat luhur (*al-matsal al-a'lâ, kasunyatan adi luhung, high reality*) yang pada dasarnya tidak dapat diterangkan (*ineffable*) dengan kata-kata biasa. Menerangkan hal-hal suci (*sacred*) yang merupakan hakikat luhur itu dilakukan dengan menggunakan masal-masal. Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa dalam Kitab Suci, Allah membuat berbagai masal bagi manusia, namun sebagian besar mereka mengingkarinya, dan tidak akan mampu memahami berbagai masal itu kecuali orang-orang yang berilmu.

Dalam pendidikan agama, soal agama sebagai sistem simbolik itu harus benar-benar diperhatikan. Tantangan dalam hal ini ialah, bagaimana memahami simbol-simbol itu dan menangkap makna hakiki yang ada di baliknya, dengan menggunakan ilmu seperti dimaksudkan Kitab Suci. Jika tidak, maka kita akan terjebak kepada masalah perumpamaan atau simbol tanpa makna, dan kita akan gagal menangkap esensi ajaran agama itu sendiri. Maka dalam hal pendidikan agama, jelas sekali diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperbarui pilihan substansi ajaran keagamaan yang hendak ditanamkan kepada anak-didik serta masyarakat pada umumnya itu, dengan mencari dan menemukan metode pendidikan dan pengajaran agama yang efektif, efisien, dan produktif. Kesibukan yang terpaku hanya kepada simbol semata, tanpa menangkap maknanya, akan melahirkan gejala kesalehan lahiri dan formal, suatu kesalehan yang mengecoh. Seperti diperingatkan Nabi *saw* dalam sebuah hadis terkenal, "*Allah tidak memandang jasmanimu dan tidak pula bentuk lahirmu, tetapi Allah memandang kalbumu dan amal perbuatanmu.*" Sudah tentu, disertai ketulusan, bisa terjadi bahwa penampakan lahiri menunjukkan hakikat batini.

Tentang Pendidikan Perempuan

Masalah pemerataan jumlah dan mutu pendidikan juga bersangkutan dengan masalah *gender* atau jenis. Keterbelakangan Indonesia di

bidang pendidikan bersifat menyeluruh, meliputi kedua jenis, lelaki dan perempuan. Tetapi keterbelakangan itu lebih-lebih lagi menggejala dalam hubungannya dengan jenis, yaitu bahwa secara umum jenis perempuan masih jauh tertinggal oleh jenis lelaki. Kesenjangan gender dalam pendidikan (dan bidang-bidang kehidupan yang lain) bukanlah perkara yang secara unik hanya terdapat pada bangsa kita. Namun persoalannya menjadi ironis, mengingat bahwa dari semula, sejak masa-masa awal perjuangan melawan penjajahan dan merebut serta mempertahankan kemerdekaan, kaum perempuan Indonesia memiliki saham yang lebih besar daripada di kalangan bangsa-bangsa lain. Karena itu pemerataan mutu dan jumlah pendidikan harus secara khusus ditujukan kepada kaum perempuan, sehingga setara dengan kaum lelaki.

Sesungguhnya perhatian yang besar kepada masalah pendidikan kaum perempuan memiliki nilai ekonomi pendidikan yang tinggi. Sebagai ibu yang secara kejiwaan sangat dekat kepada anak-anak, jauh lebih dekat daripada kaum lelaki, mutu pendidikan pada mereka akan langsung berdampak pada mutu pendidikan anak-anaknya. Penghematan yang terjadi ialah, bahwa mendidik seorang perempuan (bakal) ibu adalah sama dengan mendidik seluruh keluarga. Hal ini telah terbukti pada bangsa-bangsa Eropa pada saat-saat apa yang dinamakan “Reformasi” agama. Pandangan “Reformasi” yang menghendaki adanya akses kepada Kitab Suci untuk semua pemeluk, tidak terbatas hanya kepada para imam, telah mendorong adanya gerakan pemberantasan buta huruf. Karena kaum lelaki kebanyakan habis waktunya di ladang — sebagai kaum pekerja petani dalam sistem feodal — maka konon yang lebih banyak waktu untuk mengikuti pendidikan pemberantasan buta huruf adalah kaum perempuan. Dan “melek huruf” kaum ibu itu menjadi sumber dorongan pendidikan anak-anak dalam rumah tangganya. Kemajuan tingkat pendidikan pada rumah tangga itu, menurut suatu versi tentang awal mula kemajuan Eropa, menjadi tonggak kemajuan tingkat pendidikan masyarakat dan bangsa.

Kesehatan sebagai Pendidikan

Terkait erat sekali dengan masalah pendidikan adalah masalah kesehatan. Pada hakikatnya pengembangan kesehatan, baik pada tingkat pribadi maupun tingkat masyarakat, adalah suatu jenis pendidikan juga, yaitu pendidikan jasmani dalam arti luas. Sebab jika hakikat pendidikan adalah usaha peningkatan kemampuan, maka harus tidak dibatasi hanya kepada peningkatan kemampuan intelektual semata, tetapi juga peningkatan kemampuan jasmani.

Untuk mendorong laju kemajuan bangsa yang lebih cepat, agenda pengembangan kesehatan bangsa ditujukan kepada usaha melindungi dan memperbaiki kesehatan seluruh warga negara, melakukan dan mendukung penelitian tentang sebab suatu jenis penyakit dan cara pengobatannya, dan menjamin kebersihan dan keselamatan dalam makanan, obat-obatan, kosmetika dan produk-produk lain yang dikonsumsi masyarakat. Berkenaan dengan masalah kebersihan dan keamanan makanan, konsep keagamaan tentang makanan yang halal dan baik (*halâl-an thayyib-an*) dapat dijadikan salah satu prasarana untuk mengembangkan kesadaran tentang kebersihan dan keamanan makanan bagi masyarakat. Fasilitas pengobatan dan penyehatan kembali orang sakit seperti rumah sakit, sanatorium, pusat kesehatan masyarakat, dan sebagainya, harus tersedia dalam jumlah yang memadai dan terbuka bagi pelayanan umum secara mudah. Mengingat negara kita sudah tumbuh menjadi negara industri dengan pengalaman keselamatan kerja yang belum sempurna, perhatian khusus harus diberikan kepada masalah kecelakaan kerja yang semakin meningkat. Demikian pula terhadap masalah narkoba, AIDS, dan sebagainya, disebabkan oleh adanya dimensi internasional kejahatan dalam perdagangan obat-obat berbahaya itu dan penyebaran penyakit yang menyertainya, maka demi menjaga kesehatan bangsa dalam jangka panjang, perhatian yang lebih khusus harus diberikan, dengan *law enforcement* yang tegas, dan dengan menjalin kerja sama antar-negara seerat-eratnya. Dan sebagaimana halnya dengan bidang-

bidang lain, dalam bidang kesehatan ini kita juga harus mengambil manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan berbagai lembaga kesehatan internasional, khususnya berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan atau *research and development*. Beberapa kasus penyebaran wabah penyakit yang mengancam dunia berhasil diatasi berkat kerja sama internasional.

Termasuk dalam masalah kesehatan sebagai masalah pendidikan ialah pendidikan jasmani, karena pendidikan jasmani juga suatu bentuk investasi sumber daya manusia. Prasarana pendidikan jasmani dalam arti olah raga seharusnya ditingkatkan sesuai dengan kesadaran tentang pentingnya pendidikan jasmani itu. Demikian pula dalam hal kebutuhan-kebutuhan jasmani lainnya, yang diringkaskan dalam ungkapan tentang “pangan, sandang, dan papan”, keadaan bangsa kita sekarang menunjukkan adanya desakan tinggi untuk dilakukan reformasi dan peningkatan. Suatu hal amat menyedihkan bahwa bangsa yang dahulu pernah swasembada pangan sekarang merosot menjadi amat tergantung kepada bangsa-bangsa lain melalui impor. Karena hakikat manusia selamanya kompleks dan persoalannya serba menyeluruh, maka masalah kesejahteraan jasmani pun amat tergantung kepada hal-hal lain seperti masalah-masalah sosial dan politik. Maka dalam hal pendidikan jasmani, khususnya keolahragaan nasional, juga diperlukan kemauan politik yang jelas dari pemerintah.

Tentang Pendidikan Lingkungan

Salah satu kesadaran baru yang amat penting pada umat manusia sekarang ialah kesadaran tentang betapa pentingnya memelihara alam lingkungan. Bencana-bencana alam yang menimpa umat manusia akhir-akhir ini banyak sekali yang merupakan akibat kerusakan lingkungan: “*Muncul kerusakan di lautan dan di daratan karena ulah tangan manusia,*” (lihat Q 30:41). Pendidikan lingkungan hidup harus melibatkan usaha penyadaran tentang harga tak ternilai dari alam sebagai anugerah Tuhan. Manusia ditunjuk sebagai khalifah Tuhan untuk memelihara anugerah itu dan memanfaatkannya

dengan penuh syukur kepada-Nya. Karena itu membuat kerusakan di bumi adalah salah satu kejahatan tertinggi.

Selain berwujud alam kebendaan mati seperti gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai dan seterusnya, anugerah Tuhan itu juga berwujud alam kehidupan (hayati) yang beraneka ragam, baik flora maupun fauna. Tuhan menganugerahkan kepada bangsa Indonesia keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang terbesar di muka bumi, yang merupakan titipan Tuhan untuk dipelihara bagi sebesar-besar manfaat bangsa dan seluruh umat manusia. Jadi, selain kepada negara sendiri, kita bangsa Indonesia memikul tanggung jawab kepada seluruh dunia. Pendidikan kita harus menanamkan kesadaran itu.

9. Mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan bernegara

Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dan diakhiri dengan tujuan pokok kehidupan kenegaraan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Asas-asas perikemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan berada dalam spektrum yang bermula dengan Ketuhanan dan berujung dengan keadilan sosial itu, sejalan dengan prinsip negara-bangsa yang bertujuan menciptakan maslahat umum. Berkenaan dengan ini, telah disinggung di bagian terdahulu, suatu ironi besar telah terjadi pada kita, karena negara kita termasuk beberapa negara yang paling banyak menderita ketimpangan sosial di dunia. Tidak lepas dari semua inti pembicaraan di muka, penderitaan ketimpangan sosial itu adalah akibat melemahnya kesadaran cinta tanah air atau patriotisme, semangat mendahulukan dan membela kepentingan bangsa atau nasionalisme, rendahnya standar etika dan moral sosial yang mendorong sikap-sikap mementingkan diri dan golongan sendiri, tanpa peduli kepada kepentingan bangsa dan negara, dan berbagai penyakit sosial-politik yang telah melemahkan negara dan bangsa. Karena itu, dalam tahap sekarang berkaitan dengan krisis nasional yang berpangkal dari persoalan KKN ini, keadilan sosial

tidak bisa tidak harus dimulai dengan pemberantasan KKN itu secara total. Adalah KKN itu yang pertama-tama menjadi sebab ketimpangan pembagian kembali kekayaan nasional pada tingkat pribadi, kelompok maupun daerah. Pemerintahan yang bersih merupakan prasarana paling penting bagi terwujudnya keadilan sosial.

Sejalan dengan itu, fungsi pemerintahan ialah tanggung jawab mempertahankan nasib warga negara yang miskin, memelas, tak berdaya (*destitute*). Sebab, masyarakat secara keseluruhan mempunyai kewajiban untuk setidaknya-tidaknya menjamin kesejahteraan minimal para anggotanya, dan karenanya harus menyediakan suatu perlindungan tertentu terhadap resiko yang seseorang tidak berdaya untuk melawannya. Jadi tidak benar lagi sepenuhnya memandang bahwa seorang individu bertanggung jawab atas nasibnya sendiri dan harus diberi kebebasan memilih apakah mau bahagia atau mau sengsara. Sebagian yang menimpa individu adalah tanggung jawab masyarakat, sehingga masyarakat wajib melakukan usaha mendorong yang baik dan mencegah yang buruk bagi masing-masing individu warganya. Masyarakat di sini dimaksudkan terutama lembaganya yang paling kuat dan berwewenang, yaitu pemerintah.

Pandangan dasar serupa itu bersifat universal, jadi sesungguhnya sejajar dengan asas perikemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat perbedaan dalam cara menyatakannya dan melaksanakannya, karena perubahan ruang dan waktu. Selain pemberantasan total KKN sebagai pangkal tolak utama, keadilan sosial di negeri kita sekarang pertama-tama memerlukan pemikiran serius tentang bagaimana menyediakan upah penyelamatan (*relief payments*) kepada yang memerlukan. Kedua, pemerintah juga dituntut untuk memberi subsidi dan mengatur organisasi-organisasi yang dibentuk oleh para pekerja, atau oleh para pekerja bersama majikan mereka, guna membantu anggota-anggotanya. Yang ketiga ialah menciptakan suatu sistem asuransi oleh pemerintah yang bersifat wajib. Justru dengan penggunaan yang berhasil dari sistem asuransi wajib itu persoalan upah penyelamatan dapat diiadakan.

Ringkasnya, penciptaan keadilan sosial adalah sejajar dengan pengertian “negara sejahtera” (*welfare state*), yang menuntut tersedianya standar hidup minimal untuk setiap warga. Penciptaan keadilan sosial menjadi lebih relevan untuk bangsa kita yang sedang bergerak menjadi negara industri. Berbeda dengan pola ekonomi agraris yang menyediakan ruang kemandirian kepada para petani, pengrajin, dan pedagang kecil, pola ekonomi industri menyebabkan semakin banyak orang yang hidup dari gaji atau upah, sehingga tergantung kepada majikan. Individualisme akibat ekonomi industri harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar, khususnya untuk membantu kaum penganggur, orang sakit, dan orang lanjut usia. Ditambah lagi, bahwa urbanisasi sangat mengurangi rasa tanggung jawab antarsesama manusia, sebagai akibat gaya hidup tidak saling kenal (*anonymous*).

10. Mengambil peran aktif dalam usaha bersama menciptakan perdamaian dunia

Di bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa Tuhan telah menetapkan hukum alam bagi kehidupan sosial manusia, bahkan bagi seluruh jagad raya, yaitu hukum keseimbangan. Sedikit mengulang dari apa yang telah dikemukakan terdahulu, ketika Nabi Dawud *as* berhasil membunuh Jalut dan menguasai al-Quds (Yerusalem) untuk dijadikan tempat suci bagi agama Allah, penuturan peristiwa itu diakhiri dengan penegasan, bahwa umat manusia terlindung dari kehancuran karena adanya kekuatan-kekuatan yang saling mengimbangi dan mengendalikan. Prinsip keseimbangan sebagai jaminan bagi kelestarian hidup dan budaya juga ditegaskan sebagai tujuan perang yang benar, perang di jalan Allah (*jihâd fî sabîl-i ‘l-Lâh*), sehingga gereja-gereja, biara-biara, sinagog-sinagog dan masjid-masjid, di mana nama Allah banyak disebut, semuanya bisa dilindungi. Jadi perang dapat merupakan mekanisme “*penolakan sebagian manusia oleh sebagian yang lain*”, karena beroperasinya hukum keseimbangan. Perang yang benar, perang di jalan Tuhan, adalah perang yang menghasilkan kelestarian

agama-agama dan budaya-budaya, sebagaimana dilambangkan dalam keutuhan pranata-pranata keagamaan. Jika muncul ancaman untuk menghancurkan suatu agama, termasuk budaya yang benar dan bermanfaat untuk manusia, maka Allah akan “turun tangan” memenangkan pihak yang benar dan membela kebenaran, mereka yang “membela Allah”.

Hukum alam dari Sang Maha Pencipta adalah hukum obyektif, tidak tergantung kepada kehendak manusia dan tidak dapat dipengaruhi, karena itu, tidak dapat diubah (*immutable*), tidak mengenal pergantian (*tabdil*), dan tidak pula mengenal peralihan (*tahwil*). Dalam ilmu politik, adanya hukum itu juga disadari, seperti Morgenthau tentang “politik perimbangan kekuatan” (*balance of power politics*) antara bangsa-bangsa, dalam bukunya, *Politics among Nations*. Politik perimbangan kekuatan merupakan jaminan obyektif bagi keamanan dunia.

Paling tidak, telah terjadi dua malapetaka sejarah manusia yang hampir menghancurkan manusia sendiri, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sebagai akibat munculnya kekuatan amat besar di Eropa yang mendominasi dan tidak tertandingi. Tetapi begitu perang dimulai, kebangkitan bangsa-bangsa secara bersama-sama mengimbangi kekuatan dominan itu dan dunia terselamatkan. Karena bakal menimbulkan kerusakan, maka “*setiap kali mereka kobarkan api perang itu Tuhan akan memadamkannya*”, dengan menampilkan kekuatan-kekuatan pengimbang dan pengendali.

Sebenarnya sejarah umat manusia penuh dengan peristiwa serupa itu, dan kita semua diperintahkan untuk mempelajarinya. Kita tidak perlu terlalu banyak berterima kasih kepada Julius dan Ethyl Rosenberg dari Amerika yang dihukum mati (1953) karena dituduh menjadi mata-mata Uni Soviet yang membocorkan rahasia atom ke negara komunis itu. Tetapi mungkin Senator Joseph McCarthy — dengan kampanye anti-Komunisnya yang terkenal sebagai *Mc Carthyism* — itu benar, ketika akhirnya punya alasan untuk panik menghadapi dunia kaum komunis karena mereka ini mulai mampu membuat senjata nuklir. Namun justru eskalasi

dalam pengembangan persenjataan nuklir dalam persaingan antara Amerika dan Uni Soviet itu ternyata telah menyelamatkan umat manusia dari “kiamat nuklir”. Sebab, eskalasi itu akhirnya mencapai tingkat yang tidak masuk akal (*absurd*), ketika masing-masing menjadi takut sendiri untuk menggunakannya, dan terciptalah keseimbangan yang menyelamatkan umat manusia. Menggunakan senjata nuklir pada tingkat daya perusakan dan jumlah yang sedemikian fantastis akan merupakan tindakan kegilaan (*madness*), dan akan mengakibatkan MAD (*Mutually Assured Destruction*), kepastian hancur bersama-sama, seluruh umat manusia.

Oleh karena itu, sungguh bijak-bestari bahwa para tokoh pendiri dan perintis pembangunan negara kita menyadari sedalam-dalamnya perlunya penciptaan keseimbangan kekuatan dunia itu. Konferensi Asia-Afrika di Bandung, 1955, yang menghasilkan Dasasila Bandung merupakan tonggak sejarah bangsa kita yang luar biasa pentingnya. Sedemikian pentingnya sehingga Vera Micheles Dean, seorang ilmuwan sosial, dalam bukunya, *The Nature of the non-Western World*, mengatakan telah terbentuknya “Bandungia”, yaitu kawasan dunia yang orientasi politiknya berkiblat ke Bandung, yang merupakan gabungan negara-negara Dunia Ketiga (*Third World*, dunia negara-negara berkembang). Konferensi Bandung melahirkan kekuatan yang menjadi pengimbang Dunia Pertama (*First World*, dunia kapitalis) dan Dunia Kedua (*Second World*, dunia komunis). Konferensi Bandung menjadi pangkal tolak berbagai bentuk kegiatan lanjutan yang sejiwa, sebagian berhasil dan sebagian lagi tidak berhasil, yaitu Konferensi Islam Asia Afrika, Konferensi Asia, Afrika dan Amerika Latin, *Conference of the New Emerging Forces (Conefo)*, bahkan *Games of the New Emerging Forces (Ganefo)*, dan dilanjutkan dengan Gerakan Non-Blok (GNB) yang saat ini masih ada sisa-sisa signifikansinya.

Perlu diingat bahwa semua itu pada dasarnya terjadi dalam lingkungan global yang diliputi oleh suasana Perang Dingin. Banyak tokoh dunia yang amat berjasa dalam proses berakhirnya Perang Dingin itu, seperti Kanselir Jerman (Barat) Willy Brandt,

Perdana Menteri Uni Soviet Mikail Gorbachev, tokoh reformis Republik Rakyat Cina Deng Xiaoping (Teng Hsiao-p'ing), dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan.

Umat manusia merasa lega dengan berakhirnya Perang Dingin. Tetapi kelegaan itu ternyata tidak berlangsung lama, karena terganggu oleh munculnya tesis-tesis ilmiah palsu seperti yang dibuat oleh Huntington tentang benturan budaya. Gangguan itu menjadi semakin nyata dengan adanya kekacauan dunia oleh terorisme yang jelas-jelas salah satu sebabnya ialah kegagalan memberi penyelesaian yang adil kepada masalah Palestina. Dikhawatirkan bahwa kekacauan akan terus berlangsung tanpa penyelesaian sejati bila *casus belli*-nya tidak diselesaikan secara adil dan tuntas. Orang boleh berselisih tentang siapa dan di mana *casus belli* itu, maka biarlah sejarah menentukan dan menghakiminya. Tetapi ibarat sarang lebah, tawon-tawon yang menebarkan sengat kekacauan dunia — yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi melalui berbagai kegiatan *by proxy* — tidak akan bubar sebelum tawon induknya itu ditemukan dan diselesaikan dengan adil dan benar.

Bangsa Indonesia yang pernah tampil penuh harkat dan martabat dapat mengulangi lagi peranan pentingnya dalam menjaga keseimbangan dunia. Sebab, sejalan dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, jaminan perdamaian dunia terletak pada adanya keseimbangan itu. Karena kenyataan dunia sekarang sedang menjurus kepada tatanan berkutub tunggal (*monopolar*) dengan dominasi satu adikuasa yang tak tertandingi, maka diperlukan penggalangan kekuatan-kekuatan pengimbang yang ada.

Namun semua itu tidak dalam kerangka suasana Perang Dingin yang mencekam karena hubungan saling bermusuhan, tetapi dalam suasana damai dunia yang bebas, yang memungkinkan terjadinya tukar pikiran yang kreatif dan konstruktif. Maka yang perlu digalang ialah terutama kekuatan-kekuatan hati nurani lintas negara dan bangsa, sekalipun negara atau pemerintah dapat mengambil inisiatif-inisiatif. Pola pembagian kekuatan dunia menurut model Perang Dingin yang membagi negara-negara menjadi Blok Timur, Blok

Barat, dan Non-Blok mungkin menjadi sedikit sekali relevansinya untuk keadaan sekarang. Efek globalisasi berkat kemajuan deret ukur teknologi transportasi dan informasi telah tidak memungkinkan pembagian dunia secara kaku. Hubungan dan interaksi timbal-balik antarnegara semakin tidak terhindarkan, justru semakin diperlukan. Politik menutup diri dari dunia luar semakin mustahil menjadi pilihan, dan negara-negara yang dulu menerapkannya, sekarang ramai-ramai meninggalkannya. Terbuktikan oleh pengalaman terbaru banyak negara, pembukaan diri akan lebih produktif dan lebih menguntungkan. Maka demikian pula dengan kita, bangsa Indonesia, salah satu bangsa besar di dunia.

Tetapi justru untuk dapat berinteraksi secara terbuka dengan dunia luar, kita memerlukan pijakan kaki yang kuat, yaitu mantapnya harkat dan martabat bangsa dan negara, atas dasar nasionalisme dan patriotisme yang didukung oleh kesadaran tinggi untuk menjaga dan melindungi seluruh wilayah tanah air sebagai kesatuan negara-bangsa yang merdeka dan berdaulat (*free sovereign nation-state*). Dengan pijakan kemerdekaan dan kedaulatan yang kokoh itu kita melangkahkan kaki untuk ikut berperan aktif menciptakan perdamaian dunia, pesan konstitusi negara kita, UUD 1945. [❖]

PENUTUP

Risalah ini ditulis tanpa pretensi hendak menyajikan hal baru tentang negara dan bangsa Indonesia. Meskipun menggunakan bahan dan cara pendekatan yang barangkali sebelumnya kurang biasa dilakukan orang, namun hakikat persoalan yang dicoba sajikan adalah sama.

Dorongan menulis risalah ini ialah keinginan berbagi pandangan dengan para warga bangsa, khususnya generasi muda. Ketika pelajaran sejarah di sekolah tidak menarik lagi, dan tinjauan masalah dari pandangan-pandangan asasi bisa menjemukan, maka yang dikhawatirkan ialah terjadinya pendangkalan dan penyempitan wawasan. Sesuatu yang belum diketahui hakikatnya selalu terasa aneh dan cenderung ditolak, karena memang manusia adalah musuh dari apa yang ia tidak tahu.

Pada titik perkembangan bangsa dan negara sekarang ini, kita rasanya dihentakkan oleh kesadaran perlunya menelaah ulang hakikat bangsa dan negara kita. Telaah itu dimulai sejak masa-masa silam yang cukup jauh sebagai latar belakang, sampai kepada masa kristalisasi kesadaran kebangsaan akibat perlawanan kepada penjajahan. Telaah itu diteruskan ke masa kebangkitan nasionalisme modern oleh kaum terdidik, kemudian masa konsolidasi nasionalisme itu melalui proses-proses eksperimentasi pelaksanaan pikiran-pikiran tentang *modern nation-state* Republik Indonesia, dengan silih bergantinya keberhasilan dan kegagalan. Telaah diakhiri dengan penilaian kepada krisis banyak segi yang dialami bangsa dan negara sekarang ini, disertai percobaan mengemukakan jalan keluar secara garis besar melalui deretan butir-butir sebuah *platform*.

Banyak sekali persoalan kebangsaan dan kenegaraan kita yang memerlukan kejelasan lebih lanjut melalui kegiatan tukar-pikiran yang bebas dan cerdas. Kegiatan itu saat ini semakin banyak dimungkinkan; *pertama*, karena meningkat pesatny taraf kecerdasan generasi muda; *kedua*, karena suasana kebebasan sipil yang merupakan hasil dan perolehan paling berharga dari gerakan reformasi.

Adanya kejelasan tentang persoalan kebangsaan dan kenegaraan akan melandasi terbukanya partisipasi warga negara dalam melakukan investasi sosial-politik untuk masa depan yang lebih menjanjikan. Kita semua harus mencari dan menemukan ide-ide terbaik tentang kebangsaan dan kenegaraan: pertama-tama dari para tokoh pendiri bangsa, dan selanjutnya dari pengalaman bangsa-bangsa di mana saja. Akan memboroskan waktu dan tenaga, bahkan sia-sia, jika kita terkungkung oleh pemikiran dalam pola berusaha “menemukan kembali roda” (*re-invent the wheel*). Perintah agama agar manusia mengembara di bumi dan mengambil pelajaran dari umat-umat yang telah lewat adalah penegasan tentang tidak dibenarkannya pikiran nativisme, dan atavisme. Nativisme dan atavisme adalah karakteristik paham kebangsaan sempit. Menggali, memelihara, dan mengembangkan budaya sendiri adalah suatu keharusan. Namun semua itu harus dilakukan tanpa nativisme ataupun atavisme, yaitu sikap-sikap yang memandang budaya sendiri sebagai yang paling benar dan unggul, tanpa melihat kemungkinan adanya segi-segi negatif seperti feodalisme. Letak kepulauan Nusantara tidak mengizinkan sikap-sikap serupa itu, karena sepanjang sejarahnya merupakan *crossroad* berbagai budaya di dunia, dan mendorong terjadinya akulturasi seperti budaya nasional yang kita warisi sekarang ini.

Pelaksanaan hal-hal di atas itu memerlukan kesadaran tentang arah dan tujuan perjuangan jangka panjang. Maka sangat diperlukan adanya kesediaan menempuh hidup asketis, ingkar kepada diri sendiri (*self denial*) untuk tidak menikmati *reward* perjuangan dalam jangka pendek, dan kesediaan untuk menunda

kesenangan (*to defer the gratification*) jangka pendek, karena di masa depan akan tersedia kebahagiaan yang besar dalam jangka panjang. Karena dimensi waktu bagi suatu investasi modal manusia (*human capital investment*) untuk membuah hasil atau *reward* itu biasanya satu generasi (sekitar 20 tahun), maka sesungguhnya saat terbaik melakukan investasi itu ialah satu generasi yang lalu, sehingga sekarang dapat dipetik buahnya. Tetapi jika kita tidak dapat melakukan investasi itu satu generasi yang lalu, maka saat terbaik melakukannya ialah sekarang. Jika tidak, maka satu generasi yang akan datang tidak terjadi kemajuan bangsa dan negara.

Di atas semuanya itu, kita harus menemukan cara mengatasi persoalan bangsa dan negara kita, “sekali ini dan untuk selamanya” (*once and for all*). Dengan tekad bersama itu, insya Allah kita terhindar dari kemungkinan mengalami krisis lagi yang tanpa berkesudahan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian terdahulu, saat sekarang, setelah perjalanan bangsa telah berlangsung selama setengah abad lebih, adalah saat yang paling tepat memulai pembangunan kembali negara, mengikuti pikiran-pikiran terbaik para pendirinya. Sudah saatnya kita semua melaksanakan amanat untuk berusaha menciptakan momen keteladanan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan, agar menjadi rujukan generasi-generasi berikutnya. Oleh karena itu diperlukan tingkat kesadaran kebangsaan dan kenegaraan yang tinggi.

Alternatif dari semua itu ialah sikap tidak peduli kepada situasi bangsa yang tidak berhasil melaksanakan cita-citanya sendiri, atau bahkan mungkin melawan cita-cita itu. Suatu bangsa yang melawan prinsip-prinsipnya sendiri tidak akan bertahan! Sekarang atau tak bakal pernah lagi! *Now or never!* [❖]

Makkah-Jakarta,
Ramadan 1424 H/November 2003

Nurcholish Madjid